



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran

SOSIOLOGI SMA

Kelompok Kompetensi D

**Profesional :
Masyarakat Multikultural**

**Pedagogik :
Media Pembelajaran**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



GURU PEMBELAJAR

MODUL

**Mata Pelajaran Sosiologi
Sekolah Menengah Atas (SMA)**

KELOMPOK KOMPETENSI D

**Profesional : Masyarakat Multikultural
Pedagogik : Media Pembelajaran**

Penulis : Susvi Tantoro, S.Sos, M.A.

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**

Penulis :

1. Susvi Tantoro, S.Sos., M.A., 081232883033, densusvi@gmail.com

Penelaah :

1. Dr. Sugeng Harianto, M.Si, 08123229551, harianto1964@yahoo.com
2. Dr. M. Jacky, S.Sos., M.Si., 085648602271, mjacky@unesa.ac.id

Copyright © 2016

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu pengetahuan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KATA SAMBUTAN

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting bagi kunci keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi tersebut dibedakan menjadi 10 (sepuluh) peta kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (*on line*), dan campuran (*blended*) tatap muka dengan daring.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP *on line* untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal

Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D

NIP. 195908011985032001

KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.

Batu, Januari 2016
Kepala PPPPTK PKn dan IPS
PUSAT PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PKn DAN IPS
Drs. M. Mahadjir, M.A
NIP. 195905241987031001



DAFTAR ISI

Kata Sambutan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Peta Kompetensi	2
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Saran Cara Penggunaan Modul	2
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1:	
Bentuk dan Perkembangan Kelompok Sosial (14 JP)	
A. Tujuan.....	3
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	3
C. Uraian Materi	3
D. Aktivitas Pembelajaran.....	22
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	22
F. Rangkuman.....	23
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	24
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2:	
Masyarakat Multikultural (14 JP)	
A. Tujuan	26
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	26
C. Uraian Materi	26
D. Aktivitas Pembelajaran.....	50
E. Latihan/ Kasus/Tugas	50
F. Rangkuman	50
G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut.....	51
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3:	
Multikulturalisme (12 JP)	
A. Tujuan	52
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	52
C. Uraian Materi	52
D. Aktivitas Pembelajaran.....	88
E. Latihan/ Kasus/Tugas	88
F. Rangkuman	88
G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut.....	95

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4:

Media Pembelajaran Sosiologi (9 JP)

A. Tujuan	96
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	96
C. Uraian Materi	96
D. Aktivitas Pembelajaran.....	127
E. Latihan/ Kasus/Tugas	128
F. Rangkuman	128
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	131

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5:

Analisis Media Pembelajaran (9 JP)

A. Tujuan.....	132
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	132
C. Uraian Materi	132
D. Aktivitas Pembelajaran.....	144
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	145
F. Rangkuman.....	147
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	148

Kunci Jawaban Latihan/Kasus/Tugas

Evaluasi

Penutup

Daftar Pustaka..... 149

Glosarium

Lampiran

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Guru Pembelajar sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkankompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Program Guru Pembelajar akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan Program Guru Pembelajar baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk Program Guru Pembelajar dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan Program Guru Pembelajar dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK, salah satunya adalah di PPPPTK PKn dan IPS. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat.

Modul tersebut merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat Guru Pembelajar Sosiologi SMA. Modul ini berisi materi, metode, batasan-batasan, tugas dan latihan serta petunjukcara penggunaannya yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Dasar hukum dari penulisan modul ini adalah :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK.

B. Tujuan

- a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai Standar Kompetensi yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memenuhi kebutuhan guru dalam peningkatan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

C. Peta Kompetensi

Melalui modul Guru Pembelajar diharapkan peserta diklat dapat meningkatkan kompetensi antara lain :

1. Memahami bentuk dan perkembangan kelompok sosial
2. Memahami masyarakat multikultural
3. Menganalisis multikulturalisme

D. Ruang Lingkup

1. Bentuk dan Perkembangan Kelompok Sosial
2. Masyarakat Multikultural
3. Multikulturalisme

E. Saran Cara Penggunaan Modul

1. Bacalah modul dengan seksama sehingga bisa dipahami
2. Kerjakan latihan tugas
3. Selesaikan kasus/permasalahan pada kegiatan belajar kemudian buatlah kesimpulan
4. Lakukan refleksi

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

BENTUK DAN PERKEMBANGAN

KELOMPOK SOSIAL

A. Tujuan

Setelah menyelesaikan Kegiatan Pembelajaran 1 ini, peserta diklat mampu memahami bentuk dan perkembangan kelompok sosial dengan baik

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan konsep kelompok sosial
2. Menjelaskan proses pembentukan kelompok sosial
3. Menjelaskan macam-macam kelompok sosial
4. Menjelaskan perkembangan kelompok sosial

C. Uraian Materi

Seorang sosiolog di dalam menelaah masyarakat manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil seperti keluarga maupun kelompok-kelompok besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, bangsa dan negara.

Suatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut ialah bagaimana cara mengendalikan anggota-anggotanya. Para sosiolog tertarik oleh cara-cara kelompok sosial tersebut dalam mengatur tindakan anggotanya agar tercapai tata tertib dalam kelompok. Penelitian terhadap pengalaman sosial (*social experiences*) dalam kehidupan kelompok agaknya juga sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kelompok terhadap individu dan bagaimana reaksi kelompok serta reaksi individu dalam proses pembentukan kepribadian. Selain itu kelompok merupakan tempat kekuatan-kekuatan sosial berhubungan, berkembang, mengalami disorganisasi, memainkan peranan, dan seterusnya.

1. Konsep Kelompok Sosial

Menurut Roucek dan Warren (Veeger, 1992) kelompok sosial adalah suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia, yang diantara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan.

Menurut Abdulsyani (1990) kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok sosial juga merupakan himpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu perikatan sosial dan kultural.

Beberapa ahli sosiologi, mempunyai pendapat berbeda, sebagaimana telah dirangkum Susanto (1979: 46-50) sebagai berikut:

Bierens den Haan (Susanto, 1979: 46) mengatakan bahwa suatu kelompok memperoleh bentuknya dari kesadaran akan keterikatan yang ada pada anggota-anggotanya. Kelompok tidak hanya karena jumlah anggota-anggotanya saja, melainkan adalah suatu kenyataan yang ditentukan oleh datang perginya anggota-anggotanya. Kenyataan kelompok dinyatakan oleh nilai yang dihayati bersama oleh fungsi kelompok sebagaimana disadari oleh anggotanya. Jadi diantara anggota dalam kelompok tersebut memiliki ikatan psikologis.

Anderson dan Parker (Susanto, 1979: 47) berpendapat bahwa kelompok adalah kesatuan dari dua atau lebih individu yang mengalami interaksi psikologis satu sama lain. Bahwa kebutuhan akan kelompok ini tidak ditentukan oleh situasi geografis saja, tetapi pada jaman dengan kemajuan teknologi tinggi dimungkinkan komunikasi satu sama lain dan inilah sebagai faktor pembentuk kelompok. Dikatakan selanjutnya bahwa kelompok akan berakhir sebagai kelompok, apabila di antara para anggotanya berakhir. Faktor pembentukan kelompok adalah faktor psikologis diantara para anggota-anggotanya. Dapat berbentuk norma mengikat, ketidakseragaman pendapat dengan persamaan pendapat

harus seimbang, apabila tidak seimbang kelangsungan kelompok akan terancam atau terganggu.

Park dan Burgess (Susanto, 1979: 48) menyebut bahwa kelompok sebagai "*social group*" antara para anggotanya perlu ada interaksi dengan faktor-faktor utama yaitu:

- *An interrelationship* (hubungan antara para anggotanya)
- *An interplay of personality* (teman bermain)
- *A moving unit of interacting personalities* (gerak sosial)

Laswell dan Kaplan (Susanto, 1979: 49) berpendapat bahwa *cooperation* (kerjasama) adalah fase dalam pembentukan kelompok, sedangkan kerjasama ini terjadi karena adanya tugas yang berbeda-beda. Agar supaya tidak kehilangan tujuan pokoknya maka perlu adanya koordinasi dari bermacam tugas yang berbeda itu. Di dalam ikatan kerjasama itu, disamping ikatan formil, maka ditemukan *doing together*, *thinking together* dan *feeling together*. Orang mau bekerja, berfikir, mempunyai perasaan yang sama karena atau demi kelompoknya. Selanjutnya dalam kelompok inilah ikatan dalam kerjasama tersebut mencapai fase ideal. Jadi pembentukan kelompok didasarkan pada:

- Adanya keyakinan bersama akan perlunya pengelompokan dan tujuan
- Adanya harapan yang dihayati oleh anggota-anggotanya
- Adanya ideologi yang mengikat semua

Bouman (1961) menjelaskan bahwa kelompok pada umumnya adalah kesatuan-kesatuan sosial yang dikuasai oleh perasaan persatuan. Perasaan persatuan ini mungkin sifatnya dalam tetapi mungkin juga dangkal. Suatu kelompok atau golongan dengan ikatan/perasaan persatuan yang dalam, misalnya masyarakat paguyuban, masyarakat dengan ikatan darah dll. Sedangkan masyarakat dengan ikatan persatuan yang dangkal, misalnya: kelompok yang hanya bertujuan praktis/organisatoris saja, atau ikatan yang secara kebetulan saja terjadi.

Dari definisi di atas dapat diurai bahwa kelompok sosial atau *social group* adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang

hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Kelompok sosial merupakan inti kehidupan dalam masyarakat dan merupakan suatu gejala yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya. Seorang manusia akan menjadi dirinya sendiri karena keanggotannya dalam suatu kelompok. Dari kelompok, manusia akan memperoleh orientasi ke dunia. Keanggotaan dan partisipasi dalam kelompok sosial akan memberikan suatu perasaan memiliki antar satu dengan yang lainnya. Seseorang akan menganggap bahwa diri mereka bagian dari suatu kebersamaan, dan mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Kelompok akan sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang karena kelompok akan menentukan diri seseorang dalam suatu kelompok tersebut.

Robert Mac Iver (Soekanto, 2002: 115) mengemukakan bahwa diperlukan suatu syarat-syarat untuk mendefinisikan kelompok sosial, yaitu:

1. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan;
2. ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan lainnya;
3. ada suatu faktor yang dimiliki bersama yang mempererat hubungan anggota kelompok, seperti faktor senasib, ideologi, kepentingan, tujuan, dan kepercayaan;
4. berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku;
5. bersistem dan berproses.

2. Proses Terbentuknya Kelompok Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, yang tiap individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Para individu berkumpul dan bersatu di antara perbedaan-perbedaan yang ada guna melangsungkan kehidupan melalui kelompok sosial. Bergabung dengan sebuah kelompok merupakan sesuatu yang murni dari diri sendiri atau juga secara kebetulan. Misalnya, seseorang terlahir dalam keluarga tertentu. Namun, ada juga yang merupakan sebuah pilihan.

Proses pembentukan kelompok diawali dengan adanya persepsi atau perasaan yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukanlah tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjai akan membentuk sebuah kelompok. Selanjutnya pembentukan kelompok dilakukan dengan menentukan kedudukan masing- masing anggota (siap menjadi ketua atau anggota). Interaksi yang terjadi suatu saat akan memunculkan konflik. Perpecahan yang terjadi biasanya bersifat sementara karena kesadaran arti pentingnya kelompok tersebut, sehingga anggota kelompok berusaha menyesuaikan diri demi kepentingan kelompok. Akhirnya setelah terjadi penyesuaian, perubahan dalam kelompok mudah terjadi.

Ada dua faktor yang mengarahkan seseorang bergabung dalam suatu kelompok sosial, yaitu kedekatan dan kesamaan. *Pertama*, pengaruh tingkat kedekatan, atau kedekatan geografis, terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok. Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Singkatnya, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, kedekatan menumbuhkan interaksi, yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan.

Kedua, pengaruh tingkat kesamaan. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan, orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelegensi, atau karakter-karakter personal lain. Kesamaan juga merupakan faktor utama dalam memilih calon pasangan untuk membentuk kelompok sosial yang disebut keluarga.

Perilaku kelompok, sebagaimana semua perilaku sosial, sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam kelompok itu. Sebagaimana dalam dunia sosial pada umumnya, kegiatan dalam kelompok tidak muncul secara acak. Setiap kelompok memiliki suatu pandangan tentang perilaku mana yang dianggap pantas untuk dijalankan para anggotanya, dan norma-norma ini mengarahkan interaksi kelompok.

Norma muncul melalui proses interaksi yang perlahan-lahan di antara anggota kelompok. Pada saat seseorang berperilaku tertentu pihak lain menilai kepantasan atau ketidakpantasan perilaku tersebut, atau menyarankan perilaku alternatif (langsung atau tidak langsung). Norma terbentuk dari proses akumulatif interaksi kelompok. Jadi, ketika seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok, perlahan-lahan akan terbentuk norma, yaitu norma kelompok.

Pada dasarnya, pembentukan kelompok dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam proses selanjutnya didasarkan adanya hal-hal berikut (Susanto, 1979):

1. Persepsi: Pembagian kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan intelegensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Misalnya terdapat satu atau lebih punya kemampuan intelektual, atau yang lain memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan anggota yang memiliki kelebihan tertentu bisa menginduksi anggota lainnya.

2. Motivasi: Pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Perbedaan kemampuan yang ada pada setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Dengan demikian dapat memicu anggota lain melalui transfer ilmu pengetahuan agar bisa memotivasi diri untuk maju.
3. Tujuan: Terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu.
4. Organisasi: Pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian masalah kelompok dapat diselesaikan secara lebih efisien dan efektif.
5. Independensi: Kebebasan merupakan hal penting dalam dinamika kelompok. Kebebasan disini merupakan kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Namun demikian kebebasan tetap berada dalam tata aturan yang disepakati kelompok.
6. Interaksi: Interaksi merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok, karena dengan interaksi akan ada proses transfer ilmu dapat berjalan secara horizontal yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut.

Apabila kelompok telah terbentuk, maka dengan sendirinya diusahakan mempertahankan dirinya/hidupnya. Kelangsungan hidup dari tiap-tiap kelompok sosial tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor psikologis dan faktor sosial (Susanto, 1979).

Faktor psikologis meliputi (1) Tiap-tiap anggota takut dicela oleh anggota lainnya; (2) Bahwa tiap-tiap anggota memerlukan perasaan aman dan membutuhkan perlindungan dari kelompoknya. Sedangkan faktor-faktor sosial adalah (1) Adanya norma kelompok (*group norm*); (2) Jumlah atau banyaknya koordinasi antara anggota kelompok menentukan berlangsungnya suatu kelompok. (3) Kelompok sebagai tempat perwujudan dari kebutuhan.

Pada umumnya orang takut dicela oleh masyarakat yaitu karena ia memerlukan masyarakatnya demi hidupnya. Pada umumnya orang akan

lebih mudah mengorbankan pendapatnya sendiri demi penerimaan oleh kelompok terutama bila ia tidak yakin penuh. Selanjutnya seseorang tidak begitu tergantung dari kehidupan kelompok dalam bentuk yang oleh Durkheim disebut ikatan solidaritas yang organisatoris fungsional, apabila seseorang mengidentifikasi diri dengan kelompok berdasarkan tujuan kelompok serta perwujudan daripadanya. Apabila ikatan kelompok didasarkan pada pemikiran rasional dengan hanya tugas sebagai alat pengikatnya maka kelompok demikian mudah menghasilkan pemisahan diri anggota dari kelompok, secara sadar maupun tidak sadar.

3. Macam - Macam Kelompok Sosial

Masyarakat terdiri atas macam-macam kesatuan sosial, karena itu dapat dibedakan (diklasifikasikan) ke dalam beberapa jenis atas dasar berbagai ukuran. Berbagai pengklasifikasian tentang kelompok sosial telah banyak dilakukan para tokoh sosiologi. Ukuran yang dipakai bermacam-macam, misalnya :

- a. Masyarakat diukur dari besar kecilnya jumlah anggota dari tiap-tiap kelompok kesatuan sosial
- b. Ditinjau dari sudut derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut.
- c. Ditinjau dari sudut kepentingan wilayah
- d. Ditinjau dari sudut berlangsungnya suatu kepentingan
- e. Ditinjau dari sudut derajat organisasinya, dan seterusnya

Dilihat dari besaran jumlah anggotanya, George Simmel (Soekanto, 2002: 118) menganalisa kelompok-kelompok sosial mulai dari satu orang sebagai fokus hubungan sosial, yang dinamakan *monad*, kemudian dua orang (*dyad*), tiga orang (*triad*), dan seterusnya.

Dilihat dari berlangsungnya suatu kepentingan, Max Weber (Soekanto, 2002: 136-139; Sunarto, 2000: 140) menyoroti tentang adanya konsep **kelompok formal** (*formal group*) dan **kelompok informal** (*informal group*). Kelompok formal dirumuskan sebagai kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Menurut Weber, dengan semakin meningkatnya masyarakat yang terdiferensiasi, maka organisasi formal menjadi suatu bentuk kelompok

yang semakin penting. Dalam masyarakat modern, organisasi formal biasa disebut dengan birokrasi. Berbeda dengan informal group atau kelompok informal, pada kelompok ini tidak terdapat struktur dan organisasi secara pasti. Kelompok informal biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali atas dasar kepentingan dan pengalaman yang sama.

Dilihat dari derajat interaksi sosial, Charles Horton Cooley (Soekanto, 2002: 125-132; Sunarto, 2000: 134), membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu **kelompok primer** (*primary group*) dengan **kelompok sekunder** (*secondary group*). Menurutnya, kelompok primer adalah kelompok yang ditandai oleh pergaulan dan kerjasama yang bersifat intim dan pribadi, misalnya keluarga, kelompok sepermainan (*peer group*), rukun tetangga, dan sebagainya. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri dari banyak orang, hubungannya tidak berdasarkan kedekatan pribadi dan tidak langgeng, misalnya, kelompok buruh pada masyarakat industri, satuan pendidikan dengan *stakeholdersnya*, klub sepakbola pada masyarakat industri, masyarakat luas, klub sepeda sehat yang beranggota antar etnis, bangsa, dan sebagainya.

Dilihat dari sudut persaingan antarkelompok, William Graham Sumner (Soekanto, 2002: 123-125; Sunarto, 2000: 134) mengklasifikasikan perbedaan antara **kelompok dalam** (*in-group*) atau kelompok kami (*we-group*) dan **kelompok luar** (*out-group*) atau kelompok orang lain (*others group*). Kelompok dalam merupakan kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya. Dalam kelompok ini terdapat hubungan persahabatan, kerjasama, dan kedamaian antara anggotanya. Sedangkan kelompok luar adalah kelompok di luar *in-group*-nya, yang ditandai oleh adanya rasa perbedaan, persaingan bahkan permusuhan. Sebagai contoh, kelompok “kami siswa sekolah X” dan “mereka siswa sekolah Z”, “kami guru” dan “mereka dosen”, “kami orang desa” dan “mereka orang kota”, dan seterusnya.

Dilihat dari derajat organisasi, Robert K. Merton (Soekanto, 2002: 139-142; Sunarto, 2000: 135) membedakan antara **membership group** (kelompok anggota) dan **reference group** (kelompok acuan). Membership

group merupakan kelompok di mana seseorang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut, meskipun karena situasi tertentu seseorang tersebut tidak selalu berkumpul dengan anggota lain dalam kelompok tersebut, misalnya kelompok pelajar SMA, kelompok mahasiswa, kelompok anggota dewan, kelompok polisi, dan sebagainya. Sedangkan *reference group* adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Misalnya, seseorang yang bergaya seperti polisi, walaupun ia bukan anggota polisi.

Dilihat dari kepentingan wilayah Ferdinand Tonnies (Soekanto, 2002: 132-136; Sunarto, 2000: 133) juga mengulas secara rinci pembagian kelompok sosial. Menurutnya kelompok sosial dibagi menjadi dua bagian, ***gemeinschaft*** dan ***gesselschaft***.

Gemeinschaft atau masyarakat paguyuban digambarkan sebagai bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Ciri-ciri paguyuban, yaitu: 1) Intim yaitu hubungan menyeluruh yang mesra; 2) Privat, yaitu hubungan yang bersifat pribadi atau khusus untuk beberapa orang saja; dan 3) Eksklusif, yaitu hubungan tersebut hanyalah untuk anggota dan tidak untuk orang-orang lain di luar anggota.

Ada tiga tipe paguyuban, 1) **paguyuban karena ikatan darah** (*gemeinschaft by blood*) atau genealogis, yaitu kelompok yang terbentuk berdasarkan hubungan sedarah. Kelompok genealogis memiliki tingkat solidaritas yang tinggi karena adanya keyakinan tentang kesamaan nenek moyang. Contoh: keluarga, kelompok kekerabatan. 2) **paguyuban karena tempat** (*gemeinschaft of place*), yaitu kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan lokalitas (komunitas). Contoh: Beberapa keluarga yang berdekatan membentuk RT (Rukun Tetangga), dan selanjutnya sejumlah Rukun Tetangga membentuk RW (Rukun Warga); dan 3) **paguyuban karena ideologi** atau hubungan kepatuhan (*gemeinschaft of mind*). Contoh: organisasi massa berdasarkan agama

Sedangkan *gesselschaft* atau masyarakat patembayan, dilukiskan sebagai kelompok sosial yang memiliki ikatan lahir yang bersifat pokok untuk

jangka waktu yang pendek sementara. Ciri-ciri patembayan: 1) Impersonal, yaitu hubungan keanggotaan sebatas kepentingan. 2) Kontraktual, yaitu ikatan antaranggota berdasarkan perjanjian semata; 3) Realistis dan ketas, yaitu hubungan antaranggotanya tidak akrab dan mengutamakan untung rugi. Contoh: ikatan antara pedagang, organisasi dalam sebuah pabrik, atau masyarakat di lingkungan perkotaan.

Dilihat dari kuat lemahnya ikatan kelompok, Emile Durkheim (Sunarto, 2000: 132) melihat bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelompok sosial berdasarkan ikatan solidaritas, yaitu **solidaritas mekanik** dan **solidaritas organik**. Dalam masyarakat yang menganut solidaritas mekanik, yang diutamakan adalah faktor persamaan perilaku dan sikap. Seluruh warga masyarakat terikat dalam kesadaran kolektif (*collective conscience*), suatu kesadaran bersama yang mencakup kepercayaan dan perasaan dan bersifat memaksa. Solidaritas mekanik ini biasanya terdapat dalam masyarakat pedesaan. Sedangkan masyarakat yang menganut solidaritas organik, cenderung saling ketergantungan karena adanya pembagian kerja. Ikatan yang tumbuh dalam masyarakat ini terjalin melalui kesepakatan di antara kelompok profesi. Masyarakat dengan solidaritas organik ini diidentikan dengan masyarakat yang terdapat di lingkungan perkotaan.

Berdasarkan pada ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis, Robert Bierstedt (Sunarto, 2000: 130) menggunakan tiga kriteria untuk membedakan jenis kelompok, yaitu: (a) adanya orientasi yang telah ditentukan bersama atau organisasi; (b) kesadaran jenis yang sama; dan (c) adanya hubungan sosial. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut dibedakan empat jenis kelompok:

- a. **Kelompok statistik** (*statistical group*), adalah pengelompokan atas dasar ciri tertentu. Kelompok ini merupakan hasil ciptaan para ilmuwan sosial hanya untuk kepentingan analitis, misalnya kelompok umur, kelompok pekerjaan, kelompok jenis kelamin;
- b. **Kelompok kemasyarakatan** (*societal group*), merupakan kelompok yang hanya memenuhi satu persyaratan, yaitu adanya kesadaran dan

persamaan di antara anggotanya, misalnya kelompok pemuda, kelompok wanita, kelompok petani, kelompok pengusaha

- c. **Kelompok sosial** (*social group*), merupakan kelompok yang mempunyai kesadaran jenis di antara anggotanya dan berhubungan satu dengan yang lain tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi, misalnya kelompok teman, kerabat, keluarga batih;
- d. **Kelompok asosiasi** (*associational group*), merupakan kelompok yang para anggotanya memiliki kesadaran jenis, persamaan kepentingan pribadi (*like interest*) dan kepentingan bersama (*common interest*), serta terdapat hubungan sosial yang umumnya bersifat formal, misalnya sekolah, OSIS, gerakan pramuka, fakultas, parpol, KORPRI, dan sebagainya.

Selain klasifikasi di atas tentunya masih banyak kelompok lain yang tidak tercakup. Masih berdasarkan kriteria Bierstedt, Soerjono Soekanto (2002: 122) menambahkan adanya kelompok sosial yang tidak teratur, yakni suatu kelompok di mana orang-orang berkumpul di suatu tempat pada waktu yang sama, karena pusat perhatian yang sama, dan bersifat temporer, misalnya kerumunan, massa, publik, dan kelompok kecil (*small group*).

Kerumunan (*crowd*) merupakan individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Kerumunan jelas tidak terorganisasi, tidak mempunyai sistem pembagian kerja maupun sistem pelapisan sosial. Artinya, pertama-tama adalah bahwa interaksi di dalamnya bersifat spontan dan tidak terduga, dan kedua adalah bahwa orang-orang yang hadir dan berkumpul mempunyai kedudukan sosial yang sama. Identitas sosial seseorang biasanya tenggelam apabila orang yang bersangkutan ikut serta dalam suatu kerumunan. Bentuk umum kerumunan sebagai berikut :

- a. Kerumunan berartikulasi dengan struktur sosial :
 - Khalayak penonton atau pendengar yang formal (*formal audiences*) merupakan kerumunan-kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan akan tetapi sifatnya pasif, misalnya penonton bioskop, penonton wayang kulit/orang.

- Kelompok ekspresif yang telah direncanakan (*planned expressive group*), adalah kerumunan yang pusat perhatiannya tak begitu penting akan tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktifitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang dihasilkannya, misalnya, demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM, aksi joget para penonton konser musik dangdut, aksi para suporter sepakbola yang mendukung tim kesayangannya.
- b. Kerumunan yang bersifat sementara (*casual crowds*) :
- Kumpulan yang kurang menyenangkan, misalnya orang-orang yang mengantri karcis, melakukan penjarahan, orang-orang menunggu bus dan sebagainya.
 - Kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik (*panic crowds*), misalnya orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya, misalnya lari karena ada gempa.
 - Kerumunan penonton (*spectator crowds*), misalnya kerumunan yang terjadi karena orang-orang ingin melihat suatu kejadian tertentu, misalnya menonton korban kecelakaan
- c. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*):
- Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*). Kerumunan-kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mempergunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh: aksi pengeroyokan pada pelaku curanmor, perusakan fasilitas umum oleh para demonstran.
 - Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), hampir sama dengan kelompok-kelompok ekspresif, akan tetapi bedanya adalah bahwa yang utama bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Misalnya, kelompok orang bermain judi, kelompok orang sedang berpesta miras/narkoba.

Berbeda dengan kerumunan, massa merupakan kelompok yang cenderung tidak teratur, yang mempunyai ciri-ciri mirip dengan kerumunan, tetapi terbentuknya disengaja atau direncanakan dengan persiapan (tidak spontan), misalnya aksi protes/demonstrasi, orang-orang yang mengikuti kegiatan tertentu, seperti sepeda gembira.

Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan suatu kesatuan. Interaksi antar individu terjadi secara tidak langsung melalui alat komunikasi, misalnya opini atau desas-desus melalui media seperti surat kabar, radio, televisi, film, maupun jejaring sosial.

Kelompok kecil (*small group*) merupakan suatu kelompok secara teoritis terdiri paling sedikit dua orang yang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan - tujuan tertentu dan menganggap hubungan itu penting bagi individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, kelompok kecil merupakan wadah bagi orang yang mempunyai kepentingan – kepentingan yang sama. Kelompok ini selalu timbul dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas.

4. Kelompok Sosial dalam Masyarakat di Indonesia

Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Istilah atau batasan kelompok sosial dalam buku ini (Bab III) lebih banyak akan merujuk kelompok sosial primordial, yaitu kelompok sosial berdasarkan suku bangsa, agama, ras, dan antargolongan.

a. Kelompok Sosial Berdasarkan Suku Bangsa

Menurut Koentjaraningrat (1996) suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas tadi seringkali (tetapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa.

Namun pengertian mengenai suku bangsa di Indonesia seperti tersebut di atas dalam kenyataannya sangat kompleks, ada yang menyempit dan ada yang meluas. Misalnya penduduk Papua terdiri atas orang Sentani, orang Marindanim, orang Serui, orang Kapauku dan sebagainya yang masing-

masing memiliki kebudayaan dan bahasa khas yang mereka gunakan dalam kelompoknya masing-masing.

Namun apabila mereka hidup di luar Papua akan mengaku sebagai orang Papua. Demikian halnya yang dialami oleh orang Jawa yang tinggal di luar Jawa, semuanya mengaku sebagai orang Jawa, tetapi ketika tinggal di Jawa tidak mau disamakan, karena memang berbeda suku.

Van Vollenhoven (Koentjaraningrat, 1996: 193-194) mengklasifikasikan berbagai suku bangsa Indonesia didasarkan pada sistem lingkaran hukum adat yang dibuat oleh yang terbagi dalam 19 daerah sebagai berikut: Aceh, Gayo-Alas dan Batak (termasuk Nias dan Batu), Minangkabau (termasuk Mentawai), Sumatera Selatan (termasuk Enggano), Melayu, Bangka dan Biliton, Kalimantan, Minahasa (termasuk Sangir-Talaud), Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon Maluku (termasuk Kepulauan Barat Daya), Papua, Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Surakarta dan Yogyakarta, serta Jawa Barat.

Studi yang dilakukan Skinner pada tahun 1959 dan Yasunaka taun 1970 (Nasikun, 2004: 44-45) menyebutkan bahwa ada lebih dari 35 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Beberapa suku bangsa yang tergolong paling besar, di antaranya: Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Bugis, Bali, Batak, Sumbawa, Betawi, Melayu, Banjar, Aceh, Palembang, Sasak, dayak, Toraja, dan Makassar. Data tersebut belum mencakup Maluku, NTT, dan Papua.

Pengklasifikasian suku bangsa juga dilakukan oleh Hidayat (1996), yang mereferensikan kurang lebih 400 suku bangsa di Indonesia yang salah satunya didasarkan pada perbedaan bahasa yang dipergunakan

b. Kelompok Sosial Berdasarkan Bahasa Agama

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: "KeTuhanan Yang Maha Esa". Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya. Menurut Wikipedia, pada tahun 2010, kira-kira 85,1% dari 240.271.522 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 9,2% Protestan, 3,5% Katolik, 1,8% Hindu, dan 0,4% Buddha.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa "tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya" dan "menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya". Pemerintah, bagaimanapun, secara resmi hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Di samping keenam agama resmi tersebut masih banyak juga ditemukan berbagai agama dan aliran kepercayaan, seperti Taoisme, Yahudi, Baha'i, Islam Ahmadiyah, Islam Aboge, dan masih banyak lagi.

Dengan banyaknya agama maupun aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, konflik antar agama sering kali tidak terelakkan. Lebih dari itu, kepemimpinan politis Indonesia memainkan peranan penting dalam hubungan antarkelompok maupun golongan

c. Kelompok Sosial Berdasarkan Ras

Koentjaraningrat (1996) menyatakan bahwa ras adalah suatu golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh yang tertentu dengan frekuensi yang besar. Persebaran ras di Indonesia sudah ada sejak zaman es. Pada zaman es wilayah Indonesia bagian barat masih bersatu dengan benua Asia sedangkan daerah bagian timur bersatu dengan benua Australia. Pada masa itu telah tersebar 2 ras di Indonesia, yaitu :

1) Ras *Mongoloid*

Ras ini berasal dari daerah Asia Tengah (Mongoloid). Pada zaman es ini ras mongoloid tersebar di daerah Indonesia bagian Barat meliputi pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Dengan arus persebaran sebagai berikut. Dari Mongolia menuju ke daerah-daerah di Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Singapura, baru menuju ke Indonesia bagian barat.

Semua ditempuh melalui jalur darat sebab saat itu bagian barat Indonesia masih bersatu dengan benua Asia Tenggara. Pada perkembangan selanjutnya terbentuklah pulau-pulau di Indonesia bagian barat seperti Sumatra, Kalimantan dan Jawa, daratan yang menjadi lautan disebut paparan sunda.

2) **Ras Austroloid**

Ras ini berpusat di Australia dan menyebar ke Indonesia bagian Timur khususnya wilayah Papua/Irian Jaya. Persebaran ke daerah inipun dilakukan melalui darat sebab saat itu Papua masih bersatu dengan benua Australia perkembangannya daratan yang menjadi lautan disebut paparan sahal.

Sementara itu daerah di zona Wallacea seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku merupakan daerah penyaringan bagi migrasi manusia dan fauna dari paparan sunda ke paparan sahal maupun sebaliknya sehingga sangat terbatas sekali ras yang dapat masuk ke wilayah ini. Jadi awalnya ras nenek moyang bangsa Indonesia adalah ras Mongoloid dan ras Austroloid.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 2000 SM mulai terjadi migrasi/perpindahan ras dari berbagai daerah ke Indonesia, yaitu :

a) **Migrasi pertama, Ras Negroid**

Ciri dari ras berkulit hitam, bertubuh tinggi, dan berambut keriting. Ras ini datang ini dari Afrika. Di Indonesia ras ini sebagian besar mendiami daerah Papua. Keturunan ras ini terdapat di Riau (pedalaman) yaitu suku *Siak (Sakai)*, sertasuku *Papua melanesoid* mendiami Pulau Papua dan Pulau Melanesia.

b) **Migrasi kedua, Ras Weddoid.**

Ciri ras ini adalah berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Ras ini datang dari India bagian selatan. Keturunan ras ini mendiami kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur (Kupang).

c) **Migrasi Ketiga, Ras Melayu Tua (Proto Melayu)**

Ciri ras ini adalah berkulit sawo matang, bertubuh tidak terlalu tinggi, dan berambut lurus. Ras ini termasuk dalam Ras *Mongoloid* (sub ras Malayan Mongoloid) berasal dari daerah Yunan (Asia Tengah) masuk ke Indonesia melalui Hindia Belakang (Vietnam)/ Indo Cina baru selanjutnya ke Indonesia.

Di Indonesia Ras ini menyebar melalui 2 Jalur sesuai dengan jenis kebudayaan Neolithikum yang dibawanya, yaitu. *Jalur pertama*, melalui jalur barat dan membawa kebudayaan berupa kapak persegi. Dengan menempuh jalur darat dari Yunan mereka menuju ke Semenanjung Melayu melalui Thailand selanjutnya menuju ke Sumatra, Jawa, Bali, ada pula yang menuju Kalimantan dan berakhir di Nusa Tenggara. Sehingga di daerah tersebut banyak ditemukan peninggalan berupa kapak persegi/beliung persegi. Keturunan Proto Melayu yang melalui jalur ini adalah Suku Batak, Nias (Sumatra Utara), Mentawai (Sumatra Barat), Suku Dayak (Kalimantan), dan Suku Sasak (Lombok).

Jalur kedua, melalui jalur timur dan membawa kebudayaan berupa kapak lonjong. Dengan menempuh jalur laut dari Yunan (Teluk Tonkin) menyusuri Pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, kemudian ke daerah Sulawesi, Maluku, ke Irian selanjutnya sampai ke Australia. Peninggalan kapak lonjong banyak ditemukan di Papua. Keturunan Proto Melayu yang melalui jalur ini adalah Suku Toraja (Sulawesi Selatan), Suku Papua (Irian), Suku Ambon, Ternate, Tidore (Maluku).

d) Migrasi Keempat, Ras Melayu Muda (Deutro Melayu)

Sekitar 500 SM datang migrasi dari ras Deutro Melayu dari daerah Teluk Tonkin, Vietnam selanjutnya mendesak keturunan ras Proto Melayu yang telah menetap lebih dahulu dan masuk Indonesia menyebar keberbagai daerah baik di pesisir pantai maupun pedalaman.

Mereka masuk membawa kebudayaan yang relatif lebih maju yaitu kebudayaan logam terutama benda-benda dari perunggu, seperti nekara, moko, kapak corong, dan perhiasan. Hasil kebudayaan ras ini sangat terpengaruh dengan kebudayaan asalnya dari Vietnam yaitu Budaya Dongson. Tampak dengan adanya kemiripan antara artefak perunggu di Indonesia dengan di Dongson.

Keturunan dari Deutro Melayu yaitu Suku Minang (Sumatra Barat), Suku Jawa, dan Suku Bugis (Sulawesi Selatan). Ras ini pada

perkembangannya mampu melahirkan kebudayaan baru yang selanjutnya menjadi kebudayaan bangsa Indonesia sekarang.

Migrasi dari berbagai macam ras tersebut perkembangannya saling berbaur/bercampur hingga menghasilkan berbagai macam suku dengan beraneka ragam cirinya. Keanekaragaman tersebut disebabkan karena perbedaan keadaan alam (letak geografis, iklim), makanan (nutrisi), dan terjadi perkawinan campur.

d. Kelompok Sosial Berdasarkan Antargolongan

Antargolongan dalam kajian ini dikhususkan terhadap organisasi massa (ormas). Organisasi massa adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: etnik, agama, ekonomi, pendidikan, sosial.

Tahun 2012 ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia berjumlah 65.577 (detiknews, 17 Februari 2012). Karena terlalu banyak, Kemendagri mengaku betapa sulitnya untuk mengatur ormas-ormas tersebut. Secara rinci ormas yang tercatat di tingkat pusat (skala nasional) ada 9.058, di tingkat provinsi 14.413 ormas dan di tingkat kabupaten dan kota mencapai 42.106 ormas. Jumlah ini belum termasuk ormas yang tidak tercatat.

Di sisi lain, banyak muncul di masyarakat adalah kelompok-kelompok ormas anarkis atau kelompok kekerasan berbasis identitas. Jenis kelompok sosial anarkis mulai marak di Indonesia pasca keruntuhan Orde baru. Studi yang dilakukan oleh Masaaki dan Rozaki (2006), menyebutkan bahwa kelompok ormas anarkis hadir dengan memanfaatkan ketidakstabilan negara dalam mengatur politik keamanan masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut tidak saja mengisi ruang publik dengan aksi di jalan sambil melancarkan berbagai macam tuntutan. Lebih dari itu, dengan memanfaatkan “celah demokratisasi”, tidak sedikit di antara para pemimpin ormas tersebut masuk di jajaran elit pemerintahan. Kehadiran kelompok ormas anarkis tidak jarang

menebar teror dan ancaman, namun sering pula dibutuhkan dan diperebutkan di kalangan pihak tertentu yang berkepentingan.

Di masa kini, kelompok ormas anarkis ini, perannya seolah telah dapat “mengunci” peran negara dalam pengaturan politik keamanan di tengah masyarakat. Kondisi ini dirasa wajar karena kelompok ormas ini memiliki akar tradisi yang kuat, bahkan sejak Indonesia modern belum lahir. Dinamikanya mengalami pasang surut tergantung konstelasi politik yang berkembang. Para aktor utama kelompok anarkis ini akan selalu berganti seiring dengan zaman yang terus bergerak.

D. Aktifitas Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta diklat menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
 - Memahami dan mencermati materi diklat
 - Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar,
 - Menyimpulkan
 - Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi :
 - Mendiskusikan materi pelatihan
 - Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
 - Melaksanakan refleksi

E. Latihan/Kasus/Tugas

Menurut Anda, apa dampak kemunculan banyaknya ormas di negara kita?

F. Rangkuman

Kelompok sosial atau *social group* adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Kelompok sosial merupakan inti kehidupan dalam masyarakat dan merupakan suatu gejala yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya.

Robert Mac Iver (Soekanto, 2002: 115) mengemukakan bahwa diperlukan suatu syarat-syarat untuk mendefinisikan kelompok sosial, yaitu:

1. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan;
2. ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan lainnya;
3. ada suatu faktor yang dimiliki bersama yang mempererat hubungan anggota kelompok, seperti faktor senasib, ideologi, kepentingan, tujuan, dan kepercayaan;
4. berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku;
5. bersistem dan berproses.

Proses pembentukan kelompok diawali dengan adanya persepsi atau perasaan yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukanlah tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjai akan membentuk sebuah kelompok. Selanjutnya pembentukan kelompok dilakukan dengan menentukan kedudukan masing- masing anggota

Ada dua faktor yang mengarahkan seseorang bergabung dalam suatu kelompok sosial, yaitu kedekatan dan kesamaan. *Pertama*, pengaruh tingkat kedekatan, atau kedekatan geografis, terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok. *Kedua*, pengaruh tingkat kesamaan. Perilaku kelompok, sebagaimana semua perilaku sosial, sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam kelompok itu. Sebagaimana dalam dunia sosial pada umumnya, kegiatan dalam kelompok tidak muncul secara acak. Setiap kelompok memiliki Pada dasarnya, pembentukan kelompok dan organisasi sosial dapat diawali

dengan adanya persepsi, perasaan atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya.

Masyarakat terdiri atas macam-macam kesatuan sosial, karena itu dapat dibedakan (diklasifikasikan) ke dalam beberapa jenis atas dasar berbagai ukuran. Berbagai pengklasifikasian tentang kelompok sosial telah banyak dilakukan para tokoh sosiologi. Ukuran yang dipakai bermacam-macam, misalnya berdasarkan :

1. kualitas hubungan antar anggota, kelompok sosial dibedakan menjadi Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder
2. pencapaian tujuan kelompok sosial dibedakan menjadi Kelompok Formal dan Kelompok Informal
3. sudut pandang individu, kelompok sosial dibedakan menjadi *In Group* dan *Out Group*
4. erat longgarnya ikatan antar anggota, kelompok sosial dibedakan menjadi Paguyuban dan Patembayan
5. partisipasi dan acuan anggota dibedakan menjadi Membership Group dan Reference Group
6. jenis pekerjaan anggota dibedakan menjadi Kelompok Okupasional dan Volunter
7. cara terbentuknya terdiri dari Kelompok Semu dan Kelompok Nyata

Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Istilah atau batasan kelompok sosial dalam buku ini (Bab III) lebih banyak akan merujuk kelompok sosial primordial, yaitu kelompok sosial berdasarkan suku bangsa, agama, ras, dan antargolongan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Setelah membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini apakah Anda memperoleh pengetahuan baru, yang sebelumnya belum pernah Anda pahami, apakah materi yang diuraikan mempunyai manfaat dalam

mengembangkan materi Bentuk dan Perkembangan Kelompok Sosial ini?
ini?.

- 2.** Setelah Anda membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini rencana tindak lanjut apa yang akan Anda lakukan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

MASYARAKAT MULTIKULTURAL

A. TUJUAN

Setelah menyelesaikan Kegiatan Pembelajaran 8 ini, peserta diklat mampu menganalisis materi masyarakat multikultural dengan baik

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menganalisis konsep masyarakat multikultural
2. Menganalisis karakteristik dan penyebab masyarakat multikultural
3. Menganalisis konsekuensi masyarakat multikultural
4. Menerapkan kajian multikultural ke dalam pembelajaran sosiologi

C. URAIAN MATERI

1. Pendahuluan

Meluasnya disintegrasi sosial merupakan salah satu fenomena krusial yang telah membuat negeri ini terbengkalai. Konflik horisontal antarsuku, agama, ras, dan berbagai golongan misalnya, sampai saat ini masih marak terjadi. Tragedi kekerasan antarkelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an, kemudian konflik kekerasan yang bernuansa politis, etnis dan agama seperti yang terjadi di berbagai wilayah Aceh, Maluku, Kalimantan Barat dan Tengah, Poso, serta daerah lain merupakan salah satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam lingkaran sosial bangsa Indonesia masih kokoh semangat narsistik-egosentrisnya.

Fakta paling mutakhir berkenaan dengan masalah tersebut adalah bergolaknya kembali konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal itu juga menjadi bukti betapa rapuhnya konstruksi kebangsaan berbasis multikultural di negeri ini. Sehingga tidak heran kalau belakangan ini rasa kebersamaan sudah tidak tampak lagi dan nilai-nilai kebudayaan yang dibangun menjadi terberangus.

Karena itu, sangat relevan jika dalam standar kompetensi rumpun studi Ilmu Pengetahuan Sosial pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/MAK) membahas tentang masyarakat multikultural. Dalam bahasan ini juga dikupas tentang ideologi atau paham sebagai perekat sendi-sendi masyarakat multikultural yaitu multikulturalisme.

Multikulturalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Hal ini sangat penting untuk dipahami bersama dalam kehidupan masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia ini. Sebab bagaimanapun secara riil, bangsa Indonesia memiliki keragaman bahasa, sosial, agama, budaya dan sebagainya. Keragaman tersebut amat kondusif bagi munculnya konflik dalam berbagai dimensi kehidupan.

2. Konsep Masyarakat Multikultural

Multikultural pada mulanya adalah terminologi dalam disiplin antropologi. Tetapi, sebagaimana lazimnya, istilah dan konsep dalam sebuah cabang ilmu kemudian digunakan juga dalam cabang ilmu lain dengan makna dan tujuan yang sudah bergeser. Ada beberapa istilah lain yang secara konseptual tampak mirip dengan terminologi multikultural tetapi sebenarnya beda. Misalnya, pluralisme, diversitas, heterogenitas atau yang sering disebut saja dengan istilah “masyarakat majemuk”.

Istilah masyarakat majemuk ini diperkenalkan oleh Furnivall (Nasikun, 2004: 35). Menurut Furnivall, masyarakat majemuk (*plural societies*) adalah suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik.

Sedangkan masyarakat multikultural, menurut Liliweri (2005: 57-62) didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik, dan keragaman itu menjadi sumber keragaman kebudayaan atau subkultur dari masing-masing etnik.

Konsep multikultural menjelaskan tentang kehadiran dan daya tahan sekelompok orang dari beragam ras dan etnik minoritas yang mendefinisikan diri mereka secara berbeda dengan orang lain yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Secara ideologis, konsep multikultural terdiri atas

seperangkat gagasan yang relatif mempunyai koherensi dengan gagasan yang membentuk sebuah mosaik kebudayaan (Kymlicka, 2002: 13-49). Perbedaan latar belakang kebudayaan mendeskripsikan bahwa bangsa Indonesia tidak bisa terhindar dari keberagaman, karena dalam keberagaman itu tidak bisa terlepas dari munculnya identitas ganda (*multiple identities*). Identitas ganda itu terbentuk melalui keunikan dan kompleksitas akibat interseksi dari ras, etnik, kelas sosial, gender, bahasa, agama, orientasi seksual, hingga kemampuan personal.

Wujud multikultural di Indonesia di antaranya adalah tersebarnya berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Van Vollenhoven (Koentjaraningrat, 1996: 193-194) mengklasifikasikan berbagai suku bangsa Indonesia didasarkan pada sistem lingkaran hukum adat yang dibuat oleh yang terbagi dalam 19 daerah sebagai berikut:

1. Aceh
2. Gayo-Alas dan Batak; 2a. Nias dan Batu
3. Minangkabau; 3a. Mentawai
4. Sumatera Selatan; 4a. Enggano
5. Melayu
6. Bangka dan Biliton
7. Kalimantan
8. Minahasa; 8a. Sangir-Talaud
9. Gorontalo
10. Toraja
11. Sulawesi Selatan
12. Ternate
13. Ambon Maluku; 13a. Kepulauan Barat Daya
14. Irian
15. Timor
16. Bali dan Lombok
17. Jawa Tengah dan Jawa Timur
18. Surakarta dan Yogyakarta
19. Jawa Barat

Pengklasifikasian juga dilakukan oleh Hidayat (1996), yang merferensikan kurang lebih 400 suku bangsa di Indonesia yang salah satunya didasarkan pada perbedaan bahasa yang dipergunakan

Dari definisi dan contoh klasifikasi di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya masyarakat majemuk adalah masyarakat multikultural yang berarti mempunyai banyak budaya, banyak suku bangsa, banyak bahasa dan aneka ragam adat istiadat dalam suatu tatanan kesatuan sosial dan politik.

3. Teori-Teori Multikultural

Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menerangkan situasi masyarakat yang multikultural. Liliweri (2005: 71-80) mengidentifikasi tujuh tokoh sebagai perintis teori-teori multikultural. Berikut ini akan disampaikan secara ringkas gagasan-gagasan dari teori tersebut.

a. Sokrates

Gagasannya yang dekat dengan makna multikultural adalah tentang *self-knowledge*. Menurutnya, *self-knowledge* merupakan mahkota dari pendidikan setiap individu. Pengembangan *self-knowledge* hanya dapat dilakukan ketika seseorang tengah beranjak dewasa. Pada tahap ini individu dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan keyakinan dan bukan karena faktor emosi atau *feeling* semata.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemahaman tentang prinsip-prinsip multikultural itu hanya dapat dicapai melalui *self-knowledge* orang dewasa. Kalau *self-knowledge* individu itu baik, maka dia juga akan menghargai orang lain yang berbeda dengannya. Jadi ada hubungan yang erat antara *self-knowledge* dengan *other-knowledge*. Dengan kata lain, jika Anda mau mengerti kebudayaan orang, maka Anda harus mengerti kebudayaan Anda sendiri.

b. Plato

Plato adalah murid Sokrates. Karyanya yang terkenal yaitu: *Apologia*, yang merupakan pembelaan atas gurunya; *Kriton*, mengenai ketaatan terhadap tata hukum; *Politea*, tentang politik; *Lacheas*, tentang keberanian; *Symposium*, tentang cinta; dan *Republic*, mengungkap keadilan dengan gambaran negara yang ideal.

Tentang multikultural. Plato tidak menyebut secara eksplisit, tetapi prinsip-prinsip multikultural telah diperkenalkan dalam sebuah rancangan kurikulum pendidikan *liberal arts*, yang kualitasnya sepadan dengan dengan kurikulum ilmu atau pendekatan ekonomi maupun politik. Yang dimaksud dengan *liberal arts* adalah semua bagi semua. Jadi semua orang memiliki kebebasan untuk mengetahui semua hal.

c. Jean Piaget

Piaget dalam berbagai ulasan konseptual maupun teoritisnya selalu tertarik pada bagaimana pengetahuan manusia itu tumbuh dan berkembang. Dia berkeyakinan bahwa setiap orang mengalami perkembangan. Seseorang disebut berkembang karena dia dapat membedakan sesuatu yang ada dalam kebudayaannya dan kebudayaan lain, dan kemampuan membedakan itu adalah bagian dari perkembangan.

Piaget juga yakin bahwa setiap perkembangan individu tidak hanya dalam hal pengetahuan dan kemampuan, tetapi juga kemampuan untuk bersikap empati. Empati adalah persepsi individu tentang kemiripan antara *self* dan *other*. Empati harus dipahami sebagai proses untuk membuat perasaan seorang individu menjadi semakin intim dengan perasaan orang lain, yang pada saatnya menumbuhkan sebuah pengertian. Inilah arti penting dari empati, yaitu mencegah prasangka atau sikap yang tidak bersahabat.

d. Horace Kallen

Kallen merupakan orang pertama yang mengkonstruksi teori pluralisme budaya. Menurutnya, jika berbagai kebudayaan yang beragam atau perbedaan yang bervariasi itu dibiarkan hidup dan berkembang dalam suatu bangsa, maka upaya ke arah persatuan nasional telah dilakukan.

Dalam teorinya, Kallen mengungkapkan bahwa setiap etnik dan kelompok budaya dalam suatu bangsa menjadi penting dan unik karena semua memberi kontribusi terhadap pengayaan kebudayaan.

e. James A. Banks

Banks dikenal sebagai perintis pendidikan multikultural. Menurutnya, bagian terpenting dari pendidikan adalah mengajarkan “bagaimana cara berpikir” dan bukan mengajarkan “apa yang dipikirkan”. Dengan demikian

seorang siswa harus menjadi pemikir kritis dengan latar belakang pengetahuan dan keterampilan ditambah dengan komitmen. Dengan dasar ini seseorang dapat menolong bangsanya keluar dari perbedaan penglihatan antara idealisme dan realitas.

Dalam tulisannya berjudul *The Canon Debat: Knowledge Construction and Multicultural Education*, Banks mengidentifikasi tiga kelompok terpelajar yang berpartisipasi dalam perdebatan pengetahuan. *Pertama*, kelompok tradisionalis Barat. Kelompok ini percaya bahwa kebudayaan dominan adalah kebudayaan Barat. Para tradisionalis Barat yakin bahwa sejarah, kebudayaan, kepustakaan telah dikuasai kaum elite dan kemudian mencetak sekelompok pemikir yang mendorong pengakuan masyarakat bahwa pengetahuan dan sains itu elitis. Dalam perkembangannya, kekuasaan kaum elite mulai bergeser karena perkembangan zaman sehingga mendorong lahirnya pemikiran alternatif tentang minoritas, gender, dan feminisme.

Kedua, kelompok yang menafikan budaya barat secara berlebihan sehingga harus berhati-hati, dan golongan yang ketiga yaitu kelompok multikulturali yang percaya bahwa pendidikan harus direformasi agar dapat memberikan perhatian dan pengalaman kepada orang kulit berwarna dan perempuan. Dengan demikian perlu kesetaraan sistem dan kurikulum pendidikan.

f. Bill Martin

Dalam karyanya *Multiculturalism: Consumerist or Transformational?*, Martin menuangkan gagasannya bahwa semua isu yang berkaitan dengan pengembangan multikulturalisme tumbuh dalam sebuah pertanyaan tentang perbedaan cara pandang, seperti yang dilakukan oleh para filsuf dan teoritikus sosial. Menurutnya, multikulturalisme merupakan agenda sosial politik, maka harus dimaknai lebih dari sekedar iklan dalam kelompok yang berbeda-beda. Semua haruslah mendekati dengan cara pandang yang sama yakni atas nama kemanusiaan.

Martin juga mengungkapkan bahwa istilah multikulturalisme harus dikonsumsi dan menjadikannya sebagai jaringan kerja. Hanya dengan itulah multikulturalisme dapat menjadi bagian dari transformasi budaya dan mampu mencegah terjadinya konflik sosial-politik.

g. Martin J. Beck Matustik

Matustik menyampaikan gagasannya bahwa segala bentuk perdebatan yang dilakukan oleh masyarakat Barat berkaitan dengan hukum atau tatanan dari sebuah masyarakat multikultural. Dalam artikelnya *Ludic Corporate and Imperial Multicultural: Impostors of Democracy and Cartographers of the New World Order*, Matustik mengatakan bahwa kebudayaan, politik, dan perang ekonomi sudah muncul. Teori multikulturalisme meliputi beberapa butir gagasan yang semuanya merujuk pada gagasan liberalisasi Plato yaitu tentang pendidikan dan politik.

Matustik yakin bahwa pencerahan dari sebuah masyarakat multikultural akan dapat tercipta melalui kerja sama dan globalisasi nilai-nilai lokal dalam kerangka multikulturalisme, sebuah tantangan dari kondisi bangsa yang monokultur.

h. Judith M. Green

Menurut Green multikulturalisme tidaklah unik, di hampir semua negara terdapat kondisi multikultural karena mereka mengakomodasi kelompok-kelompok kecil dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Satu hal yang perlu dicatat bahwa jika suatu kelompok ingin berubah dalam tata kehidupannya dalam masyarakat multikultur, maka yang diperlukan adalah perjuangan, melakukan interaksi dan kerjasama antarbudaya.

4. Konsekuensi Masyarakat Multikultural

Memiliki lebih dari 500 etnik, Indonesia merupakan salah satu bangsa paling plural di dunia. Hebatnya lagi, masing-masing etnik benar-benar memiliki akar tradisi dan keterikatan yang kuat dengan tanah Indonesia. Kecuali etnik Cina, Arab, dan India, etnik-etnik lain memiliki tanah leluhur di Indonesia juga, dengan kata lain 'asli Indonesia'. Berbeda misalnya dengan pluralisme Amerika yang dibangun oleh etnik-etnik pendatang, di mana etnik asli hanyalah etnik Indian dengan berbagai variannya. Demikian juga dengan Singapura yang dibangun oleh etnik-etnik pendatang.

Akibat dari kuatnya akar tradisi pada etnik-etnik di Indonesia, tidak mengherankan bila suatu budaya Indonesia yang tunggal tidak pernah

terwujud. Masing-masing etnik tetap memiliki budayanya sendiri yang satu sama lain berbeda, bahkan beberapa di antaranya sangat kontras. Oleh karena itu, pernyataan Pramoedya Ananta Toer (Budianta, 2004: 23), bahwa Indonesia bukanlah sebuah bangsa tetapi negara yang terdiri dari bangsa-bangsa sangatlah tepat. Indonesia sebagai negara telah selesai, tetapi Indonesia sebagai bangsa tidak akan pernah selesai. Pernyataan itu mungkin menimbulkan perdebatan, tapi jika melihat fakta di lapangan di mana terjadi kontras-kontras perbedaan yang tajam antaretnik, maka pendapat ini mendapatkan pembenaran.

Konsekuensi dari sebuah negara yang terdiri dari banyak etnik adalah terjadinya interaksi antaretnis. Beberapa interaksi berjalan mulus, dan bahkan terjadi asimilasi dan akulturasi budaya antar etnik. Namun demikian, beberapa interaksi bersisi kelam. Sejak ditasbihkannya Indonesia sebagai sebuah negara pada tahun 1945 oleh para pendiri negara, telah terjadi berbagai pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh yang terjadi terus menerus, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, dan lainnya. Tidak hanya itu, pertikaian dan bentrok antaretnis telah ribuan kali terjadi, baik dalam skala besar maupun kecil. Jadi agaknya, sisi kelam interaksi memang bagian dari kehidupan kenegaraan Indonesia sendiri. Sejarah Indonesia adalah juga sejarah pertikaian antaretnis.

Pertikaian antaretnis yang secara laten terus terjadi adalah pertikaian yang melibatkan etnis Cina dengan etnis lainnya yang terjadi sepanjang dekade di berbagai tempat di Indonesia. Namun yang terbesar barangkali pertikaian pada tahun 1998 di berbagai kota besar di Indonesia, di mana etnis Cina dijadikan kambing hitam atas keterpurukan ekonomi masyarakat. Ratusan orang dilaporkan terbunuh, puluhan diperkosa, harta benda bernilai trilyunan lenyap. Sejarah pertikaian antaretnis skala besar yang lain adalah pertikaian antara etnis Madura dan etnis Dayak di Kalimantan yang sampai terjadi dua kali (tragedi Sambas dan Sampit). Ribuan jiwa melayang, harta benda ludes, puluhan ribu orang menjadi pengungsi di negara sendiri. *Social cost* yang harus dibayarkan luar biasa besar, bahkan mungkin tidak akan sanggup ditalangi oleh pemerintah meskipun diangsur puluhan tahun.

Berbagai pertikaian dalam skala kecil sangatlah banyak, mulai dari perkelahian pemuda antaretnis, tawuran antar kampung berbeda etnis, pengusiran etnis lain dan sebagainya. Semuanya terjadi hampir di seluruh kawasan Indonesia, terutama terjadi di mana terdapat banyak entitas etnis di suatu wilayah. Pada daerah-daerah yang menjadi tempat berlangsungnya program transmigrasi hampir selalu timbul friksi-friksi kecil antara warga asli dan warga pendatang. Pertanyaannya; mengapa konflik antaretnis selalu terjadi di Indonesia? Ada banyak jawaban yang bisa diberikan untuk menerangkan mengapa konflik antaretnis selalu terjadi. Berbagai disiplin ilmu telah memberikan sumbangan dalam kajian mengenai sumber-sumber konflik dan upaya-upaya penanganan serta pencegahannya

a. Etnik dan Etnisitas

Pada awalnya istilah etnik hanya digunakan untuk suku-suku tertentu yang dianggap bukan asli Indonesia, namun telah lama bermukim dan berbaur dalam masyarakat, serta tetap mempertahankan identitas mereka melalui cara-cara khas mereka yang dikerjakan, dan atau karena secara fisik mereka benar-benar khas. Misalnya etnik Cina, etnik Arab, dan etnik Tamil-India. Perkembangan belakangan, istilah etnik juga dipakai sebagai sinonim dari kata suku pada suku-suku yang dianggap asli Indonesia. Misalnya etnik Bugis, etnik Minang, etnik Dairi-Pakpak, etnik Dani, etnik Sasak, dan ratusan etnik lainnya. Malahan akhir-akhir ini istilah suku mulai ditinggalkan karena berasosiasi dengan keprimitifan (suku dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai 'tribe'), sedangkan istilah etnik dirasa lebih netral. Istilah etnik sendiri merujuk pada pengertian kelompok orang-orang, sementara etnis merujuk pada orang-orang dalam kelompok. Dalam buku ini keduanya akan digunakan secara bergantian tergantung konteksnya.

Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan istilah etnik berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnik memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta adat-istiadat dan tradisi.

Menurut Frederich Barth (Mendatu, 2006) istilah etnik menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul

bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Kelompok etnik adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang: 1) Dalam populasi kelompok mereka mampu melestarikan kelangsungan kelompok dengan berkembang biak; 2) Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan sadar akan rasa kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya. 3) Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. 4) Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Definisi etnik di atas menjelaskan pembatasan-pembatasan kelompok etnik yang didasarkan pada populasi tersendiri, terpisah dari kelompok lain, dan menempati lingkungan geografis tersendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Seperti misalnya, etnik Minang menempati wilayah geografis pulau Sumatera bagian barat yang menjadi wilayah provinsi Sumatera Barat saat ini dan beberapa daerah pengaruh di provinsi sekitar. Lalu etnik Sunda menempati wilayah pulau Jawa bagian barat. Dan etnik Madura menempati pulau Madura sebagai wilayah geografis asal.

Sebuah kelompok etnik pertama kali diidentifikasi melalui hubungan darah. Apakah seseorang tergabung dalam suatu kelompok etnik tertentu atau tidak tergantung apakah orang itu memiliki hubungan darah dengan kelompok etnik itu atau tidak. Meskipun seseorang mengadopsi semua nilai-nilai dan tradisi suatu etnik tertentu tetapi jika ia tidak memiliki hubungan darah dengan anggota kelompok etnik itu, maka ia tidak bisa digolongkan anggota kelompok etnik tersebut. Seorang Batak akan tetap menjadi anggota etnik Batak meskipun dalam kesehariannya sangat 'Jawa'. Orang Jawa memiliki mengistilahkan 'durung Jawa' (belum menjadi orang Jawa yang semestinya) untuk orang-orang yang tidak menerapkan nilai-nilai Jawa dalam keseharian mereka, dan menganggap orang dari etnik lain yang menerapkan nilai-nilai Jawa sebagai 'njawani' (berlaku seperti orang Jawa) (Suseno dalam Mendatu, 2006). Meskipun demikian orang itu tetap tidak dianggap sebagai orang Jawa.

Agama kadangkala menjadi ciri identitas yang penting bagi suatu etnis, tapi kadangkala tidak berarti apa-apa, hanya sebagai kepercayaan yang dianut anggota etnik. Di Jawa, agama yang dianut tidak menjadi penanda identitas etnik Jawa (kejawaan) seseorang. Selain Islam, orang Jawa yang

menganut kristen, Hindu, Budha, ataupun Kejawen juga cukup besar. Demikian juga pada etnis Betawi ataupun Sunda. Namun berbeda dengan etnik Minang. Agama dalam masyarakat Minangkabau justru dikukuhkan sebagai identitas kultur mereka sejak animisme ditinggalkan. Islam menjadi tolak ukur ke'minang'an seseorang secara legalitas adat. Karena itu, orang Minangkabau yang tidak lagi Islam dipandang sebagai orang yang tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi terhadap adat Minangkabau, sebagaimana ditafsirkan dari 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah', kendatipun secara genealogis ia tetap beretnis Minang, yang tentu saja tidak bisa menjadi etnis lain (Arimi dalam Mendatu, 2006)).

Pada saat anggota kelompok etnik melakukan migrasi, sering terjadi keadaan di mana mereka tercerabut dari akar budaya etniknya karena mengadopsi nilai-nilai baru. Demikian juga dengan bahasa, banyak anak-anak dari anggota kelompok etnik tertentu yang merantau tidak bisa lagi berbahasa etniknya. Akan tetapi mereka tetap menganggap diri sebagai anggota etnik yang sama dengan orangtuanya dan juga tetap diakui oleh kelompok etniknya. Jadi, keanggotaan seseorang pada suatu etnik terjadi begitu saja apa adanya, dan tidak bisa dirubah. Tidak bisa seorang etnis Sunda meminta diubah menjadi etnis Bugis, atau sebaliknya. Meskipun orang bisa saja memilih untuk mengadopsi nilai-nilai, entah dari etniknya sendiri, dari etnik lain, ataupun dari gabungan keduanya.

Antara satu etnik dengan etnik lainnya kadang-kadang juga terdapat kemiripan bahasa. Kesamaan bahasa itu dimungkinkan karena etnik-etnik tersebut memiliki kesamaan sejarah tradisi kuno yang satu, yang mewariskan tradisi yang mirip dan juga bahasa yang mirip pula (Goodenough dalam Mendatu, 2006). Seperti misalnya bahasa jawa memiliki banyak kemiripan dengan bahasa bali, lalu bahasa minang mirip dengan bahasa banjar, dan lainnya.

Keanggotaan etnik yang menekankan hubungan 'darah' menurut keterangan diatas merupakan bagian dari perspektif teori primordial yang menyatakan bahwa etnisitas merupakan suatu keniscayaan. Keniscayaan tersebut meliputi keterpautan manusia pada kedekatan wilayah teritorial dan hubungan kerabat, bahkan juga keniscayaan bahwa individu selalu dilahirkan dalam sebuah masyarakat yang sudah terbentuk dengan sistem keagamaan,

bahasa dan adat istiadatnya (Simatupang dalam Mendatu, 2006). Menurut perspektif ini, seseorang yang memiliki darah sebagai etnis Minang misalnya, maka ia tidak bisa mengelakkannya. Ia harus menerima fakta bahwa dirinya adalah seorang 'Minang'. Etnik dalam perspektif primordial merupakan sesuatu yang memang sudah ada dan tinggal di lanjutkan.

Dalam antropologi ada tiga perspektif teori utama yang digunakan untuk membahas mengenai etnisitas, selain teori primordial, dua lainnya adalah teori situasional, dan teori relasional. Teori situasional berseberangan dengan teori primordial. Teori situasional memandang bahwa kelompok etnis adalah entitas yang dibangun atas dasar kesamaan para warganya, bagi mereka yang lebih penting bukan wujud kesamaan itu sendiri melainkan perihal penentuan dan pemeliharaan batas-batas etnis yang diyakini bersifat selektif dan merupakan jawaban atas kondisi sosial historis tertentu (Barth dalam Mendatu, 2006)). Teori ini menekankan bahwa kesamaan kultural merupakan faktor yang lebih besar dibanding kesamaan darah dalam penggolongan orang-orang kedalam kelompok etnik.

Menurut perspektif teori situasional, etnik merupakan hasil dari adanya pengaruh yang berasal dari luar kelompok. Salah satu faktor luar yang sangat berpengaruh terhadap etnisitas adalah kolonialisme, yang demi kepentingan administratif pemerintah kolonial telah mengkotak-kotakkan warga jajahan ke dalam kelompok-kelompok etnik dan ras (Simatupang dalam Mendatu, 2006). Untuk seterusnya sisa warisan kolonial itu terus dipakai sampai sekarang. Contoh yang paling jelas adalah pembentukan identitas etnik Dayak. Istilah Dayak diberikan oleh kolonial Belanda untuk menyebut seluruh penduduk asli pulau Kalimantan. Padahal sesungguhnya etnik Dayak terdiri dari banyak subetnik (yang sebenarnya sebagai etnik sendiri yang sangat berbeda satu sama lain, seperti Benuaq dan Ngaju). Istilah Dayak sendiri tidak dipergunakan sebagai identitas mereka. Mereka menyebut diri sebagai orang Benuaq jika itu etnis Benuaq (Trisnadi dalam Mendatu, 2006).

Teori relasional mendasarkan pada pandangan bahwa kelompok etnik merupakan penggabungan dua entitas atau lebih yang memiliki persamaan maupun perbedaan yang telah dibandingkan dalam menentukan pembentukan etnik dan pemeliharaan batas-batasnya. Kesamaan-kesamaan yang ada pada dua atau lebih entitas yang disatukan akan menjadi identitas

etnik. Menurut perspektif relasional ini, etnik ada karena adanya hubungan antara entitas yang berbeda-beda; etnik Sasak tidak akan menjadi etnik Sasak bila tidak mengalami hubungan dengan entitas di luar kelompok itu. Etnik tergantung pada pengakuan entitas lain di luar kelompok.

Namun kiranya batas-batas budaya antar etnik lambat laun telah semakin tidak jelas. Saat ini segala manusia dari berbagai etnik telah semakin melebur dalam kehidupan sosial yang satu. Apalagi globalisasi yang begitu deras dan nyaris tak tertahankan bertendensi memunculkan keseragaman budaya, baik dalam pola pikir, sikap, tingkah laku, seni, dan sebagainya. Saat ini, menemukan kekhasan perilaku dari etnik tertentu bukan hal yang mudah. Semua etnis pada dasarnya memiliki perilaku yang sama. Misalnya hampir tak dapat dibedakan lagi seorang Minang dengan seorang Jawa, seorang Bugis dengan seorang Batak di Jakarta dalam hal tata pergaulan. Lantas, apa perlunya lagi berbicara mengenai etnik?

Persoalannya kemudian beranjak kepada masalah identitas. Etnik tetap ada karena berkaitan dengan kebutuhan akan identitas-identitas. Meskipun terdapat kesamaan-kesamaan yang besar dengan etnik lain, hal itu tidak menghalangi untuk tetap merasa berbeda. Identitas etnik yang diperkuat, di mana identitas etnik semakin kerap ditonjolkan dalam kehidupan sosial seperti yang terjadi belakangan ini, kontradiktif dengan ramalan para pemuja globalisasi. Justru, perkuatan identitas etnik lahir sebagai perlawanan atas globalisasi. Etnik dijadikan alat politik untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi dalam meraih sumber daya tertentu. Beberapa manifestasi politik identitas etnik diantaranya, munculnya negara-negara etnik (seperti yang terjadi di bekas negara Soviet), tuntutan kemerdekaan atas suatu wilayah karena diklaim milik etnik tertentu (seperti di Aceh), tuntutan akan pengembalian tanah adat yang dipergunakan untuk perkebunan dan lainnya (terjadi hampir diseluruh Indonesia, terutama di luar Jawa), tuntutan pengembalian kekuasaan adat dan berkembangnya isu putera daerah dalam era otonomi daerah.

Jadi, agaknya berbicara mengenai etnisitas tetap tidak kehilangan momentum. Hanya saja, pemahaman mengenai etnisitas perlu ditambahkan. Tidak saja etnik sebagai kategori orang-orang karena budaya dan darah,

tetapi lebih penting lagi telah menjadi kategori identitas politis, di mana identitas etnis tetap dipertahankan karena memang bermanfaat.

Pertanyaan yang selalu muncul ketika bertemu orang-orang baru adalah pertanyaan “orang darimana?” Jawaban yang menunjuk pada wilayah geografis seringkali cukup, namun juga seringkali tidak memuaskan. Dalam masyarakat multietnik seperti Indonesia, jawaban yang diharapkan tidak jauh dari asal etnik. Jadi, pertanyaan, “Anda orang darimana?” sering sama artinya dengan “etnik Anda apa?”

Simaklah kasus berikut: Johan ketika ditanya seseorang “Anda, orang darimana?”, selalu dijawabnya orang dari Irian (Papua). Sebab di sanalah ia lahir dan tumbuh besar. Ke sana pula ia pulang ke rumah orangtuanya. Akan tetapi jawabannya itu jarang sekali memuaskan penanya, sebab secara fisik jelas-jelas kelihatan ia tidak termasuk kategori salah satu etnis di Irian. Ia lebih mirip orang daerah barat Indonesia. Kenyataannya memang demikian, kedua orang tuanya berasal dari Minangkabau. Lalu apakah ia, Johan, mesti menjawab orang Minang, halmana akan lebih dipercayai ketimbang menjawab sebagai orang Irian? Ia mengaku mengalami dilema. Bagaimanapun ia tidak merasa sebagai orang Minang, ia merasa orang Irian dan sangat Irianis. Tapi di sisi lain, ia butuh identitas etnis, minimalnya untuk menjawab pertanyaan “orang dari mana?” Pertanyaan yang akan selalu mampir di manapun ia berada.

Demikianlah, identitas etnik penting di Indonesia. Umumnya orang Indonesia melakukan pengolahan informasi sosial orang lain berdasarkan skema kognitif berbasis asal etnik. Hal ini merupakan kewajaran karena Indonesia memang dikonstruksi atas sub-sub yang berupa kelompok etnik. Maka kelompok etniklah yang menjadi salah satu referensi utama dalam menilai orang, bukannya menurut wilayah secara geografis atau agama. Di beberapa negara, misalnya di Irlandia, agama menjadi dasar kategorisasi utama. Sementara itu di beberapa negara yang lain, misalnya di Amerika Serikat, Jerman, dan Perancis, ras menjadi kategorisasi utama.

Menurut Keefe (Mendatu, 2006) identitas etnis terdiri dari dua elemen, yaitu: 1) Identifikasi etnik sendiri vs kelompok etnik lain melalui proses kognitif, 2) Derajat keterikatan pada kelompok dan kebudayaannya yang merupakan elemen afektif. Tatkala seseorang merasa memiliki identitas etnis,

maka ia mengidentifikasi siapa yang menjadi anggota kelompok etnik sendiri dan siapa yang menjadi anggota kelompok etnik lain. Ia pun mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang ada antara kelompok etnik sendiri dan kelompok lain. Ia juga memiliki keterikatan emosional tertentu terhadap etniknya.

Elemen diatas menggambarkan bahwa identitas etnik merupakan fenomena objektif dan subjektif (Hocoy dalam Mendatu, 2006). Fenomena objektif manakala seseorang menegaskan identitas etniknya melalui kriteria-kriteria tertentu yang pasti. Misalnya seorang anak yang memiliki orangtua dengan etnik tertentu maka ia merasa sebagai bagian dari etnik orangtuanya. Identitas etnis merupakan fenomena subjektif karena terkandung derajat perasaan kepemilikan (*sense of belonging*) akan kelompok etnisnya. Seseorang bisa sangat memuja etniknya, sementara yang lain bisa jadi tidak memiliki keterikatan yang dalam dengan etniknya. Bisa jadi seseorang yang menurut kriteria umum diakui sebagai anggota kelompok etnik tertentu (karena keturunan misalnya), namun menolak untuk memakai etnik itu sebagai identitasnya. Ada banyak kasus di mana seseorang yang digolongkan kedalam satu etnik tertentu berdasarkan kriteria darah menolak identitas etnik yang dilekatkan padanya. Alasannya bisa beragam. Namun ada kecenderungan penolakan identitas itu berkaitan dengan tidak menguntungkannya identitas asli yang dimiliki baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam berbagai kerusuhan antaretnis, banyak orang tidak mau mengakui identitas etniknya demi alasan keamanan. Dalam kasus berdarah antara warga etnis Dayak dan etnis Madura di Kalimantan, banyak warga etnis Madura tidak mengaku diri sebagai etnis Madura karena akan jadi sasaran kemarahan etnis Dayak, demikian pula sebaliknya. Namun saat bersamaan juga terjadi identitas etnis mereka yang bertikai ditonjolkan begitu kuatnya ketika terjadi kerusuhan antaretnis sebagai bentuk solidaritas etnis.

Ada fakta yang menarik pada saat terjadinya konflik antaretnis di Kalimantan yang melibatkan etnis Dayak dan etnik Madura. Ternyata konflik antar dua etnis itu juga berakibat memperkuat identitas etnis lain di daerah tersebut. Banyak bangunan-bangunan, baik toko, rumah, dan semacamnya diberi label milik orang Bugis, milik orang Jawa, milik orang Minang dan sebagainya untuk menghindari sasaran penghancuran. Demikian pula mereka dengan terang-terangan mengumumkan identitas etnis mereka agar

tidak menjadi korban. Jadi, ditengah pertikaian antaretnis penonjolan identitas etnis bagi etnis yang tidak bertikai menjadi sangat penting demi keamanan. Terjadi di mana identitas asal etnik yang mungkin telah digantikan dengan identitas geografis sebagai orang Kalimantan dimunculkan kembali dan diperkuat.

Dalam keadaan damai, penolakan identitas etnis memiliki alasan yang kurang lebih sama. Banyak warga etnis pendatang di suatu wilayah tertentu meninggalkan identitas etnisnya lalu melebur diri dan memakai identitas etnis baru. Hal ini dilakukan agar di terima dalam masyarakat baru, sebab faktor etnis mempengaruhi penerimaan masyarakat. Kesamaan etnik antara subyek dan obyek penerimaan diasumsikan akan menyebabkan penerimaan lebih tinggi (Conger dalam Mendatu, 2006). Akan tetapi hal ini bukan hal mudah karena biasanya pendatang tetap dianggap sebagai etnis yang berbeda oleh warga etnis asli meskipun melakukan hal-hal yang sama dengan warga etnis asli di suatu wilayah.

Sampai di sini masih tersisa pertanyaan, bisakah seorang yang secara 'darah' ditasbihkan sebagai etnis tertentu kemudian diakui sebagai etnis lain pula? Tampaknya hal itu dimungkinkan. Menurut Stephan dan Stephan (Mendatu, 2006), nilai budaya merupakan sesuatu yang dapat dipelajari oleh siapapun. Maka sesungguhnya, kendatipun memberikan ciri khas etnik, ia cukup terbuka bagi siapapun untuk menginternalisasinya dan memberikan seseorang identitas etnik. Pendapat ini didasarkan pada fenomena pernikahan antar etnik di mana kemudian salah satu pihak melebur dan memakai identitas etnik pasangannya. Demikian juga anak-anak dari perkawinan antaretnis umumnya tetap dinilai sah bila memakai identitas etnis kedua orangtuanya secara bersamaan.

b. Etnosentrisme dan Primordialisme

Sebagai konsekuensi dari identitas etnis muncullah etnosentrisme. Menurut Matsumoto (Mendatu, 2006), etnosentrisme adalah kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya sendiri. Berdasarkan definisi ini etnosentrisme tidak selalu negatif sebagaimana umumnya dipahami. Etnosentrisme dalam hal tertentu juga merupakan sesuatu yang positif. Tidak seperti anggapan umum yang mengatakan bahwa

etnosentrisme merupakan sesuatu yang semata-mata buruk, etnosentrisme juga merupakan sesuatu yang fungsional karena mendorong kelompok dalam perjuangan mencari kekuasaan dan kekayaan. Pada saat konflik, etnosentrisme benar-benar bermanfaat. Dengan adanya etnosentrisme, kelompok yang terlibat konflik dengan kelompok lain akan saling dukung satu sama lain. Salah satu contoh dari fenomena ini adalah ketika terjadi pengusiran terhadap etnis Madura di Kalimantan, banyak etnis Madura di lain tempat mengecam pengusiran itu dan membantu para pengungsi.

Etnosentrisme memiliki dua tipe yang satu sama lain saling berlawanan. Tipe pertama adalah etnosentrisme fleksibel. Seseorang yang memiliki etnosentrisme ini dapat belajar cara-cara meletakkan etnosentrisme dan persepsi mereka secara tepat dan bereaksi terhadap suatu realitas didasarkan pada cara pandang budaya mereka serta menafsirkan perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budayanya. Tipe kedua adalah etnosentrisme infleksibel. Etnosentrisme ini dicirikan dengan ketidakmampuan untuk keluar dari perspektif yang dimiliki atau hanya bisa memahami sesuatu berdasarkan perspektif yang dimiliki dan tidak mampu memahami perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budayanya.

Indikator terbaik menentukan tipe etnosentrisme seseorang dapat ditemukan pada respon orang tersebut dalam menginterpretasi perilaku orang lain. Misalnya Pita, seorang etnis Minang makan sambil jalan di gang rumah kita di Jogja, jika kita semata-mata memandang dari perspektif sendiri dan mengatakan “dia memang buruk”, “dia tidak sopan”, atau “itulah mengapa dia tidak disukai” berarti kita memiliki etnosentrisme yang kaku. Tapi jika mengatakan “itulah cara yang dia pelajari untuk melakukannya,” berarti mungkin kita memiliki etnosentrisme yang fleksibel.

Lawan dari etnosentrisme adalah etnorelativisme, yaitu kepercayaan bahwa semua kelompok, semua budaya dan subkultur pada hakekatnya sama (Daft dalam Mendatu, 2006). Dalam etnorelativisme setiap etnik dinilai memiliki kedudukan yang sama penting dan sama berharganya. Dalam bahasa filsafat, orang yang mampu mencapai pengertian demikian adalah orang yang telah mencapai tahapan sebagai manusia sejati; manusia humanis.

Sikap etnosentrik dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya tipe kepribadian, derajat identifikasi etnik, dan ketergantungan. Semakin tinggi derajat identifikasi etnik umumnya semakin tinggi pula derajat etnosentrisme yang dimiliki, meski tidak selalu demikian. Helmi (Mendatu, 2006), misalnya menemukan bahwa generasi muda etnik Cina memiliki sikap etnosentrik lebih rendah daripada yang tua. Temuan ini membuktikan bahwa semakin terikat seseorang terhadap etniknya maka semakin tinggi pula etnosentrisme yang dimiliki, sebab generasi tua etnik Cina umumnya memang masih cukup kuat terikat dengan negeri leluhurnya dibandingkan generasi mudanya yang telah melebur dengan masyarakat mayoritas lainnya.

Ketergantungan merupakan faktor penting yang menentukan etnosentrisme. Wanita yang notabene lebih tergantung terhadap keluarga dan kelompok memiliki sikap etnosentrik yang lebih tinggi. Sebuah penelitian mengenai etnosentrisme pada etnis Cina membuktikan bahwa wanita etnis Cina memiliki sikap etnosentrik lebih tinggi daripada laki-laki etnis Cina (Mendatu, 2006). Hal ini nampaknya juga berlaku untuk etnik-etnik lainnya, karena praktis saat ini wanita masih lebih tergantung daripada laki-laki. Meskipun tentu saja sejalan dengan berkembangnya kesadaran gender di mana saat ini wanita menjadi semakin tidak tergantung lagi pada laki-laki dan kelompok, wanita akan menjadi tidak lebih etnosentrik daripada laki-laki.

Etnosentrisme jelas bukan sesuatu yang harus dihilangkan sama sekali. Ia patut dipelihara karena etnosentrisme memang fungsional. Dalam hal ini etnosentrisme fleksibel yang harus dikembangkan. Dengan etnosentrisme fleksibel, kehidupan multikultur yang damai bisa berlangsung sementara masing-masing kultur tidak kehilangan identitasnya.

Mengingat pentingnya memiliki etnosentrisme yang fleksibel dalam masyarakat multikultur seperti Indonesia maka diperlukan upaya-upaya untuk memperkuatnya. Tiga cara yang bisa kita lakukan untuk memperkuat etnosentrisme fleksibel menurut Matsumoto (Mendatu, 2006), adalah: 1) Mengetahui bagaimana cara kita memahami realitas sebagaimana yang biasa kita lakukan dalam cara tertentu. Misalnya saja kita mengerti bagaimana kita melakukan penilaian tentang ketidaksopanan. Sebab apa yang sopan menurut budaya kita mungkin saja bukan merupakan kesopanan dalam budaya yang lain; 2) Mengakui dan menghargai kenyataan bahwa

orang-orang yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda memiliki perbedaan cara dalam memahami realitas, dan bahwa versi mereka tentang sebuah realitas adalah sah dan benar bagi mereka sebagaimana versi kita sah dan benar untuk kita; 3) Mengetahui mengenai budaya sendiri dan budaya orang lain serta pengaruhnya terhadap cara-cara memahami realitas dalam keadaan tertentu tidak cukup untuk menumbuhkan etnosentrisme fleksibel. Harus juga dipelajari bagaimana untuk membedakan antara emosi, penilaian terhadap moralitas, dan penilaian terhadap kepribadian yang sering disamakan dengan etnosentrisme dan cara pandang budaya.

Apa yang dikemukakan Matsumoto di atas, jelas merupakan upaya-upaya pribadi yang bisa dilakukan agar seseorang bisa memiliki etnosentrisme yang fleksibel. Dalam tataran komunitas atau masyarakat, pendidikan multikultural merupakan jalan yang bisa dilakukan dalam mengembangkan etnosentrisme fleksibel. Pendidikan multikultural berarti pendidikan akan nilai-nilai keberagaman yang mengajarkan bagaimana toleran terhadap perbedaan. Adapun pendidikan itu bisa melalui pendidikan formal ataupun nonformal, seperti melalui keluarga, perkumpulan-perkumpulan, maupun media massa.

Tantangan utama dalam masyarakat yang multikultural adalah tumbuhnya sikap primordialisme. Ini artinya, akan timbul rasa bahwa suatu kelompok lebih baik dari kelompok lainnya. Pada akhirnya primordialisme dapat menimbulkan berbagai masalah yang sering tidak disadari, seperti tumbuhnya sikap prasangka (*prejudice*) atau diskriminasi terhadap kelompok lain (Yaqin, 2005: 72).

Sebagai contoh adalah adanya primordialisme bahasa, seperti halnya sering dijumpai dalam sinetron di berbagai stasiun televisi. Dalam beberapa kisah sinetron terdapat pelabelan terhadap dialek tertentu. Dialek bahasa Jawa (Solo, Banyumas, Tegal), Madura, dan Betawi atau bahasa Indonesia yang berdialek Jawa, Madura, dan Betawi diidentikkan dengan bahasanya kaum pinggiran yang berstatus sosial rendah. Ini dapat dilihat dari dialek yang diperankan para pembantu rumah tangga, penjual sate, sopir angkot ataupun peran suatu kelompok yang tinggal di tengah perkampungan. Contoh ini bisa

saja menjadi krusial manakala secara terus-menerus dibiarkan dan menjadi stereotip dalam kehidupan yang nyata dalam masyarakat.

Menurut Glaser dan Moynihan (1981: 50) primordial dapat terjadi karena adanya persamaan atau kesesuaian dengan keserupaan unsur-unsur penting, misalnya genealogi (keturunan dan ikatan kekerabatan), sistem kepercayaan (agama dan ritualitasnya), dan kesamaan berbahasa. Dalam realitasnya, elemen primordial itu dapat membentuk identitas etnik baru sebagai identitas tersendiri yang teraktualisasikan dalam perilaku etnografinya. Oleh karenanya, elemen primordial di antara kelompok-kelompok etnik dapat menjadi unsur pembeda.

c. Prasangka Etnik

Prasangka adalah cara pandang atau perilaku seseorang terhadap orang lain secara negatif (Purwasito, 2003: 178). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Myrdal, bahwa prasangka merupakan pembenaran atas perlakuan yang membeda-bedakan kelompok-kelompok ras (Horton dan Hunt, 1992: 65). Definisi ini membawa pada suatu kenyataan bahwa prasangka sangat potensial menimbulkan sebuah kesalahpahaman. Suatu prasangka berangkat dari adanya pandangan negatif dengan adanya pemisahan yang tegas antara perasaan kelompokku (*in-group*) dan perasaan kelompok lain (*out-group*).

Horton dan Hunt (1992: 65) mengemukakan penyebab munculnya prasangka. Pertama, ialah sikap etnosentrisme yang cenderung membuat penilaian bahwa kelompok *in-group* adalah yang paling baik. Kedua, adanya kenyataan bahwa dalam menghadapi orang luar atau kelompok luar apalagi yang masih asing, seseorang cenderung memberikan stereotip, meskipun tidak selalu benar. Ketiga, seseorang sering menggeneralisasi terhadap suatu kelompok. Keempat, seseorang cenderung menentukan stereotip tentang anggapan bagaimana seharusnya dalam hubungan antarkelompok. Terakhir, seseorang cenderung melakukan prasangka terhadap orang yang bersaing dengan dirinya.

Menyimak keterangan di atas, sebuah prasangka erat kaitannya dengan stereotip. Menurut Ahmadi (1990: 223), stereotip dapat diartikan sebagai sebuah gambaran atau angan-angan terhadap individu atau

kelompok yang terkena prasangka tadi. Prasangka dapat terjadi akibat adanya pewarisan-pewarisan yang salah, sehingga setiap individu atau kelompok mempunyai stereotip etnik yang buruk yang jika kemudian mengkristal akan menjelma menjadi diskriminasi. Dalam segi hubungan antarkelompok etnik, diskriminasi merupakan cara memperlakukan seseorang berdasarkan pada klasifikasi kelompok, bukannya berdasarkan ciri-ciri individu (Horton dan Hunt, 1992: 65). Diskriminasi biasanya dilakukan oleh kelompok dominan agar dapat mempertahankan hak-hak istimewanya.

d. Kelompok Minoritas dan Kelompok Mayoritas

Kelompok minoritas adalah orang-orang yang karena ciri-ciri fisik tubuh atau asal-usul keturunannya atau kebudayaannya dipisahkan dari orang-orang lainnya dan diperlakukan secara tidak sederajat atau tidak adil dalam masyarakat di mana mereka itu hidup (Liliweri, 2005: 105-111). Karena itu mereka merasakan adanya tindakan diskriminasi secara kolektif. Mereka diperlakukan sebagai orang luar dari masyarakat di mana mereka hidup. Mereka juga menduduki posisi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan sosial masyarakatnya, karena mereka dibatasi dalam sejumlah kesempatan-kesempatan sosial, ekonomi, dan politik. Mereka yang tergolong minoritas mempunyai gengsi yang rendah dan seringkali menjadi sasaran olok-olok, kebencian, kemarahan, dan bahkan kekerasan. Posisi mereka yang rendah termanifestasi dalam bentuk akses yang terbatas terhadap kesempatan-kesempatan pendidikan, dan keterbatasan dalam kemajuan pekerjaan dan profesi.

Keberadaan kelompok minoritas selalu dalam kaitan dan pertentangannya dengan kelompok mayoritas (dominan), yaitu mereka yang menikmati status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan yang banyak. Mereka ini mengembangkan seperangkat prasangka terhadap golongan minoritas yang ada dalam masyarakatnya. Prasangka ini berkembang berdasarkan pada adanya (1) perasaan superioritas pada mereka yang tergolong dominan; (2) sebuah perasaan yang secara intrinsik ada dalam keyakinan mereka bahwa golongan minoritas yang rendah derajatnya itu adalah berbeda dari mereka dan tergolong sebagai orang asing; (3) adanya

klaim pada golongan dominan bahwa sebagai akses sumber daya yang ada adalah merupakan hak mereka, dan disertai adanya ketakutan bahwa mereka yang tergolong minoritas dan rendah derajadnya itu akan mengambil sumberdaya-sumberdaya tersebut.

Dalam perspektif ini, mayoritas-minoritas dilihat sebagai hubungan kekuatan. Kekuatan yang terwujud dalam struktur-struktur hubungan kekuatan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat-tingkat lokal. Bila kita melihat minoritas dalam kaitan atau pertentangannya dengan mayoritas maka yang akan dihasilkan adalah hubungan mereka yang populasinya besar (mayoritas) dan yang populasinya kecil (minoritas). Perspektif ini tidak akan dapat memahami mengapa golongan minoritas didiskriminasi. Karena besar populasinya belum tentu besar kekuatannya.

Konsep diskriminasi sebenarnya hanya digunakan untuk mengacu pada tindakan-tindakan perlakuan yang berbeda dan merugikan terhadap mereka yang berbeda secara askriptif oleh golongan yang dominan. Yang termasuk golongan sosial askriptif adalah suku bangsa (termasuk golongan ras, kebudayaan suku bangsa, dan keyakinan beragama), gender atau golongan jenis kelamin, dan umur. Berbagai tindakan diskriminasi terhadap mereka yang tergolong minoritas, atau pemaksaan untuk mengubah cara hidup dan kebudayaan mereka yang tergolong minoritas (atau asimilasi) adalah pola-pola kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat majemuk. Berbagai kritik atau penentangan terhadap dua pola yang umum dilakukan oleh golongan dominan terhadap minoritas biasanya tidak mempan, karena golongan dominan mempunyai kekuatan berlebih dan dapat memaksakan kehendak mereka baik secara kasar dengan kekuatan militer dan atau polisi atau dengan menggunakan ketentuan hukum dan berbagai cara lain yang secara sosial dan budaya masuk akal bagi kepentingan mereka yang dominan.

e. Masalah Disintegrasi Bangsa

Dari pembicaraan tentang perspektif antropologi mengenai nasionalisme dan negara, dapatlah dikemukakan bahwa negara-bangsa Indonesia kini menghadapi tantangan-tantangan besar, yang apabila kita tak berhasil menghadapi dan menaklukkan tantangan tersebut, dapat diprediksi

bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini akan berakhir. Akan tetapi kalau kita memiliki kesepakatan dan komitmen bahwa negara kesatuan ini adalah final, maka kita perlu memperhatikan secara seksama tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan tugas-tugas yang harus kita laksanakan untuk menghadapinya. Banyak orang berpendapat bahwa multikulturalisme merupakan alternatif yang paling tepat untuk membangun kembali integrasi bangsa tersebut, meski belum ditemukan model multikulturalisme seperti apa yang paling tepat untuk Indonesia. Pendapat tersebut benar, karena pendekatan proses dalam multikulturalisme lebih relevan untuk menjawab isu kebangsaan dan integrasi nasional yang kini dituntut mampu menjawab tantangan perubahan.

Menurut Mashudi Noorsalim (Semendawai, 2005) ada empat persoalan besar berkaitan dengan isu hak-hak minoritas dalam kaitannya dengan multikulturalisme dan dilema negara bangsa.

1. Fakta keanekaragaman sukubangsa, ras, agama, dan golongan sosial-ekonomi, semakin diperumit oleh faktor geografi Indonesia yang kepulauan, penduduk yang tinggal terpisah-pisah satu sama lain, mendorong potensi disintegrasi meningkat.
2. Premis antropologi bahwa nasionalisme dan negara seyogyanya dibicarakan mulai dari akarnya, yakni mulai dari konsep-konsep "sukubangsa", "kelompok etnik", dan "etnisitas", jelas menunjukkan bahwa apabila semangat nasionalisme luntur karena berbagai sebab, maka yang tertinggal adalah semangat kesukubangsaan yang menguat. Dengan kata lain, meningkatnya semangat primordial (antara lain kesukubangsaan) di tanah air akhir-akhir adalah indikasi melunturnya nasionalisme.
3. Hak-hak minoritas senantiasa melekat pada fakta pengaturan keanekaragaman yang ada. Apabila pengaturan nasional berorientasi pada kebijakan kebudayaan seragam dan sentralistis maka fakta pluralisme, diferensiasi, dan hierarki masyarakat dan kebudayaan akan meningkat. Dalam kondisi ini hak-hak minoritas akan terabaikan karena tertutup oleh kebijakan negara yang terkonsentrasi pada kekuasaan sentralistis. Namun, apabila pengaturan tersebut adalah demokratis dan/atau multikulturalistis, maka hak-hak minoritas akan semakin dihargai. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa upaya membangun

bangsa yang multikultural itu berhadapan dengan tantangan berat, yaitu fakta keenekaragaman yang luas dalam konteks geografi, populasi, sukubangsa, agama, dan lainnya. Oleh karena itu membangun negara-bangsa yang multikultural nampaknya harus dibarengi oleh politik pengaturan dan sentimen kebangsaan yang kuat.

4. Perikat integrasi nasional yang selama ini terjadi seperti politik penyeragaman nasional dan konsentrasi kekuasaan yang besar sesungguhnya adalah hal yang lumrah dalam politik pemeliharaan negara bangsa. Namun, mekanisme pengaturan nasional ini terganggu ketika seleksi global “tidak lagi menghendaki” (*not favour*) bentuk negara-bangsa sebagai bentuk pengaturan nasional pada abad yang baru ini. Kondisi negeri kita yang serba lemah di berbagai sektor mempermudah kita menjadi rentan untuk “tidak lagi dikehendaki” dalam proses seleksi global.

5. Penutup

Membicarakan masyarakat multikultural sama halnya membicarakan tentang masyarakat-negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah-yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan yang ditekankan di sini adalah perbedaan dalam kesederajatan

Dalam konteks masyarakat Indonesia, benih-benih multikulturalisme sesungguhnya telah ada sejak dahulu, sebab negeri ini terdiri dari beraneka ragam suku bangsa sebagaimana terangkum dalam semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Suku-suku bangsa tersebut bagaikan sebuah mozaik yang hidup berdampingan dengan damai. Masing-masing suku mempunyai corak budaya sendiri-sendiri yang sangat jelas dan belum tercampur oleh warna budaya dari suku lain. Tentu saja mozaik kebudayaan diharapkan akan tetap seperti itu, bahkan kalau bisa lebih dari sekadar hidup berdampingan secara damai.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta diklat menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
 - Memahami dan mencermati materi diklat
 - Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar,
 - Menyimpulkan
 - Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi :
 - Mendiskusikan materi pelatihan
 - Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
 - Melaksanakan refleksi

E. Latihan/ Kasus /Tugas

F. Rangkuman

1. Multikultural pada mulanya adalah terminologi dalam disiplin antropologi. Tetapi, sebagaimana lazimnya, istilah dan konsep dalam sebuah cabang ilmu kemudian digunakan juga dalam cabang ilmu lain dengan makna dan tujuan yang sudah bergeser. Ada beberapa istilah lain yang secara konseptual tampak mirip dengan terminologi multikultural tetapi sebenarnya beda. Misalnya, pluralisme, diversitas, heterogenitas atau yang sering disebut saja dengan istilah “masyarakat majemuk”.
2. Wujud multikultural di Indonesia di antaranya adalah tersebarnya berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Van Vollenhoven (Koentjaraningrat, 1996: 193-194) mengklasifikasikan berbagai suku bangsa Indonesia didasarkan pada sistem lingkaran hukum adat yang dibuat oleh yang terbagi dalam 19 daerah yang mereferensikan kurang lebih 400 suku bangsa

3. Memiliki lebih dari 500 etnik, Indonesia merupakan salah satu bangsa paling plural di dunia. Hebatnya lagi, masing-masing etnik benar-benar memiliki akar tradisi dan keterikatan yang kuat dengan tanah Indonesia. Kecuali etnik Cina, Arab, dan India, etnik-etnik lain memiliki tanah leluhur di Indonesia juga, dengan kata lain 'asli Indonesia'. Berbeda misalnya dengan pluralisme Amerika yang dibangun oleh etnik-etnik pendatang, di mana etnik asli hanyalah etnik Indian dengan berbagai variannya. Demikian juga dengan Singapura yang dibangun oleh etnik-etnik pendatang.
4. Konsekuensi dari sebuah negara yang terdiri dari banyak etnik adalah terjadinya interaksi antaretnis. Beberapa interaksi berjalan mulus, dan bahkan terjadi asimilasi dan akulturasi budaya antar etnik. Beberapa konsekuensi masyarakat multikultural di antaranya: (1) masalah etnik dan etnisitas; (2) etnosentrisme dan primordialisme; (3) prasangka etnik; (4) munculnya kelompok minoritas dan kelompok mayoritas; dan (5) masalah disintegrasi bangsa
5. Dalam konteks masyarakat Indonesia, benih-benih multikulturalisme sesungguhnya telah ada sejak dahulu, sebab negeri ini terdiri dari beraneka ragam suku bangsa sebagaimana terangkum dalam semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Suku-suku bangsa tersebut bagaikan sebuah mozaik yang hidup berdampingan dengan damai. Masing-masing suku mempunyai corak budaya sendiri-sendiri yang sangat jelas dan belum tercampur oleh warna budaya dari suku lain. Tentu saja mozaik kebudayaan diharapkan akan tetap seperti itu, bahkan kalau bisa lebih dari sekadar hidup berdampingan secara damai.

G. Umpan Balik/Tindak Lanjut

Setelah membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini apakah Anda memperoleh pengetahuan baru, yang sebelumnya belum pernah Anda pahami, apakah materi yang diuraikan mempunyai manfaat dalam mengembangkan profesionalisme, apakah materi yang diuraikan mempunyai kedalaman dan keluasan yang Anda butuhkan sebagai guru. Setelah Anda membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini rencana tindak lanjut apa yang akan Anda lakukan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

MULTIKULTURALISME

A. TUJUAN

Setelah mempelajari Kegiatan Pembelajaran 3 ini, peserta diklat memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan masyarakat multikultural
2. Mempunyai sensitivitas terhadap konsekuensi dari masyarakat multikultural
3. Berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial berkaitan dengan eksistensi kehidupan pada masyarakat multikultural
4. Berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat multikultural di tingkat lokal, nasional, dan global.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjelaskan Konsep Masyarakat Multikultural
2. Menjelaskan Konsep Multikulturalisme
3. Menganalisis Multikulturalisme di Indonesia

C. URAIAN MATERI

1. Latar Belakang

Meluasnya disintegrasi sosial merupakan salah satu fenomena krusial yang telah membuat negeri ini terbengkalai. Konflik horisontal antarsuku, agama, ras, misalnya, dan berbagai golongan sampai saat ini masih marak terjadi. Tragedi kekerasan antarkelompok yang meledak secara sporadis diakhir tahun 1990-an, misalnya, kemudian konflik kekerasan yang bernuansa politis, etnis dan agama seperti yang terjadi di berbagai wilayah Aceh, Maluku, Kalimantan Barat dan Tengah, Poso, serta daerah lain merupakan salah satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam lingkaran sosial bangsa Indonesia masih kokoh semangat narsistik-egosentrisnya.

Fakta paling mutakhir berkenaan dengan masalah tersebut adalah bergolaknya kembali konflik bernuansa SARA. Hal itu juga menjadi bukti betapa rapuhnya konstruksi kebangsaan berbasis multikultural di negeri ini. Sehingga tidak heran kalau belakangan ini rasa kebersamaan sudah tidak tampak lagi dan nilai-nilai kebudayaan yang dibangun menjadi terberangus.

Sebagai bahan pengayaan yang diperuntukkan guru, buku ini hadir dalam rangka merajut kebersamaan dan saling pengertian antarsesama bangsa dalam bingkai pemahaman tentang masyarakat multikultural. Selain itu dalam bahasan ini juga dikupas tentang ideologi atau paham sebagai perekat sendi-sendi masyarakat multikultural yaitu multikulturalisme.

Multikulturalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Hal ini sangat penting kita pahami bersama dalam kehidupan masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia ini. Sebab bagaimana pun secara riil, bangsa Indonesia memiliki keragaman bahasa, sosial, agama, budaya dan sebagainya. Keragaman tersebut amat kondusif bagi munculnya konflik dalam berbagai dimensi kehidupan.

2. Konsep Masyarakat Multikultural

Liliweri (2005: 57-62) secara tersirat menyamakan istilah masyarakat multikultural dengan masyarakat majemuk. Menurutnya, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik, dan keragaman itu menjadi sumber keragaman kebudayaan atau subkultur dari masing-masing etnik.

Konsep multikultural menjelaskan tentang kehadiran dan daya tahan sekelompok orang dari beragam ras dan etnik minoritas yang mendefinisikan diri mereka secara berbeda dengan orang lain yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Secara ideologis, konsep multikultural terdiri atas seperangkat gagasan yang relatif mempunyai koherensi dengan gagasan yang membentuk sebuah mosaik kebudayaan (Kymlicka, 2002: 13-49). Perbedaan latar belakang kebudayaan mendeskripsikan bahwa kita tidak bisa mengelak dari keberagaman, karena kita pun tak mampu menolak identitas ganda (*multiple identities*) yang kita miliki. Identitas ganda itu terbentuk melalui

keunikan dan kompleksitas akibat interseksi dari ras, etnik, kelas sosial, gender, bahasa, agama, orientasi seksual, hingga kemampuan personal.

3. Multikulturalisme: Ideologi Perekat Masyarakat Multikultural

a. Pengertian Multikulturalisme

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Seperti dikemukakan oleh Liliweri (2005: 68) yaitu bahwa studi tentang masyarakat majemuk selalu menggambarkan bahwa multikulturalisme merupakan "ideologi" dari sebuah masyarakat multikultur.

Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mosaik tersebut. Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah".

Walaupun multikulturalisme itu telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia tetapi bagi pada umumnya orang Indonesia masa kini multikulturalisme adalah sebuah konsep asing. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan

golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Menurut kamus ensiklopedi Wikipedia, multikulturalisme adalah sebuah filosofi terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosialpolitik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara.

Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan di antara para ahli harus dipersamakan atau setidaknya tidak dipertentangkan antara satu konsep seorang ahli dengan konsep lainnya. Karena multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Yang juga harus kita perhatikan bersama untuk kesamaan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu operasional melalui pranata-pranata sosial.

Sebagai sebuah ide atau ideologi multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antar-manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.

Multikulturalisme pada mulanya adalah terminologi dalam disiplin antropologi. Tetapi, sebagaimana lazimnya, istilah dan konsep dalam sebuah cabang ilmu kemudian digunakan juga dalam cabang ilmu lain dengan makna dan tujuan yang sudah bergeser, maka penjernihan istilah dan konsep sangat perlu untuk menghindari bias pemahaman. Ada beberapa istilah lain yang secara konseptual tampak mirip dengan terminologi multikulturalisme tetapi sebenarnya beda. Misalnya, pluralisme, diversitas, heterogenitas atau yang sering disebut saja dengan istilah "masyarakat majemuk". Selain itu,

multikulturalisme adalah sebuah perangkat analisis terhadap realitas kebudayaan sebagai pilihan lain di luar beberapa pendekatan seperti asimilasionisme dan diferensialisme.

Masyarakat majemuk (*plural society*) berbeda dengan keragaman budaya atau multikulturalitas (*plural cultural*). Masyarakat majemuk lebih menekankan soal etnisitas atau suku bangsa yang pada gilirannya membangkitkan gerakan etnosentrisme dan etnonasionalisme. Sifatnya sangat askriptif dan primordial. Bahaya chauvinisme sangat potensial. Karena wataknya yang sangat mengagungkan ciri stereotip kesukubangsaan, anggotanya memandang masyarakat lain dengan cara pandang seperti itu juga. Masyarakat majemuk dengan demikian selalu mengeram konflik dalam dirinya yang setiap saat siap mewujudkan baik secara halus lewat kata-kata sindiran maupun secara kasar melalui tindakan kekerasan.

Bahaya rasialisme juga bermula dari sini. Jati diri seseorang dianggap sebagai sesuatu yang terbawa dengan sendirinya dengan berbagai kebenarannya yang niscaya tanpa perlu digugat (*taken for granted*). Setiap suku menganggap kelompoknya lebih unggul, begitu juga budayanya. Seseorang kemudian diperlakukan berdasarkan asal usul kesukuannya, keyakinannya, kebudayaannya. Perbedaan dianggap sebagai sesuatu yang bukan cuma tidak terjembatani, tetapi bahkan memang tidak boleh dijembatani. Ada kecemasan dan ketakutan akan hancurnya dan lenyapnya hakikat serta jati diri suatu suku jika jembatan dibangun. Dialog dan komunikasi menjadi dua hal yang muskil. Hanya satu jalan untuk meluluhkan arogansi etnik seperti itu yaitu dengan kekuatan koersif penguasa yang lebih tinggi. Seperti itulah yang dipraktikkan selama rezim Orde Baru. Akibatnya, lahirlah generasi yang menghayati hidup penuh kebohongan dan amarah terpendam yang tinggal menunggu waktu meledak. Dapat disaksikan sendiri bukti empiris kostanta ini terutama pada era pascareformasi.

Berbeda dengan konsep dan perspektif masyarakat majemuk, konsep multikulturalisme memandang hakikat kemanusiaan sebagai sesuatu yang universal dan oleh karenanya sama. Tetapi ketika bicara soal cara hidup (*way of life*), aturan berpikir (*rule of thinking*), dan pendirian atau prinsip hidup (*state of mind*), multikulturalisme justru melihat bahwa sungguh tidak adil kalau realitas keanekaan itu dinafikan entah dengan cara apa pun.

Perbedaan dipandang sebagai kesempatan untuk memanifestasikan hakikat sosial dan sosiabilitas manusia dengan dialog dan komunikasi. Masyarakat yang hidup dalam perspektif ini sangat mementingkan dialektika yang kreatif.

Watak masyarakat multikulturalis adalah toleran. Mereka hidup dalam semangat *peaceful co-existence*, hidup berdampingan secara damai. Setiap entitas sosial dan budaya masih tetap membawa serta jati dirinya, tidak terlebur kemudian hilang, tetapi juga tidak diperlihatkan sebagai kebanggaan melebihi penghargaan terhadap entitas lain. Dalam perspektif multikulturalisme ini, baik individu maupun kelompok dari berbagai entitas etnik dan budaya hidup dalam societal cohesion tanpa kehilangan identitas etnik dan kultur mereka. Masyarakat bersatu dalam ranah sosial tetapi antar-entitas tetap ada jarak. Prinsipnya, aku bisa bersatu dengan engkau, tetapi antara kita berdua tetap ada jarak. Aku hanya bisa menjadi aku dalam arti sepenuhnya dengan “menjadi satu dengan engkau”, begitu sebaliknya, tetapi tetap saja antara aku dan engkau ada jarak. Jarak itu harus kita jaga dengan komunikasi, dialog dan toleransi yang kreatif.

Multikulturalisme adalah sebuah perspektif alternatif untuk mengatasi pertentangan dan konflik sosial bernuansa etnis, agama, ras dan berbagai identitas primordial lainnya. Selain pendekatan ini terdapat beberapa pendekatan lain yang perlu diuraikan di sini secara sepintas. Dengan membandingkan multikulturalisme dengan pendekatan lain tersebut selain dengan konsep “masyarakat majemuk yang telah diuraikan di atas bisa diperoleh gambaran apakah multikulturalisme memang lebih unggul atau ideal untuk digunakan sebagai perangkat analisis.

Menurut Anthony Giddens (Sociology, 1995), terdapat tiga model pendekatan untuk pengembangan relasi etnik atau entitas lain di masa depan, yaitu asimilasi, *melting pot*, dan pluralisme kultural (multikulturalisme). Pembagian yang mirip dengan ini digambarkan oleh Maria Hartiningsih (Kompas, 14 Maret 2001) dan Parsudi Suparlan (Media Indonesia, 10 Desember 2001) yaitu asimilasionisme, diferensialisme, dan multikulturalisme. Dalam pendekatan asimilasionisme, terdapat pemilahan atas mayoritas dan minoritas. Minoritas melebur ke dalam mayoritas. Semua karakteristik khas yang melekat dalam entitas minoritas kemudian hilang ditelan karakteristik mayoritas. Di sinilah mitos pengorbanan menemukan

pembenarannya. Asumsinya, dengan pembauran tersebut konflik dapat diredam.

Berbeda dengan asimilasionisme yang menyuburkan hegemoni mayoritas, pendekatan diferensialisme justru membiarkan semua entitas itu tumbuh. Tetapi, kontak, komunikasi, dialog sama sekali dihapus atau dihilangkan. Tak ada ruang untuk interaksi sosial. Konflik dihindari bukan dengan melenyapkan salah satu entitas, tetapi dengan membangun tembok tinggi antara berbagai entitas tersebut. Masyarakat dikotak-kotakkan. Contoh empiris yang menyajikan eksekutif pendekatan seperti ini adalah politik apartheid di Afrika Selatan pra-Mandela. Kejahatan genosida dan pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) juga mendapatkan pembenarannya di atas konsep seperti ini.

Sementara, yang dimaksudkan dengan *melting pot* adalah pencampuran berbagai kebudayaan atau entitas melebur menjadi sesuatu yang baru. Konsep ini bisa dianalogikan dengan konsep “senyawa” dalam ilmu kimia. Misalnya, unsur H (hidrogen) direaksikan dengan unsur O (oksigen) dengan ukuran (dalam ilmu kimia diistilahkan “mol”) tertentu akan menghasilkan H₂O yang sering kita sebut sebagai air. Ia lebih dari sekadar sebuah larutan (misalnya larutan air dan gula yang kedua unsurnya masih bisa dirasakan kendati sudah menyatu), apa lagi dari sekadar campuran (misalnya tanah dan air dicampur, di mana kedua unsurnya tidak menyatu dan sangat mudah dipilah dan dibedakan). Dalam sejarah dunia, kita mengenal adanya kebudayaan Helenisme zaman Aleksander Agung yang merupakan persenyawaan kebudayaan Yunani dengan kebudayaan wilayah-wilayah taklukannya. Giddens mencontohkan kebudayaan Anglo-Saxon Amerika untuk menggambarkan model *melting pot* ini.

Ternyata dari berbagai pendekatan tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan. Pendekatan multikulturalisme pun memiliki kekurangan selain kelebihan yaitu sangat rentan dengan bahaya diskriminatif, bahkan oleh orang semacam Dr. Gary Hull, pendekatan ini justru *contradictio in terminis* dan sarat paradoks. “*Distinct but equal*”, berbeda tetapi sama. Tetapi, bagaimanapun, pendekatan ini jauh lebih memadai daripada berbagai pendekatan lainnya. Giddens sendiri menganjurkan untuk memadukan ketiga pendekatan asimilasi, *melting pot*, dan multikulturalisme, tetapi seperti apa

bentuknya, belum jelas. Selain itu, perlu dipahami bahwa kecurigaan dan keraguan terhadap multikulturalisme lebih diakibatkan oleh bergesernya wacana tersebut dari memandangnya sebagai pendekatan intelektual dan eksistensial ke pendekatan politik semata. Ketika dipandang sebagai pendekatan politik, ia tidak bisa luput dari bias. Padahal, cukup dipahami secara sederhana saja bahwa inti multikulturalisme adalah relasi makna yang saling bersentuhan untuk mencapai pemahaman yang utuh dan komprehensif atas berbagai kultur.

b. Sejarah Multikulturalisme

Kalau dilihat apa yang terjadi di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa Barat maka sampai dengan Perang Dunia ke-2 masyarakat-masyarakat tersebut hanya mengenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan Kulit Putih yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat-masyarakat tersebut digolongkan sebagai minoritas dengan segala hak-hak mereka yang dibatasi atau dikebiri.

Pada pertengahan abad ke-19 imigran asal Irlandia yang beragama Katolik didiskriminasi secara politik, sosial, dan ekonomi oleh golongan White Anglo-Saxon Protestant (WASP) yang mengaku sebagai suku bangsa asli Amerika (Budianta, 2004: 22-26). Orang-orang Cina di Pantai Barat menjadi sasaran pelecehan hukum dan sosial pada akhir abad ke-19. Selama Perang Dunia II warga Amerika keturunan Jepang dikirim ke kemah-kemah gurun pasir dengan tuduhan palsu. Pada paruh pertama abad ke-20 hukum imigrasi bersifat sangat rasis. Orang-orang Asia dilarang masuk ke Amerika atau menjadi warga negara. Tindakan-tindakan diskriminatif menimpa bukan hanya ras minoritas, melainkan juga golongan-golongan minoritas lainnya. Pemerintah Federal tercatat pernah memenjarakan para Pendeta Mormon karena dianggap mempunyai kepercayaan yang aneh dan merendahkan martabat. Kaum perempuan yang mencapai separuh populasi pun direndahkan secara hukum dan sosial.

Di Amerika Serikat berbagai gejolak untuk persamaan hak bagi golongan minoritas dan kulit hitam serta kulit berwarna mulai muncul di akhir tahun 1950an. Puncaknya adalah pada tahun 1960an dengan dilarangnya perlakuan diskriminasi oleh orang Kulit Putih terhadap orang Kulit Hitam dan

Kulit Berwarna di tempat-tempat umum, perjuangan hak-hak sipil, dan dilanjutkannya perjuangan hak-hak sipil ini secara lebih efektif melalui berbagai kegiatan *affirmative action* atau diskriminasi terbalik yang membantu mereka yang tergolong sebagai yang terpuruk dan minoritas untuk dapat mengejar ketinggalan mereka dari golongan Kulit Putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam berbagai bidang pekerjaan dan usaha.

Pada tahun 1970-an upaya-upaya untuk mencapai kesederajatan dalam perbedaan mengalami berbagai hambatan, karena corak kebudayaan Kulit Putih yang Protestan dan dominan itu berbeda dari corak kebudayaan orang Kulit Hitam, orang Indian atau Pribumi Amerika, dan dari berbagai kebudayaan bangsa dan sukubangsa yang tergolong minoritas. Hal yang dilakukan oleh para cendekiawan dan pejabat pemerintah yang pro demokrasi dan HAM, dan yang antirasisme dan diskriminasi adalah dengan cara menyebarkan konsep multikulturalisme dalam bentuk pengajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah di tahun 1970an. Bahkan anak-anak Cina, Meksiko, dan berbagai golongan sukubangsa lainnya dewasa ini dapat belajar dengan menggunakan bahasa ibunya di sekolah sampai dengan tahap-tahap tertentu. Jadi kalau Glazer (1997) mengatakan bahwa '*we are all multiculturalists now*' dia menyatakan apa yang sebenarnya terjadi pada masa sekarang ini di Amerika Serikat, dan gejala tersebut adalah produk dari serangkaian proses-proses pendidikan multikulturalisme yang dilakukan sejak tahun 1970an (Suparlan, 2001).

Multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara-bangsa (*nation-state*) sejak awal abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif (istilah 'monokultural' juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud (*pre-existing homogeneity*)). Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru.

Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa-Inggris (*English-speaking countries*), yang dimulai di Kanada pada tahun 1971. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni

Eropa, sebagai kebijakan resmi, dan sebagai konsensus sosial di antara para elit. Namun beberapa tahun belakangan, sejumlah negara Eropa, terutama Belanda dan Denmark, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan monokulturalisme. Pengubahan kebijakan tersebut juga mulai menjadi subyek debat di Britania Raya dan Jerman, dan beberapa negara lainnya.

6. Multikulturalisme di Indonesia

a. Multikulturalisme dan Kesederajatan

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individual maupun secara kelompok, dan terutama ditujukan terhadap golongan sosial askriptif yaitu sukubangsa, ras, gender, dan umur. Ideologi multikulturalisme ini secara bergandengan tangan saling mendukung dengan proses-proses demokratisasi, yang pada dasarnya adalah kesederajatan pelaku secara individual (HAM) dalam berhadapan dengan kekuasaan dan komunitas atau masyarakat setempat.

Upaya penyebarluasan dan pemantapan serta penerapan ideologi multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, mau tidak mau harus bergandengan tangan dengan upaya penyebaran dan pemantapan ideologi demokrasi dan kebangsaan atau kewarganegaraan dalam porsi yang seimbang. Sehingga setiap orang Indonesia nantinya, akan mempunyai kesadaran tanggung jawab sebagai orang warga negara Indonesia, sebagai warga sukubangsa dan kebudayaannya, tergolong sebagai gender tertentu, dan tergolong sebagai umur tertentu yang tidak akan berlaku sewenang-wenang terhadap orang atau kelompok yang tergolong lain dari dirinya sendiri dan akan mampu untuk secara logika menolak diskriminasi dan perlakuan sewenang-wenang oleh kelompok atau masyarakat yang dominan. Program penyebarluasan dan pemantapan ideologi multikulturalisme ini pernah diwacanakan untuk dilakukan melalui pendidikan dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, dan juga Strata-1 Universitas. Melalui kesempatan ini saya juga ingin mengusulkan bahwa ideologi multikulturalisme seharusnya juga disebarluaskan dan dimantapkan melalui program-program yang diselenggarakan oleh LSM yang sejenis.

Mengapa perjuangan anti-diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas dilakukan melalui perjuangan menuju masyarakat multikultural? Karena perjuangan antidiskriminasi dan perjuangan hak-hak hidup dalam kesederajatan dari minoritas adalah perjuangan politik, dan perjuangan politik adalah perjuangan kekuatan. Perjuangan kekuatan yang akan memberikan kekuatan kepada kelompok-kelompok minoritas sehingga hak-hak hidup untuk berbeda dapat dipertahankan dan tidak didiskriminasi karena digolongkan sebagai sederajat dari mereka yang semula menganggap mereka sebagai dominan. Perjuangan politik seperti ini menuntut adanya landasan logika yang masuk akal di samping kekuatan nyata yang harus digunakan dalam penerapannya. Logika yang masuk akal tersebut ada dalam multikulturalisme dan dalam demokrasi.

Upaya yang telah dan sedang dilakukan terhadap lima kelompok minoritas di Indonesia oleh LSM, untuk meningkatkan derajat mereka, mungkin dapat dilakukan melalui program-program pendidikan yang mencakup ideologi multikulturalisme dan demokrasi serta kebangsaan, dan berbagai upaya untuk menstimuli peningkatan kerja produktif dan profesi. Sehingga mereka itu tidak lagi berada dalam keterbelakangan dan ketergantungan pada kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat setempat di mana kelompok minoritas itu hidup.

b. Membangun Multikulturalisme Indonesia

Sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya—yang kemudian diikuti dengan masa yang disebut sebagai “era reformasi”, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Krisis moneter, ekonomi dan politik yang bermula sejak akhir 1997, pada gilirannya juga telah mengakibatkan terjadinya krisis sosio-kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Jalinan tenun masyarakat (*fabric of society*) kelihatan tercabik-cabik akibat berbagai krisis yang melanda masyarakat.

Krisis sosial budaya yang meluas itu dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi banyak kalangan masyarakat kita, misalnya: disintegrasi sosial-politik yang bersumber dari euforia kebebasan yang nyaris kebablasan; lenyapnya kesabaran sosial (*social temper*) dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah mengamuk dan

melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarki; merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial; semakin meluasnya penyebaran narkoba dan penyakit-penyakit sosial lainnya; berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bersumber—atau sedikitnya bernuansa politis, etnis dan agama seperti terjadi di berbagai wilayah Aceh, Kalimantan Barat dan Tengah, Maluku Sulawesi Tengah, dan lain-lain.

Disorientasi, dislokasi atau krisis sosial-budaya di kalangan masyarakat kita semakin merebak dengan kian meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya Barat—khususnya Amerika—sebagai akibat proses globalisasi yang terus tidak terbendung. Berbagai ekspresi sosial budaya yang sebenarnya “*alien*” (asing), yang tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya dalam masyarakat kita, semakin menyebar pula dalam masyarakat kita sehingga memunculkan kecenderungan-kecenderungan “gaya hidup” baru yang tidak selalu sesuai, positif dan kondusif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat dan bangsa (cf. al-Roubaie 2002). Hal ini misalnya bisa dilihat dari semakin merebaknya budaya “McDonald”, makanan instan lainnya dan, dengan demikian, budaya serba instan; meluasnya budaya telenovela, yang menyebarkan permisifisme, kekerasan, dan hedonisme; mewabahnya MTVisasi, “*Valentine’s day*”, dan kini juga “*Prom’s Night*” (malam pesta dansa) di kalangan remaja. Meminjam ungkapan Edward Said, gejala ini tidak lain daripada “*cultural imperialism*” baru, menggantikan imperialisme klasik yang terkandung dalam “*Orientalisme*”.

Dari berbagai kecenderungan ini, maka orang bisa menyaksikan kemunculan kultur *hybrid*, budaya gado-gado tanpa identitas, di Indonesia dewasa ini. Pada satu segi, kemunculan budaya hybrid nampaknya tidak terelakkan, khususnya karena proses globalisasi yang semakin sulit dihindari. Tetapi pada segi lain, budaya *hybrid*—apalagi yang bersumber dari dan didominasi budaya luar, karena dominasi dan hegemoni politik, ekonomi dan informasi mereka—dapat mengakibatkan krisis budaya nasional dan lokal lebih lanjut. Tidak hanya itu, budaya *hybrid* dapat mengakibatkan lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal; padahal identitas nasional dan lokal tersebut sangat mutlak bagi terwujudnya integrasi sosial, kultural dan politik masyarakat dan negara-bangsa Indonesia.

c. Pluralitas dan Multikulturalisme: Bhinneka Tunggal Ika

Pluralisme kultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura, sebagaimana dikemukakan Hefner (2001:4) sangat mencolok; terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu. Karena itulah dalam teori politik Barat sepanjang dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini khususnya Indonesia dipandang sebagai “lokus klasik” bagi konsep “masyarakat majemuk/plural” (*plural society*) yang diperkenalkan ke dunia Barat oleh JS Furnival (1944, 1948).

Menurut Furnivall, “masyarakat plural” adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal (Furnivall 1944:446). Teori Furnivall ini banyak berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif “homogen”, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, rasial, agama dan gender. Berdasarkan kerangka sosial-kultural, politik dan pengalaman Eropa, Furnivall memandang masyarakat-masyarakat plural Asia Tenggara, khususnya Indonesia, akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan bentuk federasi pluralis yang memadai (Furnivall 1944:468-9).

Meski demikian, berbeda dengan “*doomed scenario*” Furnivall, masyarakat-masyarakat plural Asia Tenggara, khususnya Indonesia, pada akhirnya setelah Perang Dunia II dapat menyatu dalam satu kesatuan unit politik tunggal. Tetapi, harus diakui, kesatuan politik tidak menghilangkan realitas pluralitas sosial-budaya yang bukannya tidak sangat divisif, khususnya jika negara-bangsa baru seperti Indonesia gagal menemukan “*common platform*” yang dapat mengintegrasikan berbagai keragaman itu. Padahal, pada saat yang sama, kemerdekaan yang dicapai negara-negara baru ini mendorong bangkitnya sentimen etno-religius yang dapat sangat eksplosif, karena didorong semangat yang bernyala-nyala untuk mengontrol kekuasaan (Geertz 1973).

Berhadapan dengan tantangan untuk tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga eksistensi negara-bangsa (*nation building*) yang mengandung keragaman tersebut, maka para penguasa negara-negara baru

ini memiliki kecenderungan kuat untuk melaksanakan politik “keseragaman budaya” (monokulturalisme atau “*monoculturality*”). Pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno dan masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada penerapan politik monokulturalisme.

Secara restrospektif, politik mono-kulturalisme atau monokulturalitas yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru atas nama stabilitas untuk *developmentalism* telah menghancurkan kearifan budaya lokal (*local cultural geniuses*), seperti tradisi “pela-gandong” di Ambon, “republik nagari” di Sumatera Barat dan lain-lain. Padahal, sistem atau tradisi sosio-kultural lokal seperti ini merupakan kekayaan kultural yang tidak ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat-masyarakat lain. Lebih jauh lagi, kearifan lokal juga berfungsi sebagai mekanisme pelestarian (*defense mechanism*) dan sekaligus sistem peringatan dini (*early warning system*) yang dapat mengantisipasi ancaman terhadap keutuhan tradisi dan sistem sosio-kultural dan, dengan demikian, memelihara integrasi dan keutuhan sosio-kultural masyarakat bersangkutan. Politik monokulturalisme yang telah menghancurkan kearifan lokal ini, pada gilirannya mengakibatkan terjadinya kerentanan dan disintegrasi sosial-budaya lokal. Konflik dan kekerasan yang bernuansa etnis dan agama yang khususnya marak sejak 1996 tidak terlepas dari hancurnya kearifan lokal tersebut.

Tetapi penting dicatat, dari perspektif politik Indonesia, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa Orde Baru memaksakan “monokulturalisme”, monokulturalitas, keseragaman, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang pada hakikatnya multi-kultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi pula peningkatan gejala “provinsialisme” atau “kabupatenisme” yang hampir tumpang tindih dengan “etnisitas”. Kecenderungan ini, jika tidak terkendali dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosial-kultural lebih lanjut, tetapi juga disintegrasi politik.

Sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan kenyataan yang sulit diingkari, bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari sejumlah besar

kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain, sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat “multikultural”. Realitas Indonesia seperti itu, cocok dengan definisi Parekh (1997:167) bahwa, *“just as society with several religions or languages is multi religious or multi lingual, a society containing several cultures is multicultural”*. Karena itu, sekali lagi, sebagaimana dirumuskan Parekh, bahwa *“a multicultural society, then, is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conceptions of the world, systems of meaning, values, forms of social organization, histories, customs and practices”*.

Pengertian “multikulturalisme” yang diberikan para ahli sangat beragam. Sebagaimana diisyaratkan terdahulu dan juga nanti di bawah, “multikulturalisme” pada dasarnya adalah pandangan dunia yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam *“politics of recognition”*.

Dengan pengertian yang beragam dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktek multikulturalisme, maka Parekh (1997:183-185) membedakan lima macam multikulturalisme. Tentu saja pembagian kelima bentuk multikulturalisme itu tidak “kedap air” (*watertight*), sebaliknya bisa tumpang tindih dalam segi-segi tertentu.

Pertama, “multikulturalisme isolasionis” yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Contoh-contoh kelompok ini adalah seperti masyarakat yang ada pada sistem *“millet”* di Turki Usmani atau masyarakat Amish di AS. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya.

Kedua, “multikulturalisme akomodatif”, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang,

hukum dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka; sebaliknya kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme akomodatif ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lain.

Ketiga, “multikulturalisme otonomis”, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. *Concern* pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. Jenis multikulturalisme didukung misalnya oleh kelompok Quebecois di Kanada, dan kelompok-kelompok Muslim imigran di Eropa, yang menuntut untuk bisa menerapkan syariat, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam, dan sebagainya.

Keempat, “multikulturalisme kritis” atau “interaktif”, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu *concern* dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif keistimewaan mereka. Kelompok budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha secara paksa untuk menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas. Karena itulah kelompok-kelompok minoritas menantang kelompok kultur dominan, baik secara intelektual maupun politis, dengan tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan secara bersama-sama sebuah kultur kolektif baru yang egaliter secara genuine. Jenis multikulturalisme, sebagai contoh, diperjuangkan masyarakat Kulit Hitam di Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain.

Kelima, “multikulturalisme kosmopolitan”, yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan patuh kepada budaya tertentu dan, sebaliknya, secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural

dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Para pendukung multikulturalisme jenis ini yang sebagian besar adalah intelektual diasporik dan kelompok-kelompok liberal yang memiliki kecenderungan *postmodernist* memandang seluruh budaya sebagai sumber daya yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas.

d. Multikulturalisme Demokratis; Basis Kewargaan

Memandang berbagai kerangka konseptual tentang masyarakat multikultural dan multikulturalisme, maka pandangan dunia “multikultural” secara substantif sebenarnya tidaklah terlalu baru di Indonesia; jejak dan reminiscent kelima bentuk multikulturalisme yang baru saja dikemukakan dapat juga ditemukan di Indonesia.

Prinsip Indonesia sebagai negara “bhinneka tunggal ika” mencerminkan bahwa meskipun Indonesia adalah multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam keikaan, kesatuan. Tetapi, sekali lagi, meski Indonesia pada dasarnya adalah masyarakat multikultural, namun paradigma multikulturalisme, apalagi multikulturalisme demokratis yang memiliki konotasi politis merupakan sesuatu yang baru. Kebaruan konsep “multikulturalisme” itu sebenarnya tidak hanya pada tingkat nasional, bahkan juga pada tingkat internasional. Seperti dicatat Kelly dalam pengantarnya (2002:1), “*multiculturalism is a recent phenomenon in political and social theory: the standar works are no more than twenty years old*”.

Realitas Indonesia yang “multikultural” berhadapan dengan berbagai masalah dalam masa reformasi sekarang, maka terlihat adanya kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali “kebudayaan nasional Indonesia” yang dapat menjadi “*integrating force*” yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut. Pembentukan masyarakat multi-kultural Indonesia yang demokratis tidak bisa secara *taken for granted* atau coba-coba. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan. Salah satu langkah yang paling strategis dalam hal ini adalah melalui pendidikan multi-kultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, dan bahkan informal dalam masyarakat luas.

Kebutuhan dan urgensi pendidikan multikultural demokratis setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir dirasakan semakin mendesak bagi negara-bangsa multikultural lainnya. Di beberapa negara Barat, seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat dan lain-lain, yang sejak usainya Perang Dunia II semakin “multikultural” karena proses migrasi penduduk luar ke negara-negara tersebut (Hefner, 2001:2-3), pendidikan multikultural telah menemukan momentumnya sejak dasawarsa 1970-an, setelah sebelumnya di AS misalnya dikembangkan “pendidikan interkultural”. Berhadapan dengan meningkatnya “multikulturalisme” di negara-negara tersebut, maka paradigma, konsep dan praktek pendidikan “multikultural” semakin relevan dan tepat waktu.

Pada pihak lain, gagasan pendidikan multikultural merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Meski belakangan ini sudah mulai muncul suara-suara yang mengusulkan pendidikan multikultural tersebut di tanah air, tidak berkembang wacana publik tentang subjek ini. Pembahasan dan literatur mengenai subyek ini sangat terbatas. Padahal, realitas kultural dan perkembangan terakhir kondisi sosial, politik, dan budaya bangsa, khususnya sejak “era reformasi” yang penuh dengan gejolak sosial-politik dan konflik dalam berbagai level masyarakat, membuat pendidikan multikultural demokratis terasa semakin dibutuhkan.

Keragaman, atau kebhinnekaan atau multikultural merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan Indonesia di masa silam, lebih-lebih lagi pada masa kini dan di waktu-waktu mendatang. Multikulturalisme, perlu ditegaskan kembali, secara sederhana dapat pula dipahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya, tidak ada satu negarapun yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal.

Tetapi penting dicatat, sebagaimana dikemukakan di atas keragaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal. Dan lebih jauh, komitmen untuk mengakui keragaman sebagai salah satu ciri dan karakter utama masyarakat-masyarakat dan negara-bangsa, seperti Indonesia, tidaklah berarti ketercerabutan, relativisme kultural, kekacauan sosial (*social disruption*) atau konflik berkepanjangan pada setiap komunitas, masyarakat dan kelompok etnis dan rasial. Sebab, pada saat yang sama sesungguhnya

juga terdapat simbol-simbol, nilai-nilai, struktur-struktur dan lembaga-lembaga dalam kehidupan bersama yang mengikat berbagai keragaman tadi. Semuanya ini, terutama lembaga-lembaga, struktur-struktur, dan bahkan pola tingkah laku (*patterns of behavior*) memiliki fokus terhadap kolaborasi, kerjasama, mediasi dan negosiasi perbedaan-perbedaan dan, dengan demikian, untuk menyelesaikan konflik yang potensial muncul dan berkembang sewaktu-waktu. Dengan demikian, mereka menekankan pada kehidupan bersama, saling mendukung dan menghormati satu sama lain dalam berbagai hak dan kewajiban personal maupun komunal, dan lebih jauh lagi masyarakat nasional.

Pada tahap ini, komitmen terhadap nilai-nilai tidak dapat dipandang berkaitan hanya dengan eksklusivisme personal dan sosial, atau dengan superioritas kultural, tetapi lebih jauh lagi dengan kemanusiaan (*humanness*), komitmen dan kohesi kemanusiaan termasuk di dalamnya melalui toleransi, saling menghormati hak-hak personal dan komunal. Manusia, ketika berhadapan dengan simbol-simbol, doktrin-doktrin, prinsip-prinsip dan pola-pola tingkah laku, sesungguhnya mengungkapkan dan sekaligus mengidealisasikan komitmen kepada kemanusiaan, baik secara personal maupun komunal dan kebudayaan yang dihasilkannya.

Dalam konteks ini, multikulturalisme demokratis dapat pula dipahami sebagai “kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia multikulturalisme demokratis seperti ini dapat dipandang sebagai titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban. Di sini, multikulturalisme demokratis dapat dipandang sebagai landasan budaya (*cultural basic*) bagi kewargaan, kewarganegaraan, dan pendidikan.

Multikulturalisme demokratis sebagai landasan budaya, lebih jauh lagi, terkait erat dengan pencapaian *civility* (keadaban) yang sangat esensial bagi demokrasi yang berkeadaban dan keadaban yang demokratis (*democratic civility*). Dalam upaya penumbuhan dan pengembangan *democratic civility*, maka *civil society* (CS) dan pendidikan menduduki peran sangat instrumental.

Namun penting diingatkan, terdapat persepsi dalam masyarakat untuk secara *taken for granted* menerima bahwa *civil society* selalu mendorong keadaban dan demokrasi. Padahal, terdapat kecenderungan, bahwa *civil society* terorganisasi berdasarkan distingsi sosial, budaya, etnis, dan agama

sehingga cenderung eksklusif dan merasa paling benar sendiri yang pada akhirnya menjadi kontra-produktif tidak hanya terhadap multikulturalisme, tetapi juga bahkan terhadap demokrasi. Karena itu, dalam hal *civil society* seperti ini, perlu pengembangan sikap inklusif, toleran, dan respek terhadap pluralitas. Pada saat yang sama, juga terdapat sangat banyak *civil society* yang mengatasi berbagai garis demarkasi tersebut, menjadi organisasi yang melintas batas-batas etnis, agama dan sosial, sehingga pada gilirannya dapat menjadi “social and cultural capital” yang esensial bagi pengembangan dan pemberdayaan civilitas dan demokrasi yang berkeadaban (cf. Hefner 2001:9-10).

Dalam konteks pengembangan *civil society* yang benar-benar dapat menjadi modal sosial-budaya (*social and cultural capital*) bagi keadaban dan demokrasi, maka pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting. Tidak perlu uraian panjang lebar, modal sosial-budaya sangat krusial dan instrumental bagi terwujudnya kohesi sosial-budaya (*social and cultural cohesiveness*) dan, pada gilirannya, integrasi negara-bangsa. Sebaliknya, negara-bangsa dan masyarakat akan mengalami disintegrasi jika tidak memiliki modal sosial-budaya. Dalam kerangka pengembangan modal sosial-budaya, diperlukan tidak hanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai nilai sosial-budaya, tetapi juga pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa-bernegara. Di sinilah terletak peran instrumental pendidikan.

Untuk penumbuhan dan pengembangan modal sosial-budaya melalui pendidikan, maka pendidikan kewargaan (*civic education*) menjadi sebuah keharusan. Keadaban dan demokrasi, sekali lagi, tak bisa dicapai secara coba-coba (*trial and error*) atau diperlakukan secara *taken for granted*; sebaliknya justru harus diprogramkan secara konseptual dan komprehensif pada setiap jenjang pendidikan, dan pada setiap lembaga pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal. Melalui *Civic Education* dapat ditumbuhkan tidak hanya pemahaman lebih benar tentang demokrasi, HAM, pluralitas, dan respek dan toleransi di antara berbagai komunitas, tetapi juga pengalaman berdemokrasi keadaban (Azra 2002).

e. Memahami Psikologi Masyarakat Indonesia: Upaya Menjembatani Permasalahan Silang Budaya

Dalam konsep yang paling dominan kebudayaan dapat dimaknai sebagai fenomena material, sehingga menurut faham ini pemahaman dan pemaknaan kebudayaan lebih banyak dicermati sebagai keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1996 : 193). Sejalan dengan pengertian tersebut maka tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat akan terikat oleh kebudayaan yang terlihat wujudnya dalam berbagai pranata yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol bagi tingkah laku manusia (Geertz, 1973), kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial, oleh para anggota suatu masyarakat. Sehingga suatu kebudayaan bukanlah hanya akumulasi dari kebiasaan (*folkways*) dan tata kelakuan (*mores*) tetapi suatu sistem perilaku yang terorganisasi.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya secara logis akan mengalami berbagai permasalahan, persentuhan antar budaya akan selalu terjadi karena permasalahan silang budaya selalu terkait erat dengan curural materialisme yang mencermati budaya dari pola pikir dan tindakan dari kelompok sosial tertentu dimana pola temperamen ini banyak ditentukan oleh faktor keturunan (*genetic*), ketubuhan dan hubungan sosial tertentu. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan menjadi acuan sikap dan perilaku manusia sebagai makhluk individual yang tidak terlepas dari kaitannya pada kehidupan masyarakat dengan orietasi kebudayaannya yang khas, sehingga baik pelestarian maupun pengembangan nilai-nilai budaya merupakan proses yang bermatra individual, sosial dan cultural sekaligus.

Dalam kenyataan persentuhan nilai-nilai budaya sebagai manifestasi dinamika kebudayaan tidak selamanya berjalan secara mulus. Permasalahan silang buaya dalam masyarakat majemuk (heterogen) dan jamak (pluralistis) seringkali bersumber dari masalah komunikasi, kesenjangan tingkat pengetahuan, status sosial, geografis, adat kebiasaan dapat merupakan kendala bagi tercapainya suatu konsensus yang perlu disepakati dan selanjutnya ditaati secara luas. Ditambah lagi dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang, akan selalu mengalami perubahan

yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, maka dengan meminjam istilah Budiono, yang menyatakan bahwa pangkal masalah dalam masyarakat Indonesia adalah : masyarakat Indonesia cenderung dapat dipandang sebagai “suatu masyarakat besar yang belum selesai”. Hal ini dapat dikembalikan pada adanya berbagai dorongan sentripetal dan sentrifugal yang bersilangan secara terus menerus naik ke permukaan secara silih berganti. Persentuhan antar budaya yang terjadi secara dinamis dalam proses tawar menawar bisa mewujudkan perubahan tata nilai yang tampil sekedar sebagai pergeseran (*shift*) antar nilai, atau peresengketaan (*conflict*) antar nilai atau bahkan dapat berupa benturan (*clash*) antar nilai tersebut. Apapun bentuk dan perwujudan dari permasalahan silang budaya, harus dapat dipandu dan dikendalikan, atau paling tidak diupayakan adanya mekanisme yang dapat menjembatani permasalahan ini, baik melalui jalur pendidikan maupun media masa.

Harus dipahami bahwa penggalian budaya nasional bukan diarahkan konformisme budaya, tetapi lebih diarahkan pada totalitas nilai dan perilaku yang mencerminkan hasrat dan kehendak masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara sehingga mempunyai dua arah pokok yaitu fungsi pelestarian dan fungsi pengembangan. Fungsi pelestarian diarahkan pada pengenalan dan pendalaman nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bersifat universal, dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang tak ternilai harganya, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan dan memperkokoh rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional. Dalam fungsi pengembangan diarahkan pada perwujudan budaya nasional yaitu perpaduan keragaman budaya tradisional ditambah dengan nilai-nilai baru yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang berlaku dalam budaya masyarakat, guna memperkaya budaya bangsa dan mempekuh jati diri dan kepribadian bangsa. Kebudayaan etnis yang kadangkala sedemikian kuat membelenggu, perlu dipahami sebagai kebudayaan sekumpulan individu yang bersatu kedalam etnis tertentu oleh karenanya permasalahan silang budaya, hanya dapat terjembatani dengan pemahaman bahwa keutuhan suatu bangsa dapat terbentuk dengan kesadaran setiap individu dan kesadaran setiap etnis yang terhimpun dalam suatu bangsa , sehingga perlu membina kesadaran individu dan kesadaran etnis sebagai himpunan individu.

Masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai ciri, adanya perubahan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan, baik perubahan system ekonomi, politik sosial dan sebagainya, dan dalam kenyataan tidak ada satupun gejala perubahan sosial yang tidak menimbulkan akibat terhadap kebudayaan setempat. Kebudayaan dianggap sebagai sumber penggalangan konformisme perilaku individu pada sekelompok masyarakat pendukung kebudayaan tersebut, karena setiap anak manusia lahir dalam suatu lingkungan alam tertentu (*nature*) dan dalam satu lingkungan kebudayaan tertentu (*culture*) yang keduanya merupakan lingkungan yang secara apriori menentukan proses pengasuhannya (*nurture*) dalam pengembangannya sebagai anak manusia, dalam proses pembelajaran, sehingga dalam kenyataan, kebudayaan cenderung mengulang-ulang perilaku tertentu melalui pola asuh dan proses belajar yang kemudian memunculkan adanya kepribadian rata-rata, atau stereotip perilaku yang merupakan ciri khas dan masyarakat tertentu yang mencerminkan kepribadian modal dalam lingkungan tersebut, dari pemahaman ini kemudian muncul stereotip perilaku pada sekelompok individu pada masyarakat tertentu..

Konsep watak kebudayaan sebagai kesamaan regularitas sifat di dalam organisasi intrapsikis individu anggota suatu masyarakat tertentu yang diperoleh karena cara pengasuhan anak yang sama di dalam masyarakat yang bersangkutan, (Margaret Mead) Apabila ini dikaitkan dengan konsep watak masyarakat (*social character*) dilandasi oleh pikiran untuk menghubungkan kepribadian tipikal dari suatu kebudayaan (watak masyarakat) dengan kebutuhan obyektif masyarakat yang dihadapi suatu masyarakat. Dalam hal ini Danandjaja (1988) ingin menggabungkan antara gagasan lama tentang sifat adaptasi pranata sosial terhadap kondisi lingkungan, dengan modifikasi karakterologi psiko analitik. Teori Erich Fromm mengenai watak masyarakat (*social character*) kendati mengakui juga asumsi dari teori lainnya mengenai transmisi kebudayaan dalam hal membentuk "kepribadian tipikal" atau kepribadian kolektif namun dia telah juga mencoba untuk menjelaskan fungsi-fungsi sosio historis dari tipe kepribadian tersebut. Yang menghubungkan kepribadian tipikal dari suatu kebudayaan dengan kebutuhan objektif yang dihadapi suatu masyarakat. Untuk memuskan

hubungan itu secara efektif suatu masyarakat perlu menerjemahkannya kedalam unsur-unsur watak (*traits*) dari individu anggotanya agar mereka bersedia melaksanakan apa yang harus mereka lakukan.

Unsur-unsur watak bersama tersebut membentuk watak masyarakat dari masyarakat tersebut melalui latihan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka, sementara orang tua telah memperoleh unsur-unsur watak tersebut baik dari orangtuanya atau sebagai jawaban langsung terhadap kondisi-kondisi perubahan masyarakat. Dalam konteks ekologi kebudayaan manusia merupakan hasil dari dua proses yang saling mengisi yaitu adanya perkembangan sebagai hasil hubungan manusia dengan lingkungan alamnya yang mendorong manusia untuk memilih cara dalam menyesuaikan diri secara aktif dan kemampuan manusia dalam berpikir metaforik sehingga dapat memperluas atau mempersempit jangkauan dari lambang-lambang dalam system arti yang berkembang sedemikian rupa sehingga lepas dari pengertian aslinya, sehingga kebudayaan secara umum diartikan sebagai kompleksitas sistem nilai dan gagasan vital yang menguasai atau merupakan pedoman bagi terwujudnya pola tingkah laku bagi masyarakat pendukungnya.

Masyarakat Indonesia dan kompleks kebudayaannya masing-masing plural (jamak) dan heterogen (anekaragam). Pluralitas sebagai kontradiksi dari singularitas mengindikasikan adanya suatu situasi yang terdiri dari kejamakan, yaitu dijumpainya berbagai sub kelompok masyarakat yang tidak bisa dikelompokkan satu dengan yang lainnya, demikian pula dengan kebudayaan mereka, sementara heterogenitas merupakan kontraposisi dari homogenitas mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidak samaan dalam unsur-unsurnya.

Hambatan-hambatan yang potensial dimiliki oleh suatu masyarakat yang plural dan heterogen juga dapat ditentukan dalam banyak aspek lainnya: Struktur sosial yang berbeda akan menghasilkan pola dan proses pembuatan keputusan sosial yang berbeda, pluralitas dan heterogenitas seperti diuraikan di atas juga tanpa memperoleh tantangan yang sama kerasnya dengan tantangan terhadap upaya untuk mempersatukannya melalui konsep negara kesatuan yang mengimplikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara sentralistik.

Masyarakat Indonesia yang majemuk yang terdiri dari berbagai budaya, karena adanya berbagai kegiatan dan pranata khusus dimana setiap kultur merupakan sumber nilai yang memungkinkan terpeliharanya kondisi kemapanan dalam kehidupan masyarakat pendukungnya, setiap masyarakat pendukung kebudayaan (*culture bearers*) cenderung menjadikan kebudayaannya sebagai kerangka acuan bagi peri kehidupannya yang sekaligus untuk mengukuhkan jati diri sebagai kebersamaan yang berciri khas (Fuad Hassan, 1998). Sehingga perbedaan antar kebudayaan, justru bermanfaat dalam mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat tersebut. Pluralisme masyarakat dalam tatanan sosial agama, dan suku bangsa telah ada sejak jaman nenek moyang, kebhinekaan budaya yang dapat hidup berdampingan secara damai merupakan kekayaan yang tak ternilai dalam khasanah budaya nasional karena diunggulkannya suatu nilai oleh seseorang atau sekelompok masyarakat, bukan berarti tidak dihiraukannya nilai-nilai lainnya melainkan kurang dijadikannya sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku dibandingkan dengan nilai yang diunggulkannya. Sehingga permasalahan multikultural justru merupakan suatu keindahan bila identitas masing-masing budaya dapat bermakna dan diagungkan oleh masyarakat pendukungnya serta dapat dihormati oleh kelompok masyarakat yang lain, bukan untuk kebanggaan dan sifat egoisme kelompok apalagi bila diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu misalnya digunakannya simbol-simbol budaya jawa yang “salah kaprah” untuk membangun struktur dan budaya politik yang sentralistik.

Masalah yang biasanya dihadapi oleh masyarakat majemuk adalah adanya persentuhan dan saling hubungan antara kebudayaan suku bangsa dengan kebudayaan umum lokal, dan dengan kebudayaan nasional. Diantara hubungan-hubungan ini yang paling kritis adalah hubungan antara kebudayaan suku bangsa dan umum lokal di satu pihak dan kebudayaan nasional di pihak lain. Pemaksaan untuk merubah tata nilai atau upaya penyeragaman budaya seringkali dapat memperkuat penolakan dari budaya-budaya daerah, atau yang lebih parah bila upaya mempertahankan tersebut, justru disertai dengan semakin menguatnya *Etnosentrime*. Etnosentrisme secara formal didefinisikan sebagai pandangan bahwa kelompok sendiri adalah pusat segalanya dan kelompok lain akan selalu dibandingkan dan

dinilai sesuai dengan standar kelompok sendiri. Etnosentrisme membuat kebudayaan diri sebagai patokan dalam mengukur baik buruknya, atau tinggi rendahnya dan benar atau ganjilnya kebudayaan lain dalam proporsi kemiripannya dengan kebudayaan sendiri, adanya kesetiakawanan yang kuat dan tanpa kritik pada kelompok etnis atau bangsa sendiri disertai dengan prasangka terhadap kelompok etnis dan bangsa yang lain. Orang-orang yang berkepribadian etnosentris cenderung berasal dari kelompok masyarakat yang mempunyai banyak keterbatasan baik dalam pengetahuan, pengalaman, maupun komunikasi, sehingga sangat mudah terprofokasi. Perlu pula dipahami bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada pada berbagai keterbatasan tersebut.

Ditambahkan oleh Budiono bahwa dalam masyarakat selalu bekerja dua macam kekuatan yaitu kekuatan yang ingin menerima perubahan dan kekuatan yang menolak adanya perubahan. Meskipun selalu terdapat dua kekuatan, namun sejarah memperlihatkan bahwa kaum konservatif cepat atau lambat akan terdesak untuk memberi tempat pada adanya perubahan. Proses itu seringkali tidak berjalan secara linier, tapi berjalan maju mundur. Konflik antara kaum progresif dengan kaum konservatif maupun konflik diantara kaum progresif itu sendiri. Dalam "masyarakat yang sudah selesai" konflik itu sudah ditempatkan dalam suatu mekanisme yang biasanya merupakan tatanan sosial politik yang sudah dirasionalisasikan sehingga konflik itu didorong untuk diselesaikan secara argumentatif. Sebaliknya pada masyarakat berkembang (masyarakat yang belum selesai) konflik itu biasanya berlangsung "secara liar" karena para pelakunya masih sama-sama mencari mekanisme untuk menyelesaikan/ mengatasi perbedaan-perbedaan di antara mereka secara rasional, susahnyanya dalam bersama-sama mencari mekanisme itu masing-masing kekuatan progresif itu juga berusaha untuk mencari kekuatan yang dominan, untuk mencari dan menentukan bentuk mekanisme penyelesaian, kadang-kadang bentuk mekanisme itu bisa diusahakan serasional mungkin tetapi bisa saja terjadi bahwa usaha-usaha itu dipadu dengan pemaksaan fisik.

Dengan pemahaman pada fenomena tersebut landasan sosial budaya masyarakat Indonesia yang bercorak pada masyarakat majemuk (*plural society*) perlu memperoleh perhatian dan dikaji kembali, karena ideologi

masyarakat majemuk lebih menekankan pada keanekaragaman suku bangsa akan sangat sulit untuk diwujudkan dalam masyarakat yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan proses-proses demokratisasi, ideologi harus digeser menjadi ideologi keanekaragaman budaya atau multikulturalisme, Kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa maka yang nampak mencolok dalam kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam komunitas-komunitas suku bangsa, dan digunakannya kesukubangsaan tersebut sebagai acuan utama bagi jati diri individu. Ada sentimen-sentimen kesuku bangsa yang memiliki potensi pemecah belah dan penghancuran sesama bangsa Indonesia karena masyarakat majemuk menghasilkan batas-batas suku bangsa yang didasari oleh stereotip dan prasangka yang menghasilkan penjenjangan sosial, secara primordial dan subjektif. Konflik-konflik yang terjadi antaretnik dan antar agama yang terjadi, sering kali berintikan pada permasalahan hubungan antara etnik asli setempat dengan pendatang, konflik-konflik itu terjadi karena adanya pengaktifan secara berlebihan jati diri etnik untuk solidaritas dalam memperebutkan sumber daya yang ada (Hamengku Buwono X. 2001).

Dengan mencermati berbagai permasalahan silang budaya dan kondisi masyarakat Indonesia, dapat ditemui adanya berbagai masalah yang ditengarai sebagai kendala penyelesaian masalah diantaranya adalah : (1) Rendahnya tingkat pengetahuan, pengalaman, dan jangkauan komunikasi sebagian masyarakat yang dapat mengakibatkan rendahnya daya tangkal terhadap budaya asing yang negatif, dan keterbatasan dalam menyerap serta mengembangkan nilai-nilai baru yang positif, sekaligus mudah sekali terprovokasi dengan isu-isu yang dianggap mengancam eksistensinya (2) Kurang maksimalnya media komunikasi dalam memerankan fungsinya sebagai mediator dan korektor informasi, (3) Paradigma pendidikan yang lebih menekankan pengembangan intelektual dengan mengabaikan pengembangan kecerdasan emosional, pembentukan sikap moral, dan penanaman nilai budaya. Manusia terbuai kegiatan dan pembangunan yang pragmatis, yang memberikan manfaat materiil yang lebih mudah teramati dan terukur, sehingga seringkali sangsi formal lebih ditakuti daripada sangsi moral. (4). Meningkatnya gejala "*societal crisis on caring*" (krisis pengasuhan

dan kepedulian dalam masyarakat) karena tingginya mobilitas sosial dan transformasi kultural yang ditangkap dan diadopsi secara terbatas.

Sejalan dengan berbagai kendala yang ada maka upaya penyelesaian permasalahan silang budaya dapat dilakukan dengan : *Pertama*, dapat dilakukan dengan **membangun kehidupan multikultural yang sehat**; dilakukan dengan meningkatkan toleransi dan apresiasi antarbudaya. Yang dapat diawali dengan peningkatan tingkat pengetahuan masyarakat tentang kebhinekaan budaya, dengan berbagai model pengenalan ciri khas budaya tertentu, terutama psikologi masyarakat yaitu pemahaman pola perilaku khusus masyarakatnya.

Kedua, **peningkatan peran media komunikasi**; untuk melakukan sensor secara substantif yang berperan sebagai korektor terhadap penyimpangan norma sosial yang dominan, dengan melancarkan tekanan korektif terhadap subsistem yang mungkin keluar dari keseimbangan fungsional. Pengungkapan skandal atau perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan melecehkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, harus disiarkan dengan fungsi sebagai pemeliharaan kestabilan. Sedang kontrol secara distributif, berfungsi memelihara keseimbangan sistem melalui diseminasi selektif dan berbagai ragam teknik-teknik penyebaran maupun penyaringan informasi, yang mungkin dapat mengundang kemelut dalam masyarakat atau menimbulkan perpecahan, justru media komunikasi dituntut untuk dapat menampilkan berbagai informasi yang bersifat apresiatif terhadap budaya masyarakat lain.

Ketiga, **strategi pendidikan yang berbasis budaya**; dapat menjadi pilihan karena pendidikan berbasis adat tidak akan melepaskan diri dari prinsip bahwa manusia adalah faktor utama, sehingga manusia harus selalu merupakan subjek sekaligus tujuan dalam setiap langkah dan upaya perubahan. Nilai-nilai budaya tradisional dapat terinternalisasi dalam proses pendidikan baik di lingkungan keluarga, pendidikan formal maupun nonformal. Khususnya pendidikan di sekolah diperlukan adanya paradigma baru yang dapat menyajikan model dan strategi pembelajaran yang dapat menyeimbangkan proses *homonisasi* yang melihat manusia sebagai makhluk hidup dalam konteks lingkungan ekologisnya, yang memerlukan terasahnya kemampuan intelektual untuk menghadapi tantangan kesejagadan dengan

pendidikan sebagai proses *humanisasi* yang lebih menekankan manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai otonomi moral dan sensitivitas /kedaulatan budaya, sehingga terbentuk manusia yang bisa mengelola konflik, dan menghargai kemajemukan, serta dapat tegar terhadap arus perubahan dengan memperetajam *sence of belonging*, *self of integrity*, *sence of participation* dan *sence of responcebility* sebagai benteng terhadap pengaruh faktor eksternal tersebut, transformasi budaya harus dipandu secara perlahan, bukan merupakan revolusi yang dipaksakan.

6. Pendidikan Multikultural

Sampai di sini, layak ditegaskan kembali paradigma multikultural tersebut. Peneguhan ini harus lebih ditekankan kepada persoalan kompetensi kebudayaan sehingga tidak hanya berkuat pada aspek kognitif melainkan beranjak kepada aspek psikomotorik. Peneguhan ini bermaksud mendedahkan kesadaran bahwa multikulturalisme, sebagaimana diungkap oleh Goodenough (1976) adalah pengalaman normal manusia. Ia ada dan hadir dalam realitas empirik. Untuk itu, pengelolaan masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa dilakukan secara *taken for granted* atau *trial and error*. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated, dan berkesinambungan. Di sinilah fungsi strategis pendidikan multikultural sebagai sebuah proses di mana seseorang mengembangkan kompetensi dalam beberapa sistem standar untuk mempersepsi, mengevaluasi, meyakini, dan melakukan tindakan.

Beberapa hal yang dibidik dalam pendidikan multikultural ini adalah: *Pertama*, pendidikan multikultural menolak pandangan yang menyamakan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan juga bermaksud membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer dalam mengembangkan kompetensi kebudayaan semata-mata berada di tangan mereka melainkan tanggung jawab semua pihak.

Kedua, pendidikan ini juga menolak pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Hal ini dikarenakan seringnya para pendidik, secara tradisional, mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan

kelompok-kelompok sosial yang relatif *self sufficient*. Oleh karena individu-individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam berbagai dialek atau bahasa, dan berbagai pemahaman mengenai situasi-situasi di mana setiap pemahaman tersebut sesuai, maka individu-individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam sejumlah kebudayaan. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural akan melenyapkan kecenderungan memandang individu secara stereotip menurut identitas etnik mereka. Malah akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak-didik dari berbagai kelompok etnik.

Ketiga, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi seseorang pada suatu waktu ditentukan oleh situasinya. Meski jelas berkaitan, harus dibedakan secara konseptual antara identitas-identitas yang disandang individu dan identitas sosial primer dalam kelompok etnik tertentu.

Keempat, kemungkinan bahwa pendidikan meningkatkan kesadaran mengenai kompetensi dalam beberapa kebudayaan akan menjauhkan kita dari konsep dwi-budaya (bicultural) atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Karena dikotomi semacam ini bersifat membatasi kebebasan individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan.

Dalam melaksanakan pendidikan multikultural ini mesti dikembangkan prinsip solidaritas. Yakni kesiapan untuk berjuang dan bergabung dalam perlawanan demi pengakuan perbedaan yang lain dan bukan demi dirinya sendiri. Solidaritas menuntut untuk melupakan upaya-upaya penguatan identitas melainkan berjuang demi dan bersama yang lain. Dengan berlaku demikian, kehidupan multikultural yang dilandasi kesadaran akan eksistensi diri tanpa merendahkan yang lain diharapkan segera terwujud.

Secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai “pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan”. Agar definisi ini bermanfaat, maka diperlukan untuk mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan “budaya” dan “kebudayaan”. Dan upaya perumusan ini, jelas tidak mudah, karena perubahan-perubahan yang begitu cepat dan dramatis dalam

kebudayaan itu sendiri, khususnya karena proses globalisasi yang semakin meningkat.

Menurut Tilaar (2002:495-7), pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “inter-kulturalisme” sesuai Perang Dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran “interkulturalisme” ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Mempertimbangkan semua perkembangan ini, pada dasawarsa 1940-an dan 1950-an di Amerika Serikat berkembang konsep pendidikan “inter-kultural” dan “inter-kelompok” (*intercultural and intergroup education*). Pada hakikatnya pendidikan interkultural merupakan cross-cultural education untuk mengembangkan nilai-nilai universal yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat berbeda (cf. La Belle 1994:21-27). Pada tahap pertama, pendidikan interkultural ditujukan untuk mengubah tingkah laku individu untuk tidak meremehkan apalagi melecehkan budaya orang atau kelompok lain, khususnya dari kalangan minoritas. Selain itu, juga ditujukan untuk tumbuhnya toleransi dalam diri individu terhadap berbagai perbedaan rasial, etnis, agama, dan lain-lain.

Tetapi, harus diakui, pada prakteknya pendidikan interkultural lebih terpusat pada individu daripada masyarakat. Lagi pula, konflik dalam skala luas, terjadi bukan pada tingkat individu, melainkan pada tingkat masyarakat sehingga dapat benar-benar mengganggu hubungan bersama di antara warga masyarakat negara-bangsa. Sebab itu pula, pendidikan interkultural dipandang kurang berhasil dalam mengatasi konflik antar golongan dan masyarakat; dan kenyataan inilah pada gilirannya mendorong munculnya gagasan tentang pendidikan multikultural.

Sebagaimana dikemukakan Tilaar (2002:498), dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural dominan atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang

berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya dapat membuat orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan interkultural seperti ini pada akhirnya memunculkan tidak hanya sikap tidak peduli (*indifference*) terhadap nilai-nilai budaya minoritas, tetapi bahkan cenderung melestarikan prasangka-prasangka sosial dan kultural yang rasis dan diskriminatif. Dan dari kerangka inilah, maka pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “politics of recognition”, politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas (Cf Taylor et al 1994).

Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “*indifference*” dan “*non-recognition*” berakar tidak hanya dari ketimpangan struktural rasial, paradigma pendidikan multikultural mencakup subyek-subyek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang; sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Paradigma seperti ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang “*ethnic studies*”, untuk kemudian menemukan tempatnya di dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang semua subyek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan *disadvantaged*.

Istilah “pendidikan multikultural” (*multicultural education*) dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi bagi pendidikan bagi peserta didik di dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif dan normatif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subyek-subyek seperti; toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethnokultural, dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal, dan subyek-subyek lain yang relevan.

Perumusan dan implementasi pendidikan multi-kultural di Indonesia masih memerlukan pembahasan serius dan khusus. Hal ini bukan hanya karena menyangkut masalah isi pendidikan multikultural itu sendiri, tetapi juga mengenai strategi yang akan ditempuh; apakah misalnya dalam bentuk matapelajaran terpisah, berdiri sendiri (*separated*), atau sebaliknya “terpadu” atau terintegrasi (*integrated*). Terlepas dari berbagai isu dan masalah ini, perkembangan Indonesia sekarang nampaknya membutuhkan pendidikan multikultural, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembentukan “keikaan” di tengah “kebhinnekaan” yang betul-betul aktual; tidak hanya sekedar slogan dan jargon.

Adanya ketidaksalingpengertian dan pemahaman terhadap realitas kehidupan itulah yang menjadi kajian utama pendidikan multikultural (*Multicultural education*). Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks, di mana egosentrisme, etnosentrisme, dan chauvinisme yang pada gilirannya memunculkan klaim kebenaran (*truth claim*) terus menggejala pada masing-masing individu. Dengan demikian, pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan struktur dan proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi.

Hilda Hernandez Dalam *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content* (1989), mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Atau dengan kata lain, bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (*plural*), baik latar belakang maupun basis sosio budaya yang melingkupinya.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire. Dalam *pedagogy of the oppressed*, sebagaimana dikutip oleh M. Yunus Firdaus dalam buku: *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial* (2005), Freire mengatakan bahwa

pendidikan harus mampu menciptakan harmonisme sosial dalam sebuah kehidupan masyarakat yang beragam secara kultur. Sebab pendidikan bukanlah “menara gading” yang harus menjauhi hiruk-pikuk kehidupan sosial. Apalagi di negara Indonesia yang rentan terjadi konflik. Karena itu, pendidikan berbasis multikulturalisme sudah saatnya dijadikan sebagai paradigma atau pijakan dalam sistem pendidikan kita.

Sebab bagaimana pun juga, pendidikan multikultural dapat memberikan solusi bagi sejumlah permasalahan yang dihadapi Indonesia. Pertama, sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadi di Indonesia yang secara realitas plural. Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan.

Kedua, pendidikan multikultural juga signifikan dalam membina peserta didik supaya tidak tercerabut dari akar budaya yang ia miliki sebelumnya, ketika berhadapan dengan realitas sosial-budaya di era globalisasi. Sebab disadari maupun tidak, dalam era globalisasi saat ini, pertemuan antarbudaya menjadi “ancaman” serius bagi peserta didik. Untuk menyikapi realitas global tersebut, peserta didik hendaknya diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan.

Ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan pendekatan multikulturalisme menjadi sangat penting. Langkah demikian dapat dilakukan setidaknya dengan mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini menjadi filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Filosofi konservatif seperti esensialisme dan perenialisme haruslah dapat diubah ke filosofi yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemanusiaan peserta didik. Kemudian, filosofi kurikulum yang progresif

seperti humanisme, progresifisme dan rekonstruksi sosial dapat dijadikan sebagai landasan kurikulum (hal.208-210).

Dengan demikian, pendidikan berbasis multikulturalisme pada akhirnya akan memberikan sebuah pencerahan: yakni kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Kearifan itu muncul seiring dengan adanya keterbukaan untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kemestian hidup yang kodrati. Sebagaimana dikatakan oleh Musa Asy'ari (2004), bahwa keanekaragaman dalam realitas kehidupan manusia adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri.

Pendidikan multikultural merupakan fenomena baru dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama bagi semua orang. Pendidikan multikultural menjadi acuan beberapa negara termasuk Indonesia yang penduduknya relatif heterogen. Musa Asyarie (Kompas, 3/9/2004) menegaskan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.

Carl A. Grant dan Christine E. Sleeter (2003) menjelaskan bahwa terdapat lima tipologi pendidikan multikultural yang berkembang: (1) mengajar mengenai kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain (*culture difference*). Perubahan ini terutama pada siswa dalam transisi dari berbagai kelompok kebudayaan ke dalam mainstream budaya yang ada; (2) Hubungan manusia (*human relation*). Program ini membantu siswa dari kelompok-kelompok tertentu sehingga dia dapat mengikuti bersama-sama dengan siswa yang lain dalam kehidupan sosial; (3) *Single group studies*. Program ini mengajarkan hal-hal yang memajukan pluralisme, tetapi tidak menekankan kepada adanya perbedaan stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat; (4) Pendidikan multikultural. Program ini merupakan suatu reformasi pendidikan di sekolah-sekolah dengan menyediakan kurikulum serta materi-materi pelajaran yang menekankan kepada adanya perbedaan siswa dalam bahasa, yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan dan equilitas sosial; (5) Pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial. Program ini bertujuan untuk menyatukan perbedaan-

perbedaan kultural dan menantang ketimpangan-ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Menurut Leirissa (2005) bahwa sistem pendidikan multikultural pertama kali muncul dalam tahun-tahun 1970-an di Inggris dan Australia, kemudian menyebar ke Amerika dan negara-bangsa lain di Eropa. Dalam sistem pendidikan itu, kurikulum sekolah memberi tempat bagi pelajaran tentang berbagai sistem budaya dari kelompok ras yang ada di negara tersebut. Di Amerika, misalnya, sejarah tentang sejarah budaya kelompok rasial seperti orang Negro asal Afrika atau kelompok ras Hispanik yang berbudaya Spanyol menjadi bagian dari kurikulum. Dengan demikian, anak didik yang berasal dari budaya Inggris dapat memahami budaya kelompok ras lainnya, sehingga akan mereduksi perbedaan yang sering menimbulkan konflik rasial.

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa pendidikan multikultural lebih berorientasi pada pengenalan keragaman budaya yang tumbuh dan berkembang di sekitar kita. Selain itu, untuk menghindari pandangan superior pemilik budaya tertentu kemudian menempatkan budaya lain pada posisi inferior. Karena itu, orang Batak tidak boleh dipahami sebagai orang yang memiliki karakter kasar dalam berkomunikasi sebab cenderung medak-ledak ketika berbicara, lalu orang Solo dipahami sebagai etnis yang lembut dan santun. Penilaian terhadap kasar-lembut suatu budaya sangat subjektif dan tergantung pada instrumen yang digunakan untuk menilai.

Multikultural adalah sebuah realitas sosial dan merupakan fitra manusia yang apabila dikelola secara benar, akan melahirkan energi dan sebaliknya, jika ditangani secara keliru akan menimbulkan bencana yang dahsyat. Orang buta dan orang lumpuh yang berkolaborasi secara positif dapat meningkatkan produktifitasnya berlipat ganda. Kerusuhan di Poso yang dampaknya masih dirasakan sekarang adalah bentuk pengelolaan multikultural yang keliru.

D. AKTIFITAS PEMBELAJARAN

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta diklat menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi:

- Memahami dan mencermati materi diklat
- Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar,
- Menyimpulkan
- Melakukan refleksi

2. Aktivitas kelompok, meliputi:

- Mendiskusikan materi pelatihan
- Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
- Melaksanakan refleksi

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

F. RANGKUMAN

Multikulturalisme sejak beberapa tahun belakangan ini marak diperbincangkan oleh pelbagai kalangan dan tampaknya masih akan terus demikian karena memang sangat relevan dengan corak masyarakat seperti yang terdapat di Indonesia. Membicarakan multikulturalisme atau masyarakat multikultural sama halnya membicarakan tentang masyarakat-negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah-yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan yang ditekankan di sini adalah perbedaan dalam kesederajatan

Multikulturalisme yang meniscayakan adanya perbedaan itu sesungguhnya mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada. Menurut Parsudi Suparlan dalam seminar Menuju Indonesi Baru: Dari Masyarakat

Majemuk ke Masyarakat Multikultural di Yogyakarta pada Agustus 2001 (Kompas, 3 September 2001), fokus multikulturalisme adalah pada pemahaman dan hidup dengan perbedaan sosial dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat. Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perbedaan dalam perspektif multikulturalisme bukanlah sesuatu yang bersifat negatif, tetapi justru karena adanya perbedaan itulah manusia bisa saling memberikan warna satu sama lain dalam kehidupan mereka. Tanpa perbedaan, hidup akan terasa hambar.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, benih-benih multikulturalisme sesungguhnya telah ada sejak dahulu, sebab negeri ini terdiri dari beraneka ragam suku bangsa sebagaimana terangkum dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Suku-suku bangsa tersebut bagaikan sebuah mozaik yang hidup berdampingan dengan damai. Masing-masing suku mempunyai corak budaya sendiri-sendiri yang sangat jelas dan belum tercampur oleh warna budaya dari suku lain. Tentu saja mozaik kebudayaan diharapkan akan tetap seperti itu, bahkan kalau bisa lebih dari sekadar hidup berdampingan secara damai.

Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak "masyarakat majemuk" (*plural society*). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang *bhinneka tunggal ika* bukan lagi keanekaragaman sukubangsaan dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Konsepsi multikulturalisme adalah mengakui dan melindungi keragaman budaya yang tidak selalu dan tidak semata-mata berdasarkan keragaman etnis. Terkandung juga pengertian tentang penyetaraan derajat dari kebudayaan yang berbeda-beda itu. Penekanan terletak pada pemahaman dan upaya untuk menggu-muli, mempertanyakan, dan belajar dari pihak lain yang berbeda, serta hidup dalam konteks perbedaan sosial-budaya, baik secara individual maupun kelompok.

Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan, menampakkan bahwa kongruensi antara aspek kebhinekaan yang manunggal dalam ke-eka-an mulai menjadi masalah yang tak pernah kunjung selesai. Masyarakat majemuk yang menekankan keanekaragaman etnik sepatutnya dikaji ulang untuk digeser pada pluralisme budaya yang mencakup tidak hanya kebudayaan etnik tapi juga berbagai lokal yang ada di Indonesia, sekaligus harus dibarengi oleh kebijakan politik Nasional yang meletakkan berbagai kebudayaan itu dalam kesetaraan derajat.

Tranformasi budaya dan berbagai permasalahan silang budaya harus dapat dipandu secara perlahan lewat jalu media massa maupun pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus informasi, memerlukan berbagai penyesuaian, baik dalam struktur pekerjaan, tuntutan keahlian mobilitas sosial dan sebagainya, dalam proses perubahan tersebut bila tidak memiliki akar budaya yang kuat akan kehilangan identitas diri, dan terbawa arus. Tatanan sosial dan tradisi lokal yang berakar kuat akan memberikan sentuhan halus yang mengingatkan manusia agar tidak terbawa arus perubahan yang demikian dahsyat. Nilai budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat, akan selalu berakar dari kearifan tradisional yang muncul dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, kemajemukan masyarakat Indonesia dengan ciri keragaman budayanya tidak bisa secara otomatis terintegrasi menjadi kebudayaan Nasional, yang sama mantapnya dengan setiap sistem adat yang ada, karena kebudayaan Nasional tersebut baru pada taraf pembentukan. Dengan berpijak pada pemahaman tersebut, nampak bahwa kebijakan pendidikan yang sentralistik menjadi tidak relevan. Strategi pendidikan yang berbasis budaya, dapat menjadi pilihan karena pendidikan berbasis adat tidak akan melepaskan diri dari prinsip bahwa manusia adalah faktor utama, sehingga manusia harus selalu merupakan *sobyek* sekaligus tujuan dalam setiap langkah dan upaya perubahan. Nilai-nilai budaya tradisional dapat terinternalisasi dalam proses pendidikan baik di lingkungan keluarga, pendidikan formal maupun non formal. Khususnya pendidikan di sekolah diperlukan adanya paradigma baru yang dapat menyajikan model & strategi pembelajaran yang dapat menseimbangkan proses *homonisasi* dan *humanisasi*.

Untuk membangun kohesivitas kesadaran kolektif ideologi multikulturalisme dalam rajutan kemajemukan sosial diperlukan dua hal pokok, sebagaimana dijelaskan Barbara Houston, yaitu adanya kesadaran bersama untuk berbagi nilai (*shared values*) dan berbagi identitas (*shared identity*). Dalam masyarakat plural, kesadaran kolektif untuk *legawo* berbagi nilai di tengah perbedaan akan mampu mendorong munculnya kesepakatan norma dasar sebagai landasan sikap yang *mutual concern*. Pengakuan terhadap diversitas tersebut dapat mengantarkan kita pada suatu kemampuan membangun kesadaran komunalitas. Misalnya, Kanada sebagai salah satu negara yang memiliki latarbelakang etnik yang beragam, pemerintahnya mengambil kebijakan politik agar proses *share* warga negaranya dilakukan secara *equal*, jujur, dialogis, akomodatif, toleran, mempromosikan diversitas serta komitmen untuk memperjuangkan kebebasan, perdamaian dan perubahan tanpa kekerasan.

Adapun sikap berbagi identitas merupakan upaya dalam melapangkan proses pencairan identitas untuk mencapai status kewarganegaraan yang sederajat (sosial) dan setara (politik). Kewarganegaraan tidak semata-mata status hukum yang didefinisikan oleh hak-hak dan tanggung jawab namun juga sebagai identitas yang merupakan ekspresi pengakuan keanggotaan dalam komunitas politik. Pilar pembangunan masyarakat multikultural itu mengantarkan kita pada satu kenyataan bahwa kesukubangsaan atau jatidiri suku bangsa sebagai sebuah kekuatan sosial yang tidak bisa ditawar, yang muncul dalam interaksi sosial, menjadi sebuah acuan yang ampuh dalam upaya kohesi sosial dan solidaritas diantara sesama anggota warga dan suku bangsa.

Meminjam istilah gagasan Karl Popper (Ul Haq, 2006), visi masyarakat multikultural adalah meruntuhkan tembok besi masyarakat tertutup yang tribalis untuk kemudian menapaki masyarakat terbuka yang demokratis, egaliter dan berkeadilan. Memperjuangkan masyarakat terbuka merupakan harga yang harus dibayar untuk setiap peningkatan pengetahuan dan pemikiran dalam rangka menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan serta sebagai konsekuensi dari kesempatan kita untuk bertahan hidup. Ini merupakan beban yang harus dibayar untuk menjadi

manusia. Tidak pelak lagi, cita-cita sosial masyarakat multikultural berada pada pundak sejarah sebagai beban peradaban.

Masyarakat multikultural yang mengedepankan watak keterbukaan yang berkeadilan tidak diciptakan, terlebih diberikan oleh kuasa rejimentasi kepentingan yang mengerami diskursus maupun mainstream tertentu. Sekali lagi, menghadirkan masyarakat multikultural harus diperjuangkan secara kolektif tanpa mengenal struktur kasta kolonial seiring dengan pelepasan kekuasaan dan de-supremasi sistem nilai yang membaku. Visi Masyarakat multikultural di atas merupakan ikhtiar untuk menggayuh perimbangan kekuasaan/kepentingan/hegemoni dalam tata sosial yang berlaku.

Ideologi multikulturalisme yang menekankan pada kesederajatan tentu saja sangat mendukung terwujudnya demokrasi seutuhnya di Indonesia. Adalah pilihan yang tepat jika pemerintah sekarang mulai merintis usaha-usaha membangun multikulturalisme. Mengapa demikian? Karena sejak penerapan UU Pemerintah Daerah yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah muncul kekuasaan "raja-raja kecil di daerah" dan semangat rasis dan kesukuan (dan keagamaan) yang besar dari penduduk di daerah yang merasa diri mereka asli dan bermaksud "memurnikan" daerah tempat tinggal mereka dari pendatang.

Kuncinya keberhasilan penerapan ideologi multikulturalisme adalah penerapan hukum yang konsekuen dan konsisten. Penerapan hukum yang baik akan menghasilkan perilaku hukum yang baik pula. Friedman (2001) mengatakan bahwa apa yang disebut perilaku hukum (*legal behavior*) adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika orang berperilaku secara khusus atau mengubah perilakunya secara khusus karena diperintahkan hukum. Inilah perilaku hukum.

Untuk mempengaruhi perilaku hukum masyarakat atau untuk mendorong mereka mematuhi hukum, Friedman juga menguraikan beberapa hal yang harus dilakukan. Dua hal di antaranya, yang saya anggap paling penting adalah komunikasi hukum dan sanksi hukum. Komunikasi hukum diperlukan karena sangat aneh jika orang mematuhi hukum atau tidak mematuhi hukum tanpa mengetahui aturan yang sebenarnya. Dengan kata lain, aturan harus dikomunikasikan. Namun tidak cukup bahwa norma atau

aturan telah dikomunikasikan kepada audiens yang menjadi sasarannya. Karena yang mendorong mereka ke arah mematuhi atau tidak mematuhi norma atau aturan itu adalah berkaitan dengan ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*).

Orang mengikuti aturan karena mereka takut apa yang akan terjadi jika mereka tidak mengikutinya. Dengan kata lain, hukum dan sanksi mencegahnya. Lebih jauh lagi, pranata hukum akan disegani oleh masyarakat jika bersifat adil dalam artian tidak memihak salah satu golongan atau kelompok, dan peranan-peranan yang ada di dalam pranata tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh.

Cita-cita reformasi yang sekarang ini nampaknya mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya ada baiknya digulirkan kembali. Alat penggulir bagi proses-proses reformasi sebaiknya secara model dapat dioperasionalkan dan dimonitor, yaitu mengaktifkan model multikulturalisme untuk meninggalkan masyarakat majemuk dan secara bertahap memasuki masyarakat multikultural Indonesia. Sebagai model maka masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau *bhinneka tunggal ika* yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal.

Bila pengguliran proses-proses reformasi yang terpusat pada terbentuknya masyarakat multikultural Indonesia itu berhasil maka tahap berikutnya adalah mengisi struktur-struktur atau pranata-pranata dan organisasi-organisasi sosial yang tercakup dalam masyarakat Indonesia. Isi dari struktur-struktur atau pranata-pranata sosial tersebut mencakup reformasi dan pembenahan dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada, dalam nilai-nilai budaya dan etos, etika, serta pembenahan dalam hukum dan penegakkan hukum bagi keadilan. Dalam upaya ini harus dipikirkan adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman kebudayaan yang ada setempat atau pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional dan berbagai corak dinamikanya.

Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban dari

pelakunya dalam berbagai struktur kegiatan dan manajemen. Pedoman etika ini akan membantu upaya-upaya pemberantasan KKN secara hukum.

Upaya-upaya tersebut diatas tidak akan mungkin dapat dilaksanakan bila pemerintah nasional maupun pemerintah-pemerintah daerah dalam berbagai tingkatnya tidak menginginkannya atau tidak menyetujuinya. Ketidak inginan merubah tatanan yang ada biasanya berkaitan dengan berbagai fasilitas dan keistimewaan yang diperoleh dan dimiliki oleh para pejabat dalam hal akses dan penguasaan atas sumber-sumber daya yang ada dan pendistribusiannya. Mungkin peraturan yang ada berkenaan dengan itu harus direvisi, termasuk revisi untuk meningkatkan gaji dan pendapatan para pejabat, sehingga peluang untuk melakukan KKN dapat dibatasi atau ditiadakan.

Bersamaan dengan upaya-upaya tersebut diatas, sebaiknya Depdiknas R.I. mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk diberlakukan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Multikulturalisme sebaiknya termasuk dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah (khususnya untuk daerah-daerah bekas konflik berdarah antar sukubangsa, seperti di Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan berbagai tempat lainnya). Dalam sebuah diskusi dengan tokoh-tokoh Madura, Dayak, dan Melayu di Singkawang baru-baru ini, mereka itu semuanya menyetujui dan mendukung ide tentang diselenggarakannya pelajaran multikulturalisme di sekolah-sekolah dalam upaya mencegah terulangnya kembali di masa yang akan datang konflik berdarah antar sukubangsa yang pernah mereka alami baru-baru ini (Suparlan, 2006)

Sebagai penutup mungkin dapat kita pikirkan bersama apakah multikulturalisme sebagai ideologi yang mendukung cita-cita demokrasi akan hanya kita jadikan sebagai wacana atautah akan kita jadikan sebagai sebuah tema utama dalam antropologi Indonesia yang akan merupakan sumbangan antropologi Indonesia bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Semuanya terpulung pada keputusan kita bersama.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Setelah membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini apakahAndamemperoleh pengetahuan baru, yang sebelumnya belum pernah Anda pahami, apakah materi yang diuraikan mempunyai manfaat dalam mengembangkan materi sosiologi, khususnya masalah sosial? Setelah Anda membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini rencana tindak lanjut apa yang akan Anda lakukan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

MEDIA PEMBELAJARAN SOSIOLOGI

A. TUJUAN

Setelah mempelajari materi modul Media Pembelajaran ini peserta diklat diharapkan:

1. Mampu memilih media pembelajaran sederhana yang sesuai dengan pokok materi yang disampaikan.
2. Mampu menggunakan media pembelajaran sosiologi dengan benar.
3. Mampu mempraktekkan cara memelihara media pembelajaran yang digunakan.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjelaskan pengertian media pembelajaran
2. Mengidentifikasi jenis-jenis media pembelajaran
3. Menjelaskan kriteria pemilihan media pembelajaran
4. Menjelaskan cara pembuatan media pembelajaran manual
5. Menjelaskan konsep pembelajaran multimedia
6. Menjelaskan teknik penggunaan multimedia

C. URAIAN MATERI

1. Latar Belakang

Sosiologi merupakan ilmu murni yang memusatkan perhatiannya pada kajian masyarakat. Sebagai ilmu yang tergolong masih baru, para ilmuwan dan orang-orang yang tertarik mempelajari masyarakat berusaha untuk memperkenalkan, menyebarkan, dan mengembangkan ilmu sosiologi bahkan ilmu-ilmu tersebut mulai tahun 1980-an masuk sebagai mata pelajaran baru bagi siswa SMU, dan tahun 2004 telah diperkenalkan kepada siswa SD dan SMP walaupun hanya sebagai salah satu kajian pada pelajaran Pengetahuan Sosial.

Pembelajaran ilmu sosiologi, pada masa sekarang masih banyak mengalami kendala. Misalnya guru yang tidak berlatar belakang dari ilmu

sosiologi, sistem pembelajaran yang belum optimal, keterbatasan kemampuan maupun pemenuhan penggunaan sumber dan media yang dipilih sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan.

Ilmu sosiologi akan lebih mudah dipahami atau diajarkan jika ditunjang oleh sarana media yang tepat. Oleh karena itu pemilihan dan penggunaan sumber dan media perlu dipersiapkan secara optimal untuk memperlancar proses kegiatan belajar mengajar sosiologi. Diharapkan tenaga pendidik sosiologi memiliki dan mampu memanfaatkan penggunaan sumber dan media yang ada.

Dalam rangka pencapaian tujuan itulah maka bahan ajar ini akan memberikan pengetahuan tentang beberapa media yang bisa dijadikan alternatif untuk dimanfaatkan dan digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar.

2. Pengertian Media Pembelajaran

Association for Educational Communication Technology/AECT (1971) mengartikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan *National Educational Association/NEA* mengartikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, ataupun dibicarakan beserta instrumennya yang dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Robert Gagne dalam *The Condition of Teaching* menjabarkan pengertian media yang dapat divisualkan sebagai guru, obyek, berbagai macam alat dari buku sampai dengan televisi yang digunakan untuk menunjukkan komponen lingkungan belajar yang dapat merangsang siswa sehingga terjadi proses belajar.

Belajar merupakan suatu proses yang terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu belajar dapat terjadi dimana-mana. Dalam kawasan pendidikan proses belajar mengajar dilakukan secara formal yaitu dalam sekolah, tentunya dalam proses belajar mengajar tersebut dibutuhkan berbagai sarana yang diperlukan untuk keberhasilan siswa belajar dalam memahami berbagai ilmu yang telah ditentukan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Dalam proses pembelajaran akan terjadi komunikasi antara guru dan siswa, komunikasi tersebut dapat berbentuk komunikasi langsung ada juga yang berbentuk komunikasi tidak langsung. Keberhasilan dalam komunikasi inilah yang sangat menentukan tingkat keberhasilan siswanya, semakin efektif keberhasilan komunikasi akan semakin tinggi keberhasilan siswa dalam memahami materi yang diajarkan.

Pada dasarnya proses pembelajaran adalah proses komunikasi, yaitu proses menyampaikan pesan dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran/media dan penerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan di komunikasikan adalah isi ajaran ataupun materi yang sudah tertuang dalam kurikulum yang telah dibuat sebelumnya. Sumber pesannya bisa pengajar, atau orang lain yang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan sesuai dengan materi yang ada di kurikulum, salurannya dinamakan dengan media bisa berupa alat/barang yang digunakan sebagai perantara antara sumber pesan dan penerima pesan sedang penerima pesan adalah siswa.

Pembelajaran lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (*learning by doing*). Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat guna . Pengalaman belajar siswa akan lebih efektif ,jika gur mrnggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran . Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk keutuhan dan kebulatan pengetahuan, manakala guru menggunakan media yang tepat guna.

3. Jenis-jenis Media Pembelajaran

Banyak cara diungkapkan untuk mengidentifikasi media serta mengklasifikasikan karakteristik fisik, sifat, kompleksitas, ataupun klasifikasi menurut kontrol pada pemakai. Namun demikian, secara umum media bercirikan tiga unsur pokok, yaitu: suara, visual, dan gerak. Menurut Rudy Brets, ada 7 (tujuh) klasifikasi media, yaitu:

1. Media audio visual gerak, seperti: film suara, pita video, film televisi.
2. Media audio visual diam, seperti: film rangkai suara, dan sebagainya.
3. Audio semi gerak seperti: tulisan jauh bersuara.

4. Media visual bergerak, seperti: film bisu.
5. Media visual diam, seperti: halaman cetak, foto, *microphone*, *slide* bisu.
6. Media audio, seperti: radio, telepon, pita audio.
7. Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri.

Secara sederhana kehadiran media dalam suatu kegiatan pembelajaran memiliki nilai-nilai praktis sebagai berikut:

1. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki para siswa.
2. Media yang disajikan dapat melampaui batasan ruang kelas.
3. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya.
4. Media yang disajikan dapat menghasilkan keseragaman pengamatan siswa.
5. Secara potensial, media yang disajikan secara tepat dapat menanamkan konsep dasar yang kongkrit, benar, dan berpijak pada realitas.
6. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru.
7. Media mampu membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar.
8. Media mampu memberikan belajar secara integral dan menyeluruh dari yang kongkrit ke yang abstrak, dari sederhana ke rumit.

Dari semua itu, kemudian dikembangkan media dalam suatu konsepsi teknologi pembelajaran yang memiliki ciri:

- (a) berorientasi pada sasaran,
- (b) menerapkan konsep pendekatan sistem,
- (c) memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi. Sehingga aplikasi media dan teknologi pendidikan, bisa merealisasikan suatu konsep "*teachingless learning more*". Artinya secara aktifitas fisik bisa saja aktifitas kegiatan guru di kelas dikurangi, karena ada sebagian tugas guru yang didelegasikan pada media, namun tetap mengusung tercapainya produktifitas belajar siswa.

Dalam kegiatan belajar mengajar dikenal berbagai jenis media pendidikan. Beranekaragamnya jenis media pendidikan itu ditentukan pula oleh beranekaragamnya tujuan pengajaran yang akan dicapai, adanya perbedaan ketersediaan bahan untuk pengadaan pada berbagai sekolah. Berikut ini dikemukakan pengelompokan media pendidikan menurut karakteristiknya.

1. Media Asli dan Media Tiruan misal: foto sawah/kebun taman Globe/ miniatur kenampakan alam
2. Media Grafis yaitu bahan pelajaran yang menyajikan ringkasan informasi dan pesan dalam bentuk lukisan, sketsa, kata-kata, simbol gambar tiruan yang mendekati bentuk aslinya, diagram, grafik chart, dan tanda-tanda lainnya. Contoh: Media bagan (chart). Media grafik (grafik diagram), Media poster, Media karikatur, Media gambar, Media komik, Media gambar bersambung/gambar seri.
3. Media bentuk papan, yaitu media yang menggunakan benda berupa papan sebagai sarana komunikasi. Media bentuk papan dibedakan atas: papan tulis, papan tempel, papan flanel, papan pameran/visual, papan magnet, papan demonstrasi, papan paku.
4. Media yang disorotkan, yaitu media yang diproyeksikan. Media ini dibedakan atas: media sorot yang diam, media sorot yang bergerak, dan media sorot mikro.
5. Media dengar, mempunyai ciri yang dapat didengar, baik untuk individu maupun untuk kelompok atau massa. Media ini meliputi radio, piringan hitam
6. Media pandang dengar (audio-visual aids), mempunyai ciri dapat didegar dan dilihat. Contoh : slide bersuara, televisi, film, komputer.
7. Media cetak (printed materials), merupakan hasil cetak dari bahan instruksional. Media ini dapat berbentuk buku, leaflet, komik. Jenis media ini menurut Sadiman dkk (1989) terdiri dari:
 - a. Media foto (gambar) dipakai untuk menggambarkan ilustrasi yang dapat dipelajari tanpa menggunakan proyektor dan alat penglihat;
 - b. Seni grafis, Grafis adalah bahan pelajaran yang menyajikan ringkasan informasi dan pesan dalam bentuk lukisan, sketsa, kata-kata, simbol gambar tiruan yang mendekati bentuk aslinya, diagram, grafik chart, dan tanda-tanda lainnya;

- c. Bahan belajar tiga dimensi berbagai benda yang menggambarkan benda sesungguhnya dalam bentuk tiga dimensi. Contoh : Model, spesimen, maket/tiruan mack-up, diorama, bahan dari alam sekitarnya, musium dan perpustakaan;
- d. Film bingkai (slide program);
- e. Film strip;
- f. Transparansi;
- g. Kaset program;
- h. Radio;
- i. Televisi;
- j. Film;
- k. Video.

4. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran

Dasar pertimbangan untuk memilih suatu media pembelajaran adalah dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Menurut Sadiman (2003:82) faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media diantaranya adalah :

- 1). Tujuan instruksional yang ingin dicapai.
- 2). Karakteristik audien atau sasaran.
- 3). Jenis rangsangan belajar yang diinginkan (audio, visual, gerak, dan lain-lain).
- 4). Keadaan latar belakang pengetahuan atau pengalaman audien.
- 5). Kondisi tempat dan lingkungan belajar audien.
- 6). Luasnya jangkauan yang ingin dilayani.

Selain pertimbangan di atas, Ely dalam Ibrahim (2004:117) menambahkan perlunya mempertimbangkan media apa saja yang ada, berapa biaya atau harganya dan berapa waktu untuk mendapatkannya.

Dick dan Carey masih dalam Ibrahim (2004:118) menyebutkan ada empat faktor dalam mempertimbangkan pemilihan media, antara lain yaitu:

- a. Ketersediaan sumber belajar setempat (jika tidak ada bisa dibuat atau dibeli).
- b. Ketersediaan dana untuk membuat atau membeli.

- c. Keluwesan, kepraktisan dan ketahanan media yang akan dipilih untuk waktu yang lama.
- d. Efektifitas biayanya dalam waktu yang panjang, misalnya : pengadaan media terasa mahal tetapi kalau dapat dipakai berulang-ulang dalam waktu yang lama akan menjadi murah.

Hal yang perlu disadari dalam memilih media adalah bahwa tidak ada satupun media yang baik untuk semua tujuan pembelajaran. Begitu pula untuk satu tujuan pembelajaran dapat dipenuhi dengan satu atau lebih media. Hal ini dikarenakan setiap media mempunyai kelebihan dan kelemahan, serta keserasian tertentu dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi hal dasar dalam memilih media adalah untuk efektifitas proses belajar dengan tetap memprioritaskan audien sebagai pihak yang aktif dalam proses pembelajaran.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran untuk mempertinggi hasil pembelajaran.

1. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, artinya media dipilih atas dasar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, apakah tujuan yang hendak dicapai tersebut mengenai aspek kognitif, afektif atau psikomotor, rumusan tujuan yang jelas akan menentukan media apa yang sebaiknya dipilih. Bila tujuan pembelajarannya mengarah pada peniruan ucapan, maka media audiolah yang paling tepat, tetapi bila tujuannya ingin menemukutunjukkan suatu tempat maka media grafis dalam bentuk peta yang harus dipilih dan lain sebagainya
2. Cara mencapai tujuan, apakah tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dapat dicapai dengan belajar sendiri, belajar dalam kelompok, adanya interaksi dengan guru atau campuran dari ketiga-tiganya. Keempat cara mencapai tujuan tersebut sangat menentukan dalam pemilihan media
3. Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran, bahan atau materi yang bersifat fakta, konsep, prinsip dan generalisasi sangat memerlukan media agar lebih mudah dipahami siswa.
4. Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, setidaknya-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu akan

memberikan pelajaran tanpa biaya yang mahal dan praktis dalam penggunaannya

5. Sesuai dengan taraf berpikir siswa, memilih media harus disesuaikan dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang dikandung dalam media tersebut dapat dipahami oleh siswa, jangan sampai media yang telah dipilih guru dengan biaya yang relatif murah/mahal tidak mendukung terhadap proses belajar mengajar dikarenakan media yang digunakan terlalu mudah atau terlalu sukar bagi siswa.
6. Sesuai dengan waktu yang tersedia artinya penggunaan media dalam pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan waktu yang telah tersedia Dengan menggunakan pedoman tersebut diatas, guru akan terhindar dari kecerobohan dalam memilih media. Berdasarkan pedoman tersebut di atas dapat memperjelas bahwa efektifitas suatu media untuk mendukung keberhasilan proses belajar mengajar tidak tergantung pada modern atau mahal suatu media yang dipakai melainkan ketepatan dalam memilih media.

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam memilih media maka perlu sekali lagi diingat rambu-rambu sebagai berikut:

1. relevan dengan tujuan
2. bagaimana tujuan hendak dicapai
3. menarik bagi siswa
4. memotivasi belajar siswa
5. ketepatangunaan
6. tingkat kesulitan
7. bermanfaat bagi siswa
8. tidak ketinggalan jaman
9. dapat diusahakan sekolah

5. Pembuatan Media Pembelajaran

Memanfaatkan berbagai media tentu harus dipersiapkan sebelumnya. Artinya sebelum menentukan media mana yang dipilih hendaknya menjawab pertanyaan apakah materi yang akan diajarkan ke peserta didik memerlukan media atau tidak, jika memerlukan media, apakah media tersebut berdampak pada hasil yang signifikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang digunakan

sebagai dasar analisis pada setiap materi yang akan diajarkan pada peserta didik.

Langkah-langkah secara terinci dalam menganalisis media pembelajaran

1. Memahami Standar Kompetensi

Standar Kompetensi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa dalam suatu mata pelajaran. Standar Kompetensi ini dijadikan acuan dalam rangkaian proses pembelajaran, sehingga dalam memilih, membuat media pun mau tidak mau tidak boleh menyimpang dari koridor kemampuan siswa yang diinginkan. Standar kompetensi yang sudah ditentukan oleh BSNP tinggal difahami ke arah mana tujuan yang ingin dicapai. Biasanya dalam memahami standar kompetensi ini tinggal dilihat kata kerja yang ada didalamnya. Misalnya dalam salah satu Standar Kompetensi Pengetahuan Sosial tertulis “Memahami identitas diri dan keluarga, serta sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga” maka kata kerja yang perlu dicermati dalam kalimat tersebut adalah kata “memahami”. Dengan mengetahui kata kerja tersebut sudah diketahui ke arah mana tujuan dari Standar Kompetensi

2. Memahami Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Kompetensi dasar menjawab pertanyaan “Kompetensi dasar minimal apa saja yang harus dikuasai agar siswa mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Dalam memahami Kompetensi dasar ini juga menggunakan teknik yang sama dengan memahami Standar Kompetensi, bahkan dalam Kompetensi dasar, kata kerja yang tertulis sudah lebih detail lagi sehingga lebih memudahkan lagi untuk mencerna apa yang diinginkan

3. Menentukan materi

Materi pokok adalah bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian yang dapat berupa pengertian konseptual, gugus isi atau konteks, proses bidang ajar dan keterampilan. Penempatan Materi Pokok ini berfungsi sebagai payung dari setiap uraian materi yang disajikan dalam pengalaman belajar siswa. Dalam menentukan materi ini tentu harus

melihat Kompetensi dasar yang diinginkan, dengan demikian materi yang dipilih tidak akan menyimpang dari tujuan yang diinginkan.

1. Mencari Alternatif Media

Dalam kaitannya dengan media pembelajaran, maka materi yang telah ditentukan dikaji apakah materi tersebut dapat dibuatkan medianya, bila dapat dibuat maka pertanyaan selanjutnya adalah media apa saja yang bisa dibuat untuk mendukung materi itu, apakah membutuhkan benda aslinya?, atau tiruannya?, bisa tidak dibuat materi itu dibuatkan media grafisnya misalkan gambar, diagram, poster dan lain sebagainya. Untuk satu materi bisa saja dibuatkan lebih dari satu media misalkan bisa dibuatkan diagram, poster, video, permainan interaktif dan lain sebagainya. Sedapat mungkin dalam mencari alternatif media ini, media yang dimungkinkan dapat dibuat, dicantumkan saja siapa tahu suatu saat bisa dibuatkan dalam kondisi yang memungkinkan

2. Menentukan media yang dipilih

Setelah ditetapkan alternatif media yang dimungkinkan dapat dibuat, maka kegiatan selanjutnya adalah menentukan media mana yang paling cocok dibuat. Prinsip yang paling diperhatikan adalah simpel, bahan mudah didapat dan mudah dikerjakan dan sudah barang tentu media tersebut dapat digunakan dalam meningkatkan interaksi dalam proses pembelajaran.

3. Keterangan

Berisi informasi cara penggunaan media dan keselarasan dengan metode yang digunakan

Untuk lebih memudahkan dalam menganalisis media pembelajaran, maka dibawah ini terdapat format analisis media pembelajaran.

b. Pemanfaatan Beberapa Media dalam Ilmu Sosiologi

Berdasarkan macam-macam media di atas serta mempertimbangkan pokok kajian sosiologi-antropologi, berikut ini alternatif media yang dapat dipergunakan untuk materi yang berkarakteristik ilmu sosiologi-antropologi dan biasa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar di kelas.

1). Transparansi

Transparansi atau *overhead transparency* (OHT) sering disebut dengan nama perangkat kerasnya yaitu OHP (*overhead projector*). Media transparansi adalah media visual proyeksi yang dibuat di atas bahan transparan, biasanya film *acetat* atau plastik ukuran 8,5" x 11". Untuk dapat menggunakan transparansi, diperlukan alat untuk memproyeksikan yaitu OHP. Berbagai objek dan pesan yang ditulis atau digambarkan pada transparansi, kemudian diproyeksikan lewat OHP ke arah layar lewat atas kepala atau samping kepala orang yang menggunakannya. Namun begitu, transparansi memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan transparansi :

- a) Penggunaan praktis dan mudah dioperasikan sendiri
- b) Gambar yang diproyeksikan lebih jelas daripada digambar di papan
- c) Guru sambil mengajar dapat berhadapan dengan audien
- d) Benda-benda kecil dapat diproyeksikan dengan meletakkannya di atas OHP, walaupun hasilnya berupa bayang-bayang
- e) Memungkinkan penyajian diskriminasi warna dan menarik minat audien
- f) Tidak memerlukan ruang gelap. Oleh karena itu audien dapat melihatnya sambil mencatat
- g) Dapat digunakan untuk semua ukuran ruangan kelas
- h) Teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan, terutama untuk proses yang kompleks dan bertahap
- i) Dapat dipakai berulang-ulang.

Kelemahan transparansi :

- a) Memerlukan peralatan khusus untuk penampilan, yaitu overhead projektor (OHP) dan kadang-kadang sulit dicarikan suku cadangnya
- b) Memerlukan penataan khusus
- c) Memerlukan kecakapan khusus dalam pembuatannya
- d) Menuntut cara kerja yang sistematis karena susunan urutannya mudah kacau
- e) Untuk teknik penyajian yang kompleks, perlu waktu, usaha, dan persiapan yang baik.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dan penggunaan media transparansi :

1. Prinsip-prinsip desain transparansi:

a) Kesederhanaan

- Satu lembar transparansi hanya memuat satu konsep tunggal
- Penggunaan huruf yang mudah dibaca, gunakan huruf arial (tidak berkait, tebal dan cukup besar minimal 0,6 cm)
- Sebaiknya dalam satu lembar transparansi tidak lebih dari 6–10 baris
- Luas bidang transparansi yang ditulis jangan melebihi ukuran 16x22 cm
- Penggunaan visual (gambar) untuk pesan yang kompleks
- Sesuaikan tinggi huruf dengan jarak layar kepada audien.
- Materi hanya tertera secara garis besar. Oleh karena itu lebih baik menggunakan pointer dari pada uraian.

b) Penekanan/pusat perhatian

- Memperbesar huruf atau menggarisbawahi, atau memberi warna yang berbeda pada kata atau kalimat yang akan ditekan.
- Pemberian warna atau arsir pada gambar atau bagian yang ingin ditekankan untuk menarik perhatian audien.

c) Keseimbangan

- Keseimbangan antara ilustrasi gambar dengan penggunaan tulisan dalam satu lembar transparansi.

d) Keutuhan

- Penampilan pesan sebaiknya dimulai dari keutuhan pesan, baru kemudian diikuti penjelasan terhadap bagian-bagiannya.

2. Proses pengisian topik pada transparansi :

a) Memilih topik sesuai materi

b) Menyiapkan materi yang relevan dengan tujuan yang akan dibuat

c) Identifikasi materi yang sudah terkumpul dan diseleksi mana yang sesuai dengan karakteristik keilmuan

d) Buat skema atau kata-kata kunci pada materi

e) Mulai penulisan naskah transparansi

3. Cara pembuatan :

- a) Membuat rancangan kasar/sketsa di kertas HVS sesuai prinsip-prinsip desain transparansi OHP.
- b) Membuat rancangan final di kertas HVS/milimeter blok.
- c) Memindahkan tulisan dan atau gambar (hasil rancangan) pada plastik transparansi dengan cara :
 - Manual dengan tangan
 - Menjiplak
 - Fotokopi
 - Scan
 - Cetak/print warna/hitam putih

4. Pengaturan Ruang Penyajian

Yaitu pengaturan yang berhubungan dengan kesesuaian letak layar, letak proyektor dan tempat penyajian.

Letak layar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a) Pada sudut depan kelas (kiri atau kanan) dengan posisi agak miring kira-kira condong 30 derajat (dapat diatur dengan alat yang disebut dengan *keystone eliminator* yaitu alat pengukur sudut kecondongan).
 - Posisi ini memungkinkan untuk tetap dapat memfungsikan papan tulis.
 - Pengaturan di atas dapat menghilangkan distorsi proyektor vertikal.
 - Jenis layar yang baik untuk dipakai pada pengaturan seperti ini adalah yang memiliki sudut pantul yang lebar/tajam (140 derajat) seperti jenis *mate*, bentuk *portable* (mudah diangkat dan dipasang).
 - Jika jumlah audien cukup banyak, layar perlu ditinggikan.
- b) Pada bagian depan di tengah-tengah kelas berdekatan dengan papan tulis.
 - Digunakan jika layar memiliki sudut pantul yang sempit.
 - Penyaji berdiri di samping layar, supaya tidak menghalangi pandangan audien ke arah hasil proyeksi.

5. Cara pengoperasian OHP:

Langkah-langkah dalam pengoperasian OHP adalah sebagai berikut:

- a) Tempatkan proyektor pada bangku yang rendah atau pada meja khusus untuk proyektor sehingga stage proyektor dapat sejajar dengan meja tulis.
 - b) Tempatkan layar pada posisi yang dikehendaki tepat berhadapan dengan proyektor dengan jarak $\pm 2,5$ m.
 - c) Periksa tegangan sumber listrik dan sesuaikan dengan tegangan pada peralatan OHP, dan hubungkan OHP dengan sumber listrik.
 - d) Letakkan transparansi pada bidang kaca (stage) OHP.
 - e) Hidupkan proyektor dengan menekan tombol ON/OFF ke posisi ON.
 - f) Pastikan sinar tayangan OHP masuk pada layar
 - g) Gunakan pengontrol elevator untuk menaikkan atau merendahkan gambar pada layar. Pada proyektor tertentu, alat pengontrol itu terdapat pada bagian kepala proyektor.
 - h) Aturilah tombol pengatur fokus sehingga didapatkan hasil gambar yang jelas dan tajam (fokus).
 - i) Hindari menggerak-gerakkan plastik transparansi pada saat OHP hidup karena akan mengganggu audien.
 - j) Pada saat mengganti transparansi OHP harus dimatikan terlebih dahulu
 - k) Aturilah proyektor sampai gambar tepat memenuhi layar. Dekatkan proyektor ke layar untuk menghasilkan gambar yang lebih kecil dan jauhkan bila dikehendaki hasil gambar yang lebih besar.
6. Teknik penampilan tayangan transparansi
- a. Teknik single frame (tunggal)

Teknik ini dipergunakan untuk menampilkan tulisan atau gambar yang cukup disampaikan sekaligus.
 - b. Teknik stripping/masking (buka/tutup)

Teknik ini dilakukan dengan membuka pesan materi pembelajaran yang sedang dibahas dan menutup pesan materi pembelajaran yang belum dibahas yang terdapat dalam satu lembar transparansi yang sama dengan tujuan agar perhatian audien tidak terpecah. Teknik ini dipergunakan untuk menyampaikan materi secara bertahap dan berhubungan satu sama lain.

c. Teknik overlay (tumpang tindih)

Teknik ini menggunakan plastik transparansi lebih dari satu lembar, yang disusun secara berlapis pada satu bingkai, sehingga materi yang disajikan berurutan dari tidak sempurna menjadi sempurna.

Kelemahan dari teknik ini adalah ada kalanya gambar atau materi yang akan disampaikan tidak bisa ditangkap sebagian-sebagian, karena saling tumpang tindih.

d. Teknik animasi

Teknik ini cukup efektif untuk menjelaskan suatu gerak atau proses, menggunakan plastik transparansi dasar yang telah dibuat/gambar tetap dipasang di bawah permukaan bingkai. Gambar atau bagian yang bisa digerakkan dipasang di atas plastik dasar.

7. Teknik penyajian

Setelah melakukan persiapan diri untuk mengajar, termasuk program transparansi dan perangkat OHP untuk penyajian sudah lengkap, penyaji perlu memperhatikan penampilannya dalam menggunakan media pembelajaran OHP sebagai berikut:

- a) Tunjukkan sebagian demi sebagian sesuai materi yang sedang dijelaskan.
- b) Pergunakan alat penunjuk yang baik dengan pointer ke arah materi yang sedang dijelaskan pada plastik transparansi..
- c) Pergunakan ohp dengan cara menghidupkan selama diperlukan dan segera matikan lampu maksimal setelah penggunaan 10 menit. Kekuatan lampu ohp sekitar 60 – 90 jam.
- d) Hindari posisi duduk atau berdiri yang dapat menghalangi pandangan audien ke layar.
- e) Jangan memasang atau memindahkan transparansi di atas ohp dalam keadaan ohp sedang menyala.

8. Teknik penyimpanan/perawatan transparansi :

Setelah produk transparansi selesai dibuat, maka setiap lembar transparansi itu perlu penanganan sebagai berikut :

- a) Urutkan nomor bingkai atau lembar transparansi dimulai dengan nomor urut 1 untuk lembar pertama, dan begitu seterusnya pada lembar-lembar berikutnya.
- b) Sisipkan kertas polos pada setiap antar lembarnya, gunanya untuk mencegah agar tidak lengket antar lembarnya.
- c) Masukkan transparansi pada map tersendiri untuk setiap satu bahasan. Berilah judul atau keterangan pada map tersebut sesuai isi transparansi.
- d) Simpan program-program transparansi OHP pada filling kabinet atau almari dalam keadaan siap pakai.

2). Klipping

Klipping merupakan guntingan/potongan gambar atau tulisan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari majalah, surat kabar, buku, kalender, katalog, iklan dan poster.

Klipping dapat membantu dalam mencari informasi sehubungan dengan topik-topik tertentu, misalnya: klipping tentang konflik sosial (berupa gambar peristiwa demonstrasi di bundaran HI Jakarta, tulisan-tulisan atau artikel yang membahas tentang konflik yang terjadi pada suatu daerah); klipping tentang peninggalan budaya (berupa gambar-gambar bangunan kuno, misalnya, candi-candi, prasasti, dan lain-lain).

Topik yang terhimpun dalam klipping dapat menunjukkan perkembangan suatu masalah, macam-macam perkara, tempat kejadian, tanggapan, dan sebagainya. Perkembangan topik lebih banyak didasarkan oleh berjalannya waktu.

Kelebihan klipping:

- a. Biaya yang relatif murah.
- b. Mudah membuatnya.

- c. Bisa dipakai/digunakan sewaktu-waktu.

Kelemahan kliping:

- a. Tidak setiap saat dapat ditemukan kliping yang sesuai bahasan.
- b. Tidak setiap kliping terdapat gambar yang disertai tulisan.
- c. Kesalahan menafsirkan gambar.
- d. Tulisan bersifat subyektif.

Cara membuat kliping :

- a. Tentukan tema bahasan
- b. Cari tulisan atau gambar yang sesuai dengan tema di surat kabar atau majalah.
- c. Guntinglah kliping dan tempelkan di kertas HVS
- d. Tulislah nama majalah/surat kabar dan tanggal terbit dimana kliping diambil, di atas atau di bawah kliping.
- e. Sebelum dijilid, kumpulan kliping bisa disimpan dalam ordner atau map.
- f. Setelah jumlah kliping mencapai yang diinginkan, bisa dijilid.

3). Slide

Slide (film bingkai) merupakan suatu film transparansi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2 x 2 inci. Bingkai terbuat dari karton atau plastik. Slide diproyeksikan melalui slide proyektor. Sedang jumlah slide dan lama penayangan tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Namun pada slide yang dikombinasikan dengan suara, pada umumnya berkisar 10 – 30 menit dengan jumlah gambar 10 – 100 buah lebih.

Keuntungan slide :

- 1. Urutan gambar dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- 2. Isi materi yang sama dalam gambar-gambar slide dapat disebar dan digunakan di berbagai tempat secara bersamaan.
- 3. Dapat menarik perhatian dan membangun persepsi audien yang sama, terhadap konsep dan pesan yang disampaikan.
- 4. Dapat ditayangkan dalam ruangan yang terang dan dinding dapat dijadikan tempat proyeksi gambar.

5. Slide dapat menyajikan gambar dan grafik untuk berbagai ilmu dan usia baik secara kelompok atau perorangan.
6. Slide dapat menyajikan peristiwa masa lalu atau peristiwa di tempat lain. Disamping itu, obyek yang besar, berbahaya atau terlalu kecil, dapat ditayangkan dengan jelas.

Kelemahan slide :

1. Gambar dan grafik yang disajikan tidak bergerak, kurang menarik.
2. Slide yang terlepas-lepas, memerlukan perhatian penyimpangannya agar tidak tercecer atau hilang.
3. Memerlukan alat proyeksi dan ruang gelap.

Cara menggunakan slide :

1. Masukkan film slide pada tray sesuai dengan nomor urut slide (sesuai yang direncanakan). Cara memasang gambar dibalik.
2. Pasang pengunci frame (tutup frame, sehingga frame tidak mudah tertumpah dari tray).
3. Hubungkan power cable ke stop kontak.
4. Hidupkan proyektor dengan menggunakan power switch.
5. Atur focus knob dan elevation knob sehingga diperoleh gambar yang tajam.
6. Tekanlah tombol advance. Jika penjelasan gambar telah direkam, maka aturlah agar gambar yang ditunjukkan sesuai dengan penjelasan yang sedang diberikan. Melalui remote control, gunakan untuk memajukan dan mengundurkan frame serta mengatur kejelasan gambar dari jauh (dihubungkan dengan kabel). Dengan demikian, pemapar dapat berdiri agak jauh dengan proyektor.

Cara membuat produksi slide :

1. Lakukan perencanaan dan persiapan yang matang agar terjadi keserasian antara gambar yang dibuat dengan tujuan yang ingin dicapai. Langkah-langkahnya menurut Ibrahim sebagai berikut :

a. Mulai dengan ide

Ide dapat diperoleh dari surat kabar, majalah, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, dan sebagainya. Misalnya untuk menjelaskan beberapa bahasan materi sosiologi, orang akan lebih tertarik kalau diberikan contoh realita yang ada. Agar pemahaman mereka lebih baik, maka timbullah ide agar setiap pembahasan, setelah diberikan penjelasan secukupnya, mereka diminta memberikan contoh dari kehidupan lingkungan sekitarnya.

b. Perumusan tujuan

Ide yang ada, dijabarkan dalam bentuk perumusan tujuan yang jelas dan terperinci ke dalam kompetensi dasar.

Misal: audien mampu memberikan contoh kasus tentang perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat sekitar tempat tinggalnya.

c. Mempertimbangkan audien

Agar apa yang disampaikan mudah dipahami atau diterima audien, maka beberapa karakteristik perlu dipertimbangkan sebelum akhirnya memilih media tertentu. Karakteristik tersebut antara lain : umur, tingkat pendidikan, dasar pengetahuan/keterampilan yang dimiliki, kemampuan bahasa, dan sebagainya.

d. Menentukan kerangka dan isi bahan materi

e. Merencanakan partisipasi audien

f. Menentukan pembentukan tata produksi

g. Menulis treatment

h. Membuat story-board (papan cerita)

i. Menyusun skrip

j. Mempertimbangkan waktu presentasi.

k. Merencanakan pelaksanaan produksi

l. Membuat jadwal pembuatan/pengambilan gambar (potret)

m. Editing/pengguntingan

n. Penilaian formatif

o. Penyempurnaan/revisi

p. Menyusun petunjuk penggunaan

- q. Penggunaan dan penilaian
2. Kualitas gambar slide, tergantung dari ketepatan pengambilan gambar. Ikuti petunjuk teknis memotret. Guna menghindari kegagalan, buatlah slide dua atau tiga rol, untuk menghasilkan slide satu rol. Setelah dicuci, pilih gambar terbaik yang diambil.
 3. Pada waktu memberikan keterangan gambar, perlu diperhatikan bahwa keterangan fungsinya melengkapi kejelasan informasi yang disampaikan dengan gambar. Misalnya waktu ditunjukkan gambar peristiwa demonstrasi, dimana ada polisi yang berjejer memperhatikan peserta demonstrasi, beberapa orang yang membawa spanduk protes, dan orator dengan mikrofonnya, lalu dijelaskan : “Ini adalah gambar demonstrasi.” Karena gambarnya sudah jelas tentang demonstrasi, maka komentar yang diberikan, misalnya “Bagaimana pendapat Anda tentang peristiwa ini?” dan sebagainya.
 4. Gambar slide bisa diperoleh dengan memotret langsung obyek atau dengan pengambilan gambar dari gambar potret yang sudah jadi. Caranya dengan menggunakan copy stand. Pilihlah gambar potret yang sudah jelas baik dan sesuai kebutuhan.

4). Audio Tape Recorder (ATR)

Audio tape recorder merupakan media audio yang memberikan rangsangan suara atau isi pesan yang disampaikan hanya diterima oleh indera pendengaran. ATR berupa alat perekam pita magnetik. Misalnya rekaman atas berita suatu peristiwa sosial tertentu sebagai pengantar pembuka sebelum masuk ke pembahasan pokok materi pembelajaran.

Kelebihan ATR:

- a) Memiliki fungsi ganda dapat menyajikan hasil rekaman, dapat merekam dan dapat menghapus rekaman.
- b) Penyaji dapat menggunakan ATR dalam pembelajaran sesuai jadwal yang ada di sekolah. Jika ada yang kurang jelas dapat diulang-ulang.
- c) Dapat menyajikan hal-hal yang terjadi di luar kelas/sekolah, misalnya hasil wawancara, rekaman hasil diskusi atau seminar, dan sebagainya.

Kelemahan ATR:

- a) Komunikasi satu arah.
- b) Daya jangkau terbatas (tidak seperti radio).
- c) Isi pesan hanya didengar sehingga cepat dilupakan.

5). *Opaque projector*

Proyektor opaque adalah alat yang dapat dipakai untuk memproyeksikan benda yang tidak tembus pandang, seperti : gambar, tulisan, potret, lukisan dan berbagai benda asli (batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, dan fosil) dengan ukuran yang kecil sehingga dapat ditempatkan pada proyektor opaque. Hasil bayangan yang diproyeksikan lebih besar sehingga lebih menarik dari bahan aslinya.

Kelebihan Opaque Proyektor:

- a) Bahan pembelajaran dari media cetak gambar atau tulisan dapat langsung diproyeksikan tanpa memindah dulu ke transparan atau yang lain.
- b) Benda asli yang kecil langsung dapat diperbesar, sehingga dapat diamati secara klasikal.
- c) Dapat digunakan untuk semua bidang studi.

Kelemahan Opaque Proyektor:

- a) Memerlukan ruangan gelap
- b) Memerlukan persiapan penyajian bahan pembelajaran yang khusus direncanakan, sehingga dapat efektif (bukan sekedar menunjukkan gambar yang ada di buku pegangan penyaji).

6). *Video Tape Recorder (VTR)*

Video tape recorder (VTR) atau rekaman video adalah alat perekam gambar dan suara sekaligus. Dengan demikian memiliki kemampuan yang dimiliki baik media audio, visual dan film. Pada saat diperlukan gambar dan suara dapat ditayangkan lagi, dan jika sudah tidak diperlukan lagi dapat dihapus. Media video cocok untuk menayangkan gerakan atau sesuatu yang bergerak.

Kelebihan *video tape recorder* :

- a) Dapat menayangkan obyek atau kejadian mendekati/sama dengan keadaan aslinya.
- b) Dapat memperjelas informasi dengan teknik manipulasi baik ukuran, warna maupun kecepatan
- c) Dapat menayangkan obyek atau kejadian mendekati/sama dengan keadaan aslinya.
- d) Dapat memperjelas informasi dengan teknik manipulasi baik ukuran, warna maupun kecepatan.
- e) Dapat memperjelas informasi dengan cara diulang-ulang penayangannya.
- f) Gambar yang ditayangkan dapat diberhentikan (dibekukan) untuk diamati sejenak dengan secara seksama. Penyaji dapat mengatur atau mengontrol penayangan gambarnya.
- g) Tidak memerlukan ruangan gelap.

Kelemahan *video tape recorder* :

- a) Komunikasi satu arah
- b) Penggunaannya memerlukan seperangkat alat yang kompleks dan relatif mahal (video tape recorder, tv monitor, kamera video, kaset video dan mikropon)
- c) Jenis dan format video belum standart (tias jenis/merk memiliki tipe sendiri).

Ada beberapa topik bahasan atau kajian sosiologi-antropologi yang telah terekam dalam bentuk kaset dan diperjualbelikan. Sehingga penyaji cukup membeli dan menayangkan dalam kelas tanpa harus melalui proses pembuatan rekaman. Misalnya: video tentang Candi Borobudur atau benda-benda budaya lainnya.

7). Gambar/foto

Dengan gambar dan foto bisa mewakili banyak kata. Hal ini bisa dibuktikan saat melihat gambar, kemudian menceritakan tentang gambar tersebut. Maka jika dituangkan dalam bentuk tulisan akan memerlukan berlembar-lembar kertas

Beberapa kelebihan media gambar :

- a. Sifatnya konkrit, artinya lebih menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal.
- b. Gambar dapat mengatasi ruang dan waktu, karena tidak semua benda, objek dan peristiwa dapat dibawa ke kelas.
- c. Dapat mengatasi keterbatasan pengamatan seseorang.
- d. Murah harganya, mudah didapat dan digunakan, tanpa peralatan khusus.

Berikut ini kelemahan gambar atau foto :

- a. Gambar/foto hanya menekankan persepsi indera mata
- b. Gambar/foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran
- c. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar.

Sebelum mengambil gambar untuk media perlu diperhatikan kriteria berikut ini :

- a) Keaslian gambar. Gambar menunjukkan situasi yang sebenarnya, seperti melihat keadaan atau benda sesungguhnya.
- b) Kesederhanaan. Sederhana dalam warna, menimbulkan kesan tertentu, mempunyai nilai estetis secara murni dan mengandung nilai praktis.
- c) Bentuk item. Pengamat dapat memperoleh tanggapan yang tepat tentang obyek dalam gambar, misal gambar dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya.
- d) Perbuatan. Gambar menunjukkan hal yang sedang melakukan suatu perbuatan.
- e) Fotografi. Orang dapat lebih tertarik pada gambar yang nilai fotografinya rendah dimana dikerjakan tidak profesional. Misalnya terlalu gelap atau terlalu terang. Kekurangan dalam fotografis tidak akan mengurangi nilai kegunaannya.
- f) Artistik. Segi artistik harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Karena gambar yang bagus belum tentu efektif dalam pembelajaran.

Cara penyampaian media gambar di kelas, hampir sama dengan gambar slide, yaitu pada waktu memberikan keterangan gambar, diperlukan adanya keterangan secara verbal untuk melengkapi kejelasan informasi yang disampaikan melalui media gambar. Contohnya: pada bahasan tentang keanekaragaman budaya di Indonesia, penyaji dapat memakai gambar aneka

bentuk pakaian adat dan rumah adat yang ada di Indonesia, dan lain-lain. Tentu saja pada saat menunjukkan gambar-gambar, penyaji harus menerangkan keterangan gambar tersebut secara verbal.

8). Model dan relia

Banyak orang percaya bahwa belajar melalui pengalaman langsung atau melihat benda aslinya akan lebih menarik. Namun semua itu sebenarnya mempunyai sejumlah keterbatasan, dan ini akan teratasi dengan model. Misalnya berbagai benda-benda hasil kebudayaan masa lampau, seperti candi-candi dan alat atau senjata tradisional, akan sangat menarik jika penyaji dapat menunjukkannya dalam proses pembelajaran di kelas.

Namun banyak peninggalan benda-benda budaya itu yang tidak mungkin dibawa masuk ke kelas, karena berbentuk bangunan (terlalu besar dan berat), benda yang dikeramatkan dan yang tidak setiap saat bisa dijumpai (benda-benda pusaka), dan sebagainya, sehingga untuk keperluan proses pembelajaran perlu dibuatkan model. Namun karena pembuatannya memerlukan ketrampilan khusus dan membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi, maka biasanya guru bisa langsung membeli. Banyak model-model candi atau model-model benda pusaka dijual di sekitar obyek wisata.

Model adalah media tiga dimensi, berupa tiruan yang menggambarkan suatu benda/alat yang mirip dengan aslinya yang diperkecil atau diperbesar tergantung dari tujuan penggunaannya.

Keuntungan penggunaan model:

- a) Model berbentuk tiga dimensi
Walaupun bukan benda sebenarnya, model merupakan wakil yang terbaik bagi benda aslinya
- b) Dengan adanya perubahan ukuran, model lebih mudah dipelajari. Misalnya model dari candi Borobudur yang diperkecil.
- c) Dapat mempertunjukkan struktur bagian pada suatu benda atau bangunan karena orang hampir tidak memungkinkan untuk melihat dalam keadaan aslinya. Misalnya, benda atau bangunan yang letaknya terlalu tinggi atau terlalu jauh; benda yang tidak semua orang boleh melihat atau memegang

(karena dianggap keramat, misalnya benda-benda pusaka); benda-benda yang tidak setiap saat bisa dijumpai.

- d) Kekonkritan yang tidak langsung
Melalui model audien dapat mendapatkan pengalaman yang konkrit walaupun tidak melalui benda aslinya.

Kelemahan model atau relia :

- a) Keterbatasan pembuat model pada benda aslinya
- b) Ukuran yang kurang seimbang pada detail model
- c) Pembuatan rumit dan perlu tingkat ketelitian yang tinggi
- d) Model tidak banyak dijumpai/dijual pada sembarang toko.

9). Diorama

Diorama ialah kotak yang melukiskan suatu pemandangan yang mempunyai latar belakang dengan perspektif yang sebenarnya, sehingga menggambarkan suatu suasana yang sebenar-benarnya. Diorama merupakan gabungan antara model dengan gambar perspektif dalam suatu penampilan yang utuh. Jadi bukan hanya bangunan atau satu peninggalan saja tetapi kegiatan atau peristiwa yang penting.

Misalnya, diorama kehidupan manusia prasejarah. Beberapa bentuk model manusia purba yang sedang duduk berjongkok membuat perapian untuk memanggang hewan buruan, dan ada model manusia purba yang lain sedang berdiri memegang tombak. Semetara ada gambar bukit dengan pepohonan yang melatar belakang model-model manusia purba tersebut. Diorama tersebut dapat dipergunakan guru untuk menjelaskan tata cara kehidupan masa lampau yaitu *hunting and food gathering* (berburu dan meramu makanan).

Secara umum diorama yang bagus bisa dijumpai pada museum-museum besar. Namun demikian dalam skala kecil diorama bisa dibuat sendiri, namun diperlukan ketrampilan khusus dan daya kreatifitas yang besar serta tingkat ketelitian yang tinggi.

Keuntungan penggunaan diorama memberi kesan visual yang diterima audien lebih hidup. Sedangkan kelemahan penggunaan diorama :

- a) Konsentrasi audien terpecah karena terbawa pemikiran-pemikiran lain yang tidak sesuai bahasan setelah asyik memandangi diorama.
- b) Audien harus melihat dari jarak dekat.
- c) Tingkat kesulitan yang tinggi dalam pembuatannya.

10). Lingkungan masyarakat sebagai media pembelajaran

Seperti dijelaskan di depan, bahwa membawa audien pada pengalaman langsung atau melihat sendiri obyek akan lebih mempermudah bagi penyaji untuk mengintegrasikan materi di kelas dengan kehidupan nyata di masyarakat. Terlebih untuk materi sosiologi-antropologi yang pokok kajiannya adalah masyarakat dan sekitarnya.

Lingkungan masyarakat untuk bahasan sosiologi-antropologi bisa meliputi benda hidup (manusia), benda mati (benda-benda budaya) dan tata cara kehidupannya. Sebagai benda hidup, manusia mengadakan interaksi untuk melangsungkan kehidupannya. Akibat interaksi sosial itu akan menimbulkan kebudayaan.

Hasil budaya ini bisa merupakan benda mati dan suatu tata cara kehidupan. Benda mati misalnya candi, alat bercocok tanam, alat transportasi. Sedangkan tata cara kehidupan, bisa berupa aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat. Oleh karena itu pendidikan perlu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dari hal tersebut, maka masyarakat dan budayanya dapat dijadikan sumber dan media yang luas dalam memperoleh pengalaman belajar.

Lingkungan masyarakat sebagai media pembelajaran, agar mengenai sasaran -artinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran- diperlukan metode-metode tertentu yang menyertainya. Metode yang dapat dipakai dalam mengoptimalkan lingkungan masyarakat sebagai media antara lain widya wisata (*field trip*), nara sumber, berkemah, pengabdian sosial, dan survei. Namun dalam pembahasan nanti akan dijelaskan tentang widya wisata dan nara sumber.

Agar media lingkungan masyarakat bermakna bagi audien, diperlukan kreatifitas dan inisiatif pendidik selain kerja sama dengan audien dan lembaga-lembaga masyarakat lain yang terkait.

a) Kunjungan studi/widya wisata (*field trip*)

- (1). Keuntungan-keuntungan kunjungan studi/widya wisata:
 - a. Pengalaman langsung dengan benda sebenarnya akan memberikan kesan yang lebih kuat, dengan demikian akan membuat hasil belajar lebih mantap.
 - b. Membangkitkan minat untuk menyelidiki dan menemukan sesuatu.
 - c. Melatih seni hidup bersama, menjalankan tugas dan bertanggung jawab.
 - d. Lebih mudah mengintegrasikan antara pengajaran di kelas dengan kehidupan nyata di masyarakat.
- (2). Kelemahan kunjungan wisata/widaya wisata:
 - a. Masalah waktu
 - b. Jika tidak ada rancangan yang baik, disamping mengganggu audien dalam kegiatan rutusnya juga akan memboroskan waktu saja
 - c. Memerlukan biaya, tenaga dan tanggung jawab ekstra. Disamping biaya yang dikeluarkan di luar biaya rutin sekolah, tenaga yang dikeluarkan juga memerlukan pengelolaan yang penuh tanggung jawab baik dari audien maupun instruktur. Karena bagaimanapun perjalanan semacam ini mengandung banyak resiko.
 - d. Obyek kunjungan kurang memenuhi syarat untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Misalnya, obyek yang terlalu berbahaya atau terlalu rumit.
- (3). Langkah-langkah kunjungan studi/widya wisata:
 - a. Menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui kunjungan studi/widya wisata
 - b. Jika terkait dengan instansi tertentu, persiapan prosedur perijinan harus dipenuhi. Dipilih kurir yang cekatan, sehingga mereka dapat menyelidiki dahulu kondisi dari obyek yang akan dikunjungi. Buatlah perjanjian dengan instansi yang akan dikunjungi.
 - c. Meminta persetujuan dan kerja sama dengan orang tua audien.

- d. Persiapkan dengan teliti perlengkapan yang perlu dibawa untuk selama perjalanan dan saat sudah sampai di tempat tujuan, termasuk untuk keamanannya.
- e. Penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan termasuk pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus dipersiapkan selama di tempat tujuan.
- f. Penjelasan tentang tata tertib selama kegiatan berlangsung.
- g. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan di kelas yang meliputi : pelaporan, diskusi, evaluasi pelaporan (untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai) dan mengumpulkan saran-saran (untuk kegiatan yang akan datang).
- h. Selanjutnya pengarsipan semua dokumentasi yang telah diperoleh selama kegiatan agar dapat digunakan sewaktu-waktu.

b) Nara sumber

Nara sumber adalah mereka yang mempunyai pengalaman luas atau pejabat khusus yang dapat memberikan informasi atau data yang akurat dan autentik terhadap suatu hal. Misalnya tokoh-tokoh masyarakat yang dapat memberikan informasi mengenai pengalaman yang khusus atau pejabat-pejabat khusus yang memiliki data atau informasi yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Atau dapat pula orang yang mengalami atau terlibat dalam suatu kondisi tertentu. Misalnya ingin mengetahui kehidupan masyarakat yang teralienasi secara ekonomi, maka bisa dicarikan sumber dari buruh tani, pemulung, pengemis, dan lain-lain.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh penyaji dalam menggunakan sumber masyarakat sebagai nara sumber, yaitu:

- a. Mengundang anggota masyarakat atau tokoh masyarakat ke dalam kelas untuk berbicara langsung mengenai topik bahasan. Umumnya nara sumber yang bersangkutan berbicara mengenai pengalaman hidup mereka sehari-hari maupun masa lalunya.
- b. Mengunjungi langsung anggota atau tokoh masyarakat di tempat mereka tinggal atau berada. Oleh karena itu audien perlu diberi penjelasan dahulu tentang tujuan kunjungan itu dan mereka harus menyiapkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa mereka ajukan (sebagai pedoman wawancara).

Pemilihan nara sumber sebagai metode pembelajaran hendaknya perlu dipertimbangan beberapa hal, antara lain :

- a) Nara sumber diundang karena pengetahuan atau pengalaman khusus yang dimilikinya.
- b) Nara sumber adalah orang yang pandai menyampaikan sajian secara jelas, sebab sajian yang efektif dapat mendorong tumbuhnya perhatian.
- c) Nara sumber adalah mereka yang mempunyai pandangan luas dan terbuka atau tidak berat sebelah.
- d) Nara sumber perlu mempunyai sesuatu pesan.
- e) Akan lebih baik jika nara sumber adalah mereka yang tertarik atau punya kepedulian terhadap anak-anak.

6.Pembelajaran Berbasis Multimedia

Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafis, animasi dan video. Sehingga pengertian pembelajaran berbasis multimedia itu sendiri dapat disimpulkan sebagai kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggunakan *link* dan *tool* yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi.

Sajian pembelajaran berbasis multimedia presentasi merupakan sajian pembelajaran yang dapat digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoretis digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan group belajar yang cukup banyak. Media ini cukup efektif sebab menggunakan multimedia *projector* yang memiliki jangkauan pancar cukup besar. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan *sound* menjadi satu kesatuan penyajian sehingga dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki tipe visual, auditif maupun kinestetik.

Hal ini didukung oleh teknologi perangkat keras yang berkembang cukup lama. Disamping itu, perangkat lunak juga memungkinkan presentasi dapat dikemas dalam bentuk multimedia yang dinamis dan sangat menarik.

Dilihat dari kaidah pembelajaran, multimedia presentasi dapat meningkatkan kadar hasil belajar yang tinggi, sangat ditunjang oleh penggunaan media pembelajaran. Melalui media, potensi indra peserta didik dapat diakomodasi sehingga kadar hasil belajar menjadi meningkat.

Program Aplikasi Presentasi

Program aplikasi presentasi merupakan paket dari program komputer yang digunakan untuk membantu penggunaannya dalam mengolah bahan presentasi. Beberapa program aplikasi presentasi diantaranya yaitu :

1. Corel Presentation

Corel Presentation merupakan aplikasi komersial seperti *Microsoft Office*. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang lumayan lengkap dan *interface* yang mudah. Fitur tersebut seperti koleksi foto dan gambar yang cukup banyak, *font* beragam dan harganya lebih murah dari *Microsoft Office*,

2. Kpresenter

Kpresenter adalah program presentasi yang merupakan bagian dari *KOffice*, paket aplikasi *office* terintegrasi untuk desktop KDE. Format native Kpresenter adalah XML, dikompresi dengan zip. Kpresenter juga dapat mengimpor presentasi dari *Microsoft Power Point*, *Magicpoint*, dan *OpenOffice, org Impress*,

3. Oo Impress

Openoffice.Org Impress dikenal dengan sebutan IMPRESS, adalah perangkat lunak untuk membuat presentasi multimedia dari media interaktif.

4. Microsof Power Point

Microsoft Power Point merupakan sebuah perangkat lunak dari program aplikasi untuk presentasi yang dikembangkan oleh *Microsoft*. Program aplikasi presentasi ini merupakan program yang paling populer dan paling banyak digunakan saat ini oleh kalangan perkantoran, para pendidik, para peserta didik, dan masyarakat umum untuk berbagai kepentingan presentasi, baik pembelajaran, presentasi produk, meeting, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Dengan menggunakan Power Point, pendidik dapat membuat presentasi secara professional dan jika perlu hasil presentasi tersebut dapat

dengan mudah ditempatkan di server web sebagai halaman web untuk diakses, sebagai bahan pembelajaran atau informasi lainnya. Program aplikasi Power Point dirancang untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, penggunaan serta relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk penyimpanan data (data storage).

7. Teknik Pengembangan Multimedia Presentasi

Membuat program presentasi multimedia dengan power point dapat dilakukan dengan prosedur pembuatan seperti dibawah ini :

1. Identifikasi program, dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara program yang dibuat dengan materi dan sasaran (peserta didik).
2. Mengumpulkan bahan pendukung sesuai dengan kebutuhan materi dan sasaran seperti video, gambar, animasi dan suara. Bersamaan dengan itu, dilakukan juga penyusunan materi yang diambil dari bahan utama. Materi untuk power point sebaiknya dikemas menjadi uraian pendek, pokok-pokok pembahasan atau pointer-pointer.
3. Setelah bahan terkumpul dan materi sudah dirangkum, selanjutnya proses pengerjaan di power point hingga selesai. Setelah itu, dapat mengubah hasil akhir presentasi apakah dalam bentuk slide show, web pages, atau *executable file (exe)*.
4. Setelah presentasi selesai dibuat dan tidak langsung digunakan, sebaiknya dilakukan review program dari sisi bahasa, teks, tata letak, dan kebenaran konsep, selanjutnya direvisi dan siap digunakan untuk dipresentasikan.

Kelebihan Menggunakan Aplikasi Multimedia Presentasi

Adapun kelebihan atau keuntungan dalam menggunakan multimedia interaktif dalam media pembelajaran diantaranya sebagai berikut :

- a) Penggunaan media yang relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku sebagai alat penyimpanan data (*data storage*),
- b) Sistem pembelajaran lebih kreatif, inovatif, dan interaktif,
- c) Pendidik akan dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari bahan pembelajaran,

- d) Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi bergerak, atau video dalam satu kesatuan penyajian sehingga dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki tipe visual, auditif maupun kinestetik guna tercapainya tujuan pembelajaran tersebut.
- e) Menambah motivasi belajar peserta didik selama proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan,
- f) Mampu memvisualisasikan materi yang sulit untuk diterangkan hanya sekedar dengan penjelasan atau peraga yang konvensional,
- g) Melatih peserta didik lebih mandiri dalam mendapatkan pengetahuan,
- h) Penggunaan perangkat lunak multimedia dalam proses mengajar.
- i) Menurut Davis dan Crowther, akan meningkatkan efisiensi dan motivasi, memfasilitasi belajar eksperimental, konsisten belajar terpusat pada peserta didik serta dapat memandu untuk belajar lebih baik.
- j) Dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian peserta didik, kualitas belajar dan sikap belajar peserta didik dapat ditingkatkan,
- k) Dapat mengaktifkan peserta didik dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong peserta didik untuk melakukan praktek-praktek dengan benar,
- l) Penggunaannya mudah dan fleksibel serta penyajian materi dapat dibuat/dirancang,
- m) Dapat digunakan secara individu,
- n) Pembelajarannya dapat diulang-ulang sehingga dapat menghemat waktu serta lebih efisien.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta didik menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
 - Memahami dan mencermati materi diklat

- Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar,
 - Menyimpulkan
 - Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi :
- Mendiskusikan materi pelatihan
 - Bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
 - Melaksanakan refleksi

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Identifikasikan media pembelajaran yang Anda anggap sesuai dan efektif untuk menjelaskan konsep materi pembelajaran!

No	Kelas	Kompetensi Dasar	Materi	Media	Bahan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

F. Rangkuman

Media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, ataupun dibicarakan beserta instrumennya yang dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional.

Banyak cara diungkapkan untuk mengidentifikasi media serta mengklasifikasikan karakteristik fisik, sifat, kompleksitas, ataupun klasifikasi menurut kontrol pada pemakai. Namun demikian, secara umum media bercirikan tiga unsur pokok, yaitu: suara, visual, dan gerak, yang jika diklasifikasi kan ada tujuh, yaitu:

1. Media audio visual gerak, seperti: film suara, pita video, film televisi.
2. Media audio visual diam, seperti: film rangkai suara, dan sebagainya.
3. Audio semi gerak seperti: tulisan jauh bersuara.
4. Media visual bergerak, seperti: film bisu.
5. Media visual diam, seperti: halaman cetak, foto, *microphone*, *slide* bisu.
6. Media audio, seperti: radio, telepon, pita audio.
7. Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri.

Secara sederhana kehadiran media dalam suatu kegiatan pembelajaran memiliki nilai-nilai praktis sebagai berikut:

1. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki para siswa.
2. Media yang disajikan dapat melampaui batasan ruang kelas.
3. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya.
4. Media yang disajikan dapat menghasilkan keseragaman pengamatan siswa.
5. Secara potensial, media yang disajikan secara tepat dapat menanamkan konsep dasar yang kongkrit, benar, dan berpijak pada realitas.
6. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru.
7. Media mampu membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar.
8. Media mampu memberikan belajar secara integral dan menyeluruh dari yang kongkrit ke yang abstrak, dari sederhana ke rumit.

Berikut ini dikemukakan pengelompokan media pendidikan menurut karakteristiknya, meliputi: media asli dan media tiruan, media grafis, media bentuk papan, media yang disorotkan, media dengar, media pandang dengar (audio-visual aids), dan media cetak (printed materials),

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran untuk mempertinggi hasil pembelajaran.

1. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran

2. Cara mencapai tujuan
3. Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran, bahan atau materi yang bersifat fakta, konsep, prinsip dan generalisasi
4. Kemudahan memperoleh media,
5. Sesuai dengan taraf berpikir siswa,
6. Sesuai dengan waktu yang tersedia

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam memilih media maka perlu sekali lagi diingat rambu-rambu sebagai berikut: (1) relevan dengan tujuan; (2) bagaimana tujuan hendak dicapai; (3) menarik bagi siswa; (4) memotivasi belajar siswa; (5) ketepatangunaan; (6) tingkat kesulitan; (7) bermanfaat bagi siswa; (8) tidak ketinggalan jaman; dan (9) dapat diusahakan sekolah

Langkah-langkah secara terinci dalam menganalisis media pembelajaran

- a. Memahami Standar Kompetensi
- b. Memahami Kompetensi Dasar
- c. Menentukan materi
- d. Mencari Alternatif Media
- e. Menentukan media yang dipilih

Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafis, animasi dan video. Sehingga pengertian pembelajaran berbasis multimedia itu sendiri dapat disimpulkan sebagai kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggunakan *link* dan *tool* yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi.

Program aplikasi presentasi merupakan paket dari program komputer yang digunakan untuk membantu penggunaannya dalam mengolah bahan presentasi. Beberapa program aplikasi presentasi diantaranya yaitu :Corel Presentation, Kpresente, rOo Impress, Microsof Power Point

G. Umpan Balik

1. Setelah membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini apakah Anda memperoleh pengetahuan baru, yang sebelumnya belum pernah Anda pahami, apakah materi yang diuraikan mempunyai manfaat dalam mengembangkan materi media pembelajaran ini?.
2. Setelah Anda membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini rencana tindak lanjut apa yang akan Anda lakukan?

Kegiatan Pembelajaran 2

Analisis Media Pembelajaran

A. TUJUAN

Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini, peserta diklat mampu melakukan analisis media pembelajaran dengan benar

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Menjelaskan konsep media pembelajaran
2. Menjelaskan kriteria pemilihan media pembelajaran
3. Mengklasifikasikan jenis-jenis media pembelajaran
4. Menganalisis prinsip dan pemilihan media pembelajaran
5. Melakukan analisis kebutuhan media pembelajaran
6. Membuat media pembelajaran manual

C. URAIAN MATERI

1. Pendahuluan

Departemen Pendidikan Nasional berupaya untuk melakukan pergeseran paradigma dalam proses belajar, yaitu dari *teacher active teaching* bergeser menjadi *student active learning*, artinya orientasi pembelajaran *teacher centered* (berpusat pada guru) disempurnakan menjadi *student centered* (berpusat pada siswa). Untuk itu guru akan lebih berperan sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi siswa dalam belajar, dan siswa sendirilah yang harus aktif belajar dari berbagai sumber belajar.

Salah satu sumber belajar yang sangat potensial dan diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap sistem belajar yang berpusat kepada siswa ialah media pembelajaran, yang bisa berupa media cetak, audio, audio visual, interaktif dan lain-lain.

Guru diharapkan mampu memberdayakan semua potensi yang ada di lingkungannya, sehingga dalam pembelajaran berlangsung sesuai dengan konteks setempat, mampu memotivasi, menciptakan suasana yang

menantang, mendorong kemandirian, dan melatih peserta didik mengambil keputusan secara

2. Pengertian Media Pembelajaran

Menurut Heinich, Molenda, dan Russel (dalam *Instructional Media*, 1990) diungkapkan bahwa media "is a channel of communication. Derived from the latin word for "between", the term refers "to anything that carries information between a source and a receive.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar.

Association for Educational Communication Technology/AECT (1971) mengartikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan *National Educational Association/NEA* mengartikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, ataupun dibicarakan beserta instrumennya yang dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Briggs (1970) mengartikan media sebagai alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa belajar. Hamidjojo (dalam Dirgo Soemarto, 1981) berpendapat bahwa media adalah segala bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebarkan ide sehingga gagasan tersebut sampai pada si penerima. Blake dan Hoalsen (1987) juga mengemukakan bahwa media adalah saluran komunikasi atau medium tersebut merupakan jalan atau alat antara komunikator dengan komunikan. Atwi Suparman (1996:177) mengartikan media sebagai alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Pengirim dan penerima pesan tersebut dapat berbentuk orang atau lembaga, sedangkan media tersebut dapat berupa alat-alat elektronik, gambar, buku, dan sebagainya. Gerlach dan Ely dalam *Teaching and Media* mengartikan media dalam dua cara yaitu arti luas dan arti sempit. Media dalam arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang meliputi orang, material, kejadian yang dapat menciptakan kondisi sehingga memungkinkan siswa belajar.

Dalam arti sempit yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang meliputi grafik, gambar, alat-alat elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses, serta menyampaikan informasi. Robert Gagne dalam *The Condition of Teaching* menjabarkan pengertian media yang dapat divisualkan sebagai guru, obyek, berbagai macam alat dari buku sampai dengan televisi yang digunakan untuk menunjukkan komponen lingkungan belajar yang dapat merangsang siswa sehingga terjadi proses belajar.

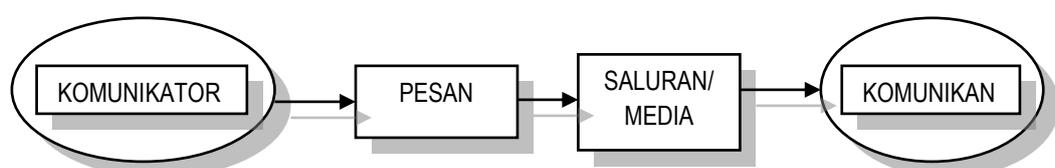
Dari berbagai gagasan tentang pengertian media tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar.
2. Media pembelajaran merupakan media yang penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran yang biasanya sudah dituangkan dalam silabus dan dimasukkan untuk mempertinggi kegiatan proses belajar mengajar.

3. Kedudukan Media dalam Pembelajaran

Kedudukan media dalam pembelajaran sangat penting bahkan sejajar dengan metode pembelajaran, karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan dan diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi.

Jika kembali kepada paradigma pembelajaran sebagai suatu proses transaksional dalam menyampaikan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor, maka posisi media jika diilustrasikan dan disejajarkan dengan proses komunikasi yang terjadi. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan posisi dari media dalam suatu proses yang bisa dikatakan sebagai proses komunikasi dalam pembelajaran.



Dalam proses pembelajaran terdapat tingkatan proses aktivitas yang melibatkan keberadaan media pembelajaran, yaitu:

- a. Tingkat pengolahan Informasi
- b. Tingkat penyampaian informasi
- c. Tingkat penerimaan informasi
- d. Tingkat pengolahan informasi
- e. Tingkat respon dari peserta didik
- f. Tingkat diagnosis dari pengajar
- g. Tingkat penilaian
- h. Tingkat penyampaian hasil.

Terjadinya pengalaman belajar yang bermakna tidak terlepas dari peran media terutama dari kedudukan dan fungsinya.

4. Kegunaan dan Fungsi Media

Dalam proses belajar mengajar seringkali apa yang disampaikan oleh guru kepada siswa mengalami penyimpangan-penyimpangan bahan ajar yang diberikan guru tidak dapat diterima oleh siswa secara baik. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap siswa.

Untuk mengatasi masalah di atas, maka perlu digunakan media dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran disamping berfungsi sebagai penyaji stimulus (informasi sikap, dan lain-lain) media juga berfungsi meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi.

Dalam hal-hal tertentu media juga berfungsi untuk mengatur langkah-langkah kemajuan serta untuk memberikan umpan bali. Banyak manfaat yang diperoleh dari media pembelajaran, antara lain:

- a. Media dapat menyamakan pengamatan. Pengamatan siswa dapat secara bersama-sama diarahkan kepada hal-hal yang penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- b. Media dapat memperjelas materi yang disampaikan oleh guru. Dengan menggunakan media dalam proses belajar mengajar, maka materi yang

disampaikan akan lebih benar, konkrit dan realistik. Dengan demikian akan mempermudah siswa memahami materi.

- c. Media dapat mengatasi ruang kelas dalam proses pembelajaran. Guru akan sering mengalami hal-hal yang sulit didalam kelas, contohnya obyek yang disampaikan oleh guru terlalu kecil atau terlalu besar. Dengan menggunakan media kesulitan bisa diatasi, obyek yang terlalu kecil dapat digunakan gambar atau alat pembesar (mikroskop). Demikian pula obyek yang besar dapat menggunakan gambar.
- d. Media dapat mengatasi keterbatasan waktu berarti peristiwa yang terjadi pada masa lampau tidak mungkin diulang lagi. Untuk mempelajari peristiwa lampau dapat melalui foto atau rekaman video.
- e. Media pembelajaran memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan walaupun media pembelajaran yang digunakan berupa gambar, namun siswa akan dapat berinteraksi.
- f. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif peserta didik. Peserta didik akan lebih bergairah dalam belajar.

5. Kriteria Pemilihan Media

Kriteria pemilihan media antara lain:

1. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, artinya media pengajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan.
2. Dukungan terhadap isi bahan pengajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa.
3. Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh, setidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar.
4. Keterampilan guru menggunakannya, artinya secanggih apapun sebuah media apabila tidak tahu cara menggunakannya maka media tersebut tidak memiliki arti apa-apa.
5. Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung.

6. Memilih media pembelajaran harus sesuai dengan taraf berfikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para sis-Karakteristik dan kemampuan masing-masing media perlu diperhatikan oleh guru agar mereka dapat memilih media mana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Sebagai contoh media audio, merupakan media auditif mengajarkan topik-topik pembelajaran yang bersifat verbal seperti pengucapan (*pronunciation*) bahasa asing. Untuk pengajaran bahasa asing media ini tergolong tepat karena bila secara langsung diberikan tanpa media sering terjadi ketidaktepatan dalam pengucapan pengulangan dan sebagainya. Pembuatan media audio ini termasuk mudah, hanya membutuhkan alat perekam dan narasumber yang dapat berbahasa asing, sementara itu pemanfaatannya menggunakan alat yang sama pula.
7. Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi peserta didik. Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada pembelajar. Selain itu media juga harus merangsang pembelajar mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan pembelajar dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong peserta didik untuk melakukan praktik-praktik dengan benar.
8. Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan sebuah media, antara lain biaya, ketersediaan fasilitas pendukung, kecocokan dengan ukuran kelas, keringkasan, kemampuan untuk dirubah, waktu dan tenaga penyiapan, pengaruh yang ditimbulkan, kerumitan, dan kegunaan.

6. Jenis-jenis Media Pembelajaran

Banyak cara diungkapkan untuk mengidentifikasi media serta mengklasifikasikan karakteristik fisik, sifat, kompleksitas, ataupun klasifikasi menurut kontrol pada pemakai. Namun demikian, secara umum media bercirikan tiga unsur pokok, yaitu: suara, visual, dan gerak. Menurut Rudy Brets, ada 7 (tujuh) klasifikasi media, yaitu:

1. Media audio visual gerak, seperti: film suara, pita video, film televisi.
2. Media audio visual diam, seperti: film rangkai suara, dsb.

3. Audio semi gerak seperti: tulisan jauh bersuara.
4. Media visual bergerak, seperti: film bisu.
5. Media visual diam, seperti: halaman cetak, foto, *microphone*, *slide* bisu.
6. Media audio, seperti: radio, telepon, pita audio.
7. Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri.

Sedangkan berdasarkan jenisnya, media dapat dikelompokkan sebagai berikut.

JENIS MEDIA	CONTOH MEDIA
1. Audio	<ul style="list-style-type: none"> • pita audio (rol atau kaset) • piringan audio • radio (rekaman siaran)
2. Cetak	<ul style="list-style-type: none"> • buku teks terprogram • buku pegangan/manual • buku tugas
3. Audio – Cetak	<ul style="list-style-type: none"> • buku latihan dilengkapi kaset • gambar/poster (dilengkapi audio)
4. Proyek Visual Diam	<ul style="list-style-type: none"> • film bingkai (slide) • film rangkai (berisi pesan verbal)
5. Proyek Visual Diam dengan Audio	<ul style="list-style-type: none"> • film bingkai (slide) suara • film rangkai suara
6. Visual Gerak	<ul style="list-style-type: none"> • film bisu dengan judul (caption)
7. Visual Gerak dengan Audio	<ul style="list-style-type: none"> • film suara • video/vcd/dvd
8. Benda	<ul style="list-style-type: none"> • benda nyata • model tiruan (mock up)
9. Komputer	<ul style="list-style-type: none"> • media berbasis komputer; CAI (Computer Assisted Instructional) & CMI (Computer Managed Instructiona

Pada saat ini, prpses pembelajaran yang menggunakan berbagai media, lebih dipermudah dengan memanfaatkan computer sebagai sumber dan media. Salah satu pemanfaatan computer sebagai sumber dan media pembelajaran adalah internet.

Internet, singkatan dari *interconnection and networking*, adalah jaringan informasi global, yaitu, "*the largest global network of computers, that enables people throughout the world to connect with each other*". Internet diluncurkan pertama kali oleh J.C.R. Licklider dari MIT (*Massachusetts Institute Technology*) pada bulan Agustus 1962.

Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan sis-wa untuk belajar secara mandiri. "*Through independent study, students become doers, as well as thinkers*" (Cobine, 1997). Para siswa dapat mengakses se-cara *online* dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, data statistik, (Gordin et. al., 1995). Informasi yang diberikan *server-computers* itu dapat berasal dari *commercial businesses (.com)*, *goverment services (.gov)*, *nonprofit organizations (.org)*, *educational institutions (.edu)*, atau *artistic and cultural groups (.arts)*

Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. Dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas.
2. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa.
3. Pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing.
4. Lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing pembelajar/siswa.
5. Adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran.
6. Pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif, sehingga menarik pembelajar/siswa; dan memungkinkan pihak berkepentingan (orang

tua siswa maupun guru) dapat turut serta menyukseskan proses pembelajaran, de-ngan cara mengecek tugas-tugas yang dikerjakan siswa secara *on-line*.

Perkembangan/kemajuan teknologi internet yang sangat pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan termasuk di dalamnya untuk pendidikan/pembelajaran. Berbagai percobaan untuk mengembangkan perangkat lunak (program aplikasi) yang dapat menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan/pembelajaran terus dilakukan. Perangkat lunak yang telah dihasilkan akan memungkinkan para pengembang pembelajaran (*instructional developers*) bekerjasama dengan ahli materi (*content specialists*) mengemas materi pembelajaran elektronik (*online learning material*). Pembelajaran melalui internet di Sekolah Dasar dapat diberikan dalam beberapa format (Wulf, 1996), di antaranya adalah: (1) *Electronic mail (delivery of course materials, sending in assignments, getting and giving feedback, using a course listserv., i.e., electronic discussion group*, (2) *Bulletin boards/newsgroups for discussion of special group*, (3) *Downloading of course materials or tutorials*, (4) *Interactive tutorials on the Web*, dan (5) *Real time, interactive conferencing using MOO (Multiuser Object Oriented) systems or Internet Relay Chat*.

Setelah bahan pembelajaran elektronik dikemas dan dimasukkan ke dalam jaringan sehingga dapat diakses melalui internet, maka kegiatan berikutnya yang perlu dilakukan adalah mensosialisasikan ketersediaan program pembelajaran tersebut agar dapat diketahui oleh masyarakat luas khususnya para calon peserta didik. Para guru juga perlu diberikan pelatihan agar mereka mampu mengelola dengan baik penyelenggaraan kegiatan pembelajaran melalui internet. Karakteristik/potensi internet sebagaimana yang telah diuraikan di atas tentunya masih dapat diperkaya lagi dengan yang lainnya. Namun, setidaknya ketiganya karakteristik/potensi internet tersebut dipandang sudah memadai sebagai dasar pertimbangan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran melalui internet.

7. Prinsip dan Asumsi Dasar dalam Pemilihan Media

Sebelum kita melakukan pemilihan media, ada beberapa asumsi dasar yang perlu kita ingat, yaitu:

1. Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan, karena itu kita perlu memilih media yang sesuai dengan karakteristik media tersebut.
2. Penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang perlu. Namun harap diingat, bahwa penggunaan media yang terlalu banyak sekaligus dalam suatu kegiatan pembelajaran, justru akan membingungkan siswa dan tidak akan memperjelas pelajaran. Oleh karena itu, pilihlah media yang memang sangat diperlukan dan jangan berlebihan.
3. Penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Lebih baik memilih media yang sederhana yang dapat mengaktifkan seluruh siswa daripada media canggih namun justru membuat siswa kita terheran-heran pasif.
4. Sebelum media digunakan harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pelajaran. Tentukan bagian materi mana saja yang akan kita sajikan dengan bantuan media. Rencanakan bagaimana strategi dan teknik penggunaannya.
5. Hindari penggunaan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan atau sekedar pengisi waktu kosong saja. Jika siswa sadar bahwa media yang digunakan hanya untuk mengisi waktu kosong, maka kesan ini akan selalu muncul setiap kali guru menggunakan media. Penggunaan media yang sembarangan, asal-asalan, "daripada tidak dipakai", akan membawa akibat negatif yang lebih buruk daripada tidak memakainya sama sekali.
6. Harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup sebelum penggunaan media. Kurangnya persiapan bukan saja membuat proses kegiatan belajar mengajar tidak efektif dan efisien, tetapi justru mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Hal ini terutama perlu diperhatikan ketika kita akan menggunakan media elektronik.

8. Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran

Dalam rangka memanfaatkan sumber atau media dalam suatu proses pembelajaran, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Berikut ini adalah format yang dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan sumber atau media pembelajaran.

FORMAT ANALISIS KEBUTUHAN MEDIA PEMBELAJARAN

SEKOLAH :

MATA PELAJARAN :

KELAS/SEMESTER :

KOMPETENSI DASAR: :

No.	Materi	Kegiatan Pembelajaran	Alternatif Sumber/Media	Media Terpilih	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Catatan: Kolom keterangan berisi tentang penggunaan media dalam proses pembelajaran.

9. Pembuatan Media Pembelajaran

Jika media akan dibuat atau diproduksi sendiri, maka perlu dirancang terlebih dahulu agar diperoleh gambaran atau sketsa. Rancangan media tersebut dapat menggunakan format desain media pembelajaran.

FORMAT DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN

MATA PELAJARAN :
.....

KELAS/SEMESTER
KOMPETENSI DASAR:
MATERI PEMBELAJARAN
JENIS MEDIA YANG DIPILIH

DESKRIPSI/RANCANGAN MEDIA/SKETSA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

BAHAN YANG DIPERLUKAN:

1.
2.
3.

LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN:

- (1)
- (2)
- (3)

LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN/

PENERAPAN DALAM PEMBELAJARAN:

1.
2.
3.

CATATAN: (KELEBIHAN/KEKURANGAN)

.....

D. AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta diklat menganalisis, menyimpulkan dalam suasana yang aktif, inovatif dan kreatif, menyenangkan dan bermakna. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup :

1. Aktivitas individu, meliputi :
 - Memahami dan mencermati materi diklat
 - Mengerjakan latihan tugas, menyelesaikan masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar, menyimpulkan

- Melakukan refleksi
2. Aktivitas kelompok, meliputi :
- mendiskusikan materi pelatihan
 - bertukar pengalaman dalam melakukan pelatihan penyelesaian masalah /kasus
 - melaksanakan refleksi

E. LATIHAN/KASUS/TUGAS

1. Sebutkan jenis-jenis media pembelajaran!
2. Jelaskan kriteria pemilihan media pembelajaran!
3. Jelaskan prinsip dan asumsi dasar dalam pemilihan media pembelajaran
4. Lakukan analisis media pembelajaran dengan mengisi format berikut:
Media pembelajaran yang dipilih dapat berupa media pembelajaran secara manual maupun berbasis IT

No.	Materi	Kegiatan Pembelajaran	Alternatif Sumber/Media	Media Terpilih	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

5. Buatlah rancangan media pembelajaran dengan mengisi format berikut

FORMAT DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN

MATA PELAJARAN

KELAS/SEMESTER

KOMPETENSI DASAR:

MATERI PEMBELAJARAN

JENIS MEDIA YANG DIPILIH

DESKRIPSI/RANCANGAN MEDIA/SKETSA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAHAN YANG DIPERLUKAN:

4.

5.

6.

LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN:

(4)

(5)

(6)

LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN/

PENERAPAN DALAM PEMBELAJARAN:

4.

5.

6.

CATATAN: (KELEBIHAN/KEKURANGAN)

.....

F. RANGKUMAN

1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Media pembelajaran juga merupakan media yang penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran yang biasanya sudah dituangkan dalam silabus dan dimasukkan untuk mempertinggi kegiatan proses belajar mengajar.
2. Kedudukan media dalam pembelajaran sangat penting bahkan sejajar dengan metode pembelajaran, karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan dan diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi.
3. Dalam hal-hal tertentu media juga berfungsi untuk mengatur langkah-langkah kemajuan serta untuk memberikan umpan bali. Banyak manfaat yang diperoleh dari media pembelajaran, antara lain:
 - a. Media dapat menyamakan pengamatan.
 - b. Media dapat memperjelas materi yang disampaikan oleh guru.
 - c. Media dapat mengatasi ruang kelas dalam proses pembelajaran.
 - d. Media dapat mengatasi keterbatasan waktu berarti peristiwa yang terjadi pada masa lampau tidak mungkin diulang lagi.

- e. Media pembelajaran memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan
 - f. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif peserta didik.
4. Kriteria pemilihan media antara lain:
- a. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran
 - b. Dukungan terhadap isi bahan pengajaran
 - c. Kemudahan memperoleh media
 - d. Keterampilan guru menggunakannya
 - e. Tersedia waktu untuk menggunakannya,
 - f. Memilih media pembelajaran harus sesuai dengan taraf berfikir siswa,
 - g. Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi peserta didik.

G. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Setelah membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini apakah Anda memperoleh pengetahuan baru, yang sebelumnya belum pernah Anda pahami, apakah materi yang diuraikan mempunyai manfaat dalam mengembangkan profesionalisme, apakah materi yang diuraikan mempunyai kedalaman dan keluasan yang Anda butuhkan sebagai guru. Setelah Anda membaca kegiatan pembelajaran dalam modul ini rencana tindak lanjut apa yang akan Anda lakukan?

DAFTAR PUSTAKA

- Adey, P. 1989. Adolescent development and school science. *International Journal of Science Education*, 79: 98. England.
- Alessi M. Stephen & S.R., Trollip. 1984. *Computer Based Instruction Method & Development*. New Jersley: Prentice-Hall, Inc.
- Arsyad, Azhar. 2003. *Media Pembelajaran*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barbara B. Seels, Rita C. Richey. 1994. *Instructiunal Technology: The Definition and Domains of The Field*, AECT Washington DC.
- Bates, A. W. 1995. *Technology, Open Learning and Distance Education*. London: Routledge.
- Cepi Riyana. 2004. Strategi implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Me-nerapkan Konsep Instructional Technology. *Jurnal Edutech*, Jurusan Kurtek Bandung.
- 2006. *Media Pembelajaran*. Modul, Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Drive, R. 1988. Changing conceptions. *Journal of Research in Education*, 161-96.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. Dirjen PMPTK.2009. *Sumber dan Media Pembelajaran. Bahan TOT Calon Pengawas dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Gerlach, S. Vernon. 1980. *Teaching and Media*. New Jersey: Prentice-Hall., Inc.
- Hamalik, Oemar. 1980. *Media Pendidikan*. Bandung : Alumni.
- Harjito. 2003. *Pengembangan, Pemanfaatan dan Perawatan Media Transparansi*. Bahan Sajian Diklat. Jakarta : Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.
- Heinich, R., Molenda, M., & Russel, J.D. 1996. (3rd Ed). *Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction, Integrating Computers and Using Media*. Upper Saddle River, NJ.: Merril Prentice Hall.

- Ibrahim. 1981/1982. *Media Instruksional*. Malang : Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi IKIP Malang.
- Ibrahim, dkk. 2004. *Media Pembelajaran*. Bahan Sajian Program Akta Mengajar. Malang : Universitas Negeri Malang.
- Kemp, Jerrold E. 1994. *Designing Effective Instruction*. New York: MacMillan Publisher.
- Kenji Kitao. 1998. *Internet Resources: ELT, Linguistics, and Communication*. Japan: Eichosha.
- Lasmono, Suharto. *Pedoman Pemanfaatan Program Media Pembelajaran*. Bahan Sajian Diklat. Jakarta : Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.
- Molenda, Heinich Russell. 1982. *Instructional Media and The New Technology of Instruction*. Canada: John Wiley & Son.
- Sadiman, Arief S., dkk. 2003. *Media Pendidikan : Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana. 1988. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru
- Suleiman, Amir Hamzah. 1985. *Media Audio-Visual untuk Pengajaran, Penerangan dan Penyuluhan*. Jakarta : Gramedia.
- Winataputra, Udin S. dkk. 2005. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional.
- Zainuri, dan Endang Rohayati. 1997/1998. *Sumber dan Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bahan Penataran untuk Guru SMU. Malang : Proyek PPPG IPS dan PMP Malang.



PPPPTK Pkn DAN IPS

**Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo
KOTA BATU – JAWA TIMUR**

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id